SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 000.7.2.4/42/418.54/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 serta Berita Acara Nomor 000.7.2.4/1970/418.54/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 menjadi landasan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 190);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2026;
b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 7 - 2025
BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19740120 199803 2 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK xi

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1 Latar Belakang ..... I - 2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 4

1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 8

1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 10

1.4.1 Maksud ..... I - 10

1.4.2 Tujuan ..... I - 11

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I - 11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1

2.1 Kondisi Umum Daerah ..... II - 2

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 2

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 10

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 10

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 19

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II - 26

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 28

2.1.3.1 Urusan Wajib Layanan Dasar ..... II - 28

2.1.3.1.1 Pendidikan ..... II - 28

2.1.3.1.2 Kesehatan ..... II - 31

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II - 33

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II - 38

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II - 39

2.1.3.1.6 Sosial ..... II - 40

2.1.3.2 Wajib Bukan Layanan Dasar ..... II - 44

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja ..... II - 44

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... II - 47
2.1.3.2.3 Pangan ..... II - 48
2.1.3.2.4 Pertanahan ..... II - 57
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup ..... II - 58
2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II - 61
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II - 62
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... II - 61
2.1.3.2.9 Perhubungan ..... II - 67
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika ..... II - 70
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II - 72
2.1.3.2.12 Penanaman Modal ..... II - 73
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga ..... II - 75
2.1.3.2.14 Statistik ..... II - 77
2.1.3.2.15 Kebudayaan ..... II - 78
2.1.3.2.16 Perpustakaan ..... II - 81
2.1.3.2.17 Kearsipan ..... II - 82
2.1.3.3 Urusan Pilihan ..... II - 83
2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan ..... II - 83
2.1.3.3.2 Pariwisata ..... II - 84
2.1.3.3.3 Pertanian ..... II - 85
2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II - 89
2.1.3.3.5 Perdagangan ..... II - 89
2.1.3.3.6. Perindustrian ..... II - 91
2.1.3.3.7. Transmigrasi ..... II - 92
2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II - 94
2.1.3.4.1 Perencanaan ..... II - 97
2.1.3.4.2 Keuangan ..... II - 94
2.1.3.4.1.1 Keuangan dan Aset Daerah ..... II - 95
2.1.3.4.1.2 Pendapatan Daerah ..... II - 95
2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ..... II - 96
2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan ..... II - 99
2.1.3.4.5 Kelembagaan ..... II - 100

2.1.3.4.6. Kesekretariatan DPRD ..... II - 102
2.1.3.4.7. Pengawasan ..... II - 103
2.1.3.4.8. Penanggulangan Bencana ..... II - 103
2.1.3.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik ..... II - 104
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 106
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II - 106
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 107
2.1.4.2.1 Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah ..... II - 107
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi ..... II - 107
2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas ..... II - 107
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia ..... II - 108
2.1.4.4.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran ..... II - 108
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD ..... II - 108
2.3 Permasalahan Pembangunan ..... II - 301
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II - 301
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... II - 303
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 ..... III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11
3.2.1 Proyeksi/Target Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-13
3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah III-15
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-15
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-20
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-4
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional IV-4

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV-6

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama..... VI-2

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-3

BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2024..... II - 8

TABEL 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024..... II - 9

TABEL 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2022 – 2024 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010..... II-12

TABEL 2.4 Distribusi PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010..... II-13

TABEL 2.5 Perkembangan Kelompok Kesenian Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2023..... II-26

TABEL 2.6 Jumlah Fasilitas Pendukung Olahraga Tahun 2022 - 2024..... II-27

TABEL 2.7 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022 - 2024..... II-29

TABEL 2.8 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022 - 2024..... II-31

TABEL 2.9 Capaian Sarana Infrastruktur Daerah Tahun 2022 - 2024..... II-33

TABEL 2.10 Perkembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022 - 2024..... II-34

TABEL 2.11 Kinerja Pelayanan Irigasi dan Penanggulangan Banjir Tahun 2022 - 2024..... II-35

TABEL 2.12 Perkembangan Bangunan Irigasi dan Areal Sawah Tahun 2022 - 2024..... II-36

TABEL 2.13 Panjang Saluran Irigasi Tahun 2022 - 2024..... II-37

TABEL 2.14 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 - 2024..... II-38

TABEL 2.15 Perkembangan Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2022 - 2024..... II-39

TABEL 2.16 Capaian Kualitas Penanganan Kebakaran Tahun 2022 - 2024..... II-40

TABEL 2.17 Capaian Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial Tahun 2022 - 2024 ..... II-41

TABEL 2.18 Perkembangan PMKS Tahun 2022 - 2024 ..... II-42

TABEL 2.19 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022 - 2024 ..... II-43

TABEL 2.20 Capaian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Tahun 2022 - 2024 ..... II-44

TABEL 2.21 Perkembangan Data Ketenagakerjaan Tahun 2022 - 2024 ..... II-45

TABEL 2.22 Capaian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Tahun 2022 - 2024 ..... II-47

TABEL 2.23 Capaian Indikator Pangan Daerah Tahun 2022 - 2024 ..... II-49

TABEL 2.24 Ketersediaan Bahan Pangan Setara Beras Tahun 2022 - 2024 .... II-56

TABEL 2.25 Perkembangan Produksi Peternakan dan Populasi Hewan Ternak Tahun 2022 - 2024 ..... II-57

TABEL 2.26 Populasi Hewan Ternak Tahun 2022 - 2024 ..... II-57

TABEL 2.27 Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2022 - 2024 ..... II-59

TABEL 2.28 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2024 ..... II-59

TABEL 2.29 Perkembangan Kualitas Lingkungan Tahun 2022 - 2024 ..... II-60

TABEL 2.30 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2022 - 2024 ..... II-61

TABEL 2.31 Perkembangan Pendaftaran Penduduk Tahun 2022 - 2024 ..... II-62

TABEL 2.32 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pemerintah Desa Tahun 2022 - 2024 ..... II-64

TABEL 2.33 Capaian Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2022 - 2024 ..... II-66

TABEL 2.34 Perkembangan Peserta KB dan PUS Tahun 2022 - 2024 ..... II-66

TABEL 2.35 Jumlah Kader PPKB Tahun 2022 - 2024 ..... II-67

TABEL 2.36 Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2022 - 2024 ..... II-67

TABEL 2.37 Perkembangan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2020 - 2023 ..... II-68

TABEL 2.38 Perkembangan Pemenuhan Sarana Prasarana Uji Kendaraan Tahun 2022 - 2024 ..... II-69

TABEL 2.39 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji Tahun 2022 - 2024 ..... II-69

TABEL 2.40 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 - 2024 ..... II-70

TABEL 2.41 Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022 - 2024 ..... II-72

TABEL 2.42 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022 - 2024 ... II-74

TABEL 2.43 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi Tahun 2022 - 2024 . II-74

TABEL 2.44 Perkembangan Pelayanan Perizinan Tahun 2022 - 2024 ..... II-74

TABEL 2.45 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 - 2024 ..... II-75

TABEL 2.46 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olah Raga Tahun 2022 - 2024 ..... II-76

TABEL 2.47 Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah Tahun 2022 - 2024 ..... II-78

TABEL 2.48 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Tahun 2022 - 2024 ..... II-79

TABEL 2.49 Perkembangan Kelompok Kesenian Tahun 2022 - 2024 ..... II-80

TABEL 2.50 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2022 - 2024 ..... II-82

TABEL 2.51 Perkembangan Kinerja Kearsipan Tahun 2022 - 2024 ..... II-82

TABEL 2.52 Perkembangan Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2022 - 2024 ..... II-83

TABEL 2.53 Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2022 - 2024 ..... II-85

TABEL 2.54 Nilai Produksi Pertanian Tahun 2022 - 2024 ..... II-86

TABEL 2.55 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022 - 2024 ..... II-87

TABEL 2.56 Perkembangan Urusan Perdagangan Tahun 2022 - 2024 ..... II-90

TABEL 2.57 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor menurut Komoditas Tahun 2022 - 2024..... II-90

TABEL 2.58 Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri Tahun 2022 - 2024..... II-91

TABEL 2.59 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Tahun 2022 - 2024 ..... II-92

TABEL 2.60 Perkembangan Pelayanan Transmigrasi Tahun 2022 - 2024..... II-92

TABEL 2.61 Kinerja Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2024..... II-94

TABEL 2.62 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2024 ..... II-95

TABEL 2.63 Perkembangan Kapasitas SDM dan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 - 2024..... II-96

TABEL 2.64 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 - 2024..... II-98

TABEL 2.65 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mendapatkan Sanksi Disiplin Tahun 2022 - 2024..... II-99

TABEL 2.66 Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 - 2024..... II-99

TABEL 2.67 Nilai IKM Tahun 2022 - 2024 ..... II-100

TABEL 2.68 Perkembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Tahun 2022 - 2024..... II-101

TABEL 2.69 Peningkatan Peran DPRD 2022 - 2024 ..... II-102

TABEL 2.70 Rincian Kinerja Peningkatan Peran DPRD Tahun 2022 - 2024 ..... II-102

TABEL 2.71 Perkembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022 - 2024..... II-103

TABEL 2.72 Capaian Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Daerah Tahun 2022 - 2024..... II-104

TABEL 2.73 Perkembangan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tahun 2022 - 2024 ..... II-105

TABEL 2.74 Perkembangan Infrastruktur Politik Tahun 2022 - 2024 ..... II-106

TABEL 2.75 Perkembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2022 - 2024 ..... II-107

TABEL 2.76 Angkatan Kerja di Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 ..... II-108

TABEL 2.77 Hubungan Antara Isu Strategis dengan Prioritas RKPD Tahun 2026 ..... II-303

TABEL 2.78 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026 ..... II-304

TABEL 3.1 Data Indikator Makro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri III-3

TABEL 3.2 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 . III-5

TABEL 3.3 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 . III-7

TABEL 3.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kediri Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022 – 2024 ..... III-9

TABEL 3.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 ..... III-10

TABEL 3.6 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2022 – 2024 ..... III-11

TABEL 3.7 Realisasi Tahun 2023 – 2024 Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Kediri III-13

TABEL 3.8 Realisasi Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Kediri Tahun 2026 – 2027 ..... III-14

TABEL 3.9 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 – 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi 2026 – 2027 ..... III-16

TABEl 3.10 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 - 2027 ..... III-17

TABEL 3.11 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Kabupaten Kediri Tahun 2023-2024 ,Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi/Target Tahun 2026-2027 ..... III-17

TABEL 3.12 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 - 2027 ..... III-18

TABEL 3.13 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 - 2024,Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi/Target Tahun 2026-2027 ..... III-19

TABEL 3.14 Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2023, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026-2027 ..... III-22

TABEL 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 - 2027 Dalam APBD Kabupaten Kediri III-25

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Masing-Masing Misi..... IV-2

TABEL 4.2 Indikator Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur IV-5

TABEL 4.3 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-11

TABEL 4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kediri IV-22

TABEL 6.1 Target Kinerja Utama Kabupaten Kediri Tahun 2025 ..... VI-2

TABEL 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri VI-3

TABEL 6.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabubapte Kediri VI-9

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 RASIO GINI NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUT DAN KABUPATEN KEDIRI II-10

GRAFIK 2.2 PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 - 2024 ..... II-11

GRAFIK 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2022- 2024 ..... II-12

GRAFIK 2.4 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 – 2024 ADHB II-15

GRAFIK 2.5 LAJU INFLASI KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL PER BULAN TAHUN 2024 ..... II-16

GRAFIK 2.6 LAJU INFLASI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024 ..... II-16

GRAFIK 2.7 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN NASIONAL PROVINSI DAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2023 ..... II-17

GRAFIK 2.8 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022-2024 ..... II-18

GRAFIK 2.9 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2022 - 2024 ..... II-19

GRAFIK 2.10 ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 ..... II-20

GRAFIK 2.11 ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 ..... II-21

GRAFIK 2.12 PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 ..... II-22

GRAFIK 2.13 PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN (ANGKA MELEK HURUF) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022-2024..... II-23

GRAFIK 2.14 ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 – 2024..... II-24

GRAFIK 2.15 ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 - 2024..... II-25

GRAFIK 2.16 PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024..... II-25

GRAFIK 3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 - 2024 ..... III-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan I-10

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri II-3

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Kediri II-4

Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Kediri..... II-7

Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kediri II-7

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2024 ..... II- 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional dengan merumuskan langkah-langkah konkret, mengalokasikan sumber daya dengan efektif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang diperlukan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Kediri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kediri yang memuat kegiatan dan program prioritas pembangunan. RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 merupakan tahun ke-1 (satu) dari pelaksanaan periodisasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 dan merupakan tahap ke-1 (satu) dari RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045. Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan yang dihimpun melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Pemerintah Kabupaten Kediri yang memuat program/kegiatan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah. Di samping itu penyusunan RKPD juga berpedoman pada program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2026.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (1), dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Musrenbang;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, teknokratik, politik, dan partisipatif. Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota; (3) teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah; (4) politik, merupakan pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, merupakan pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Pendekatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 197);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 970);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
35. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
37. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta isu strategis nasional sesuai dengan kebijakan-kebijakan baru dampak dari pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Dalam penyusunannya, RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

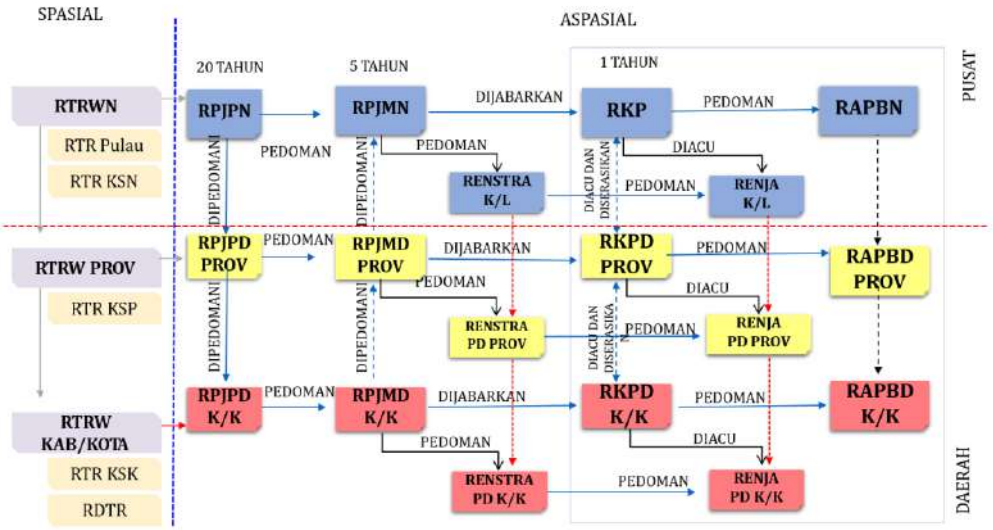
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2045 dan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043.

Dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional tersebut menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hubungan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L. Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, karena RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan memfokuskan pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan pada tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, serta keserasian antar dokumen perencanaan pembangunan adalah sebagaimana gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun dengan maksud :

a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2025 – 2029 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2026;
b. Menjabarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 ke dalam RKPD Tahun 2026 serta menjadi pedoman utama penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
c. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
e. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan; serta
f. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur dalam penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026;
c. Memantapkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memperhatikan efisiensi alokasi sumber daya dan kemampuan keuangan daerah, mengembangkan dan memantapkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Kediri Tahun 2026;
d. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
e. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026; serta
f. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum tentang kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan sasaran eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional yang berdampak di daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. Sasaran dan prioritas pembangunan pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

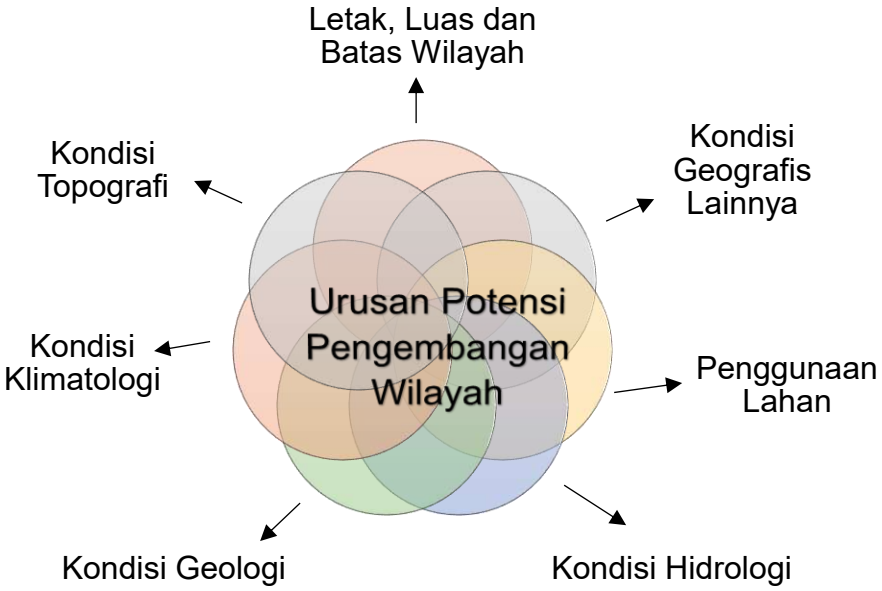
Pembangunan setiap daerah memeiliki karakteristik dan fenomena yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan Pembangunan di daerah tersebut. Kekayaan budaya regional dan struktur kewilayahan seperti kondisi geografis, social, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda menjadi nilai positif bagi pengembangan daerah jika dioptimalkan kemanfaatannya dalam kerangka pembvangunan daerah, tak terkecuali bagi Kabupaten Kediri. Sebagai salah satu wilayah yang memeiliki cukup banyak potensi sumber daya daerah yang baik dalam sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perindustrian maupun jasa, Kabupaten Kediri memiliki peluang posistif dalam pelaksanaan pencapaian target pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan adanya pengenalan yang baik terhadap kondisi dan potensi daerah, sehingga akan mampu memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada serta mampu menentukan prioritas dan strategi yang tepat dalam melakukan pembangunan di daerah tersebut. Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Kediri yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesenjangan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Kediri yang akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana Pembangunan melalui pemetaan secara objektif dan analisi data yang valid.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Kediri perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan wilayah Kabupaten Kediri sebagaimana gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kediri



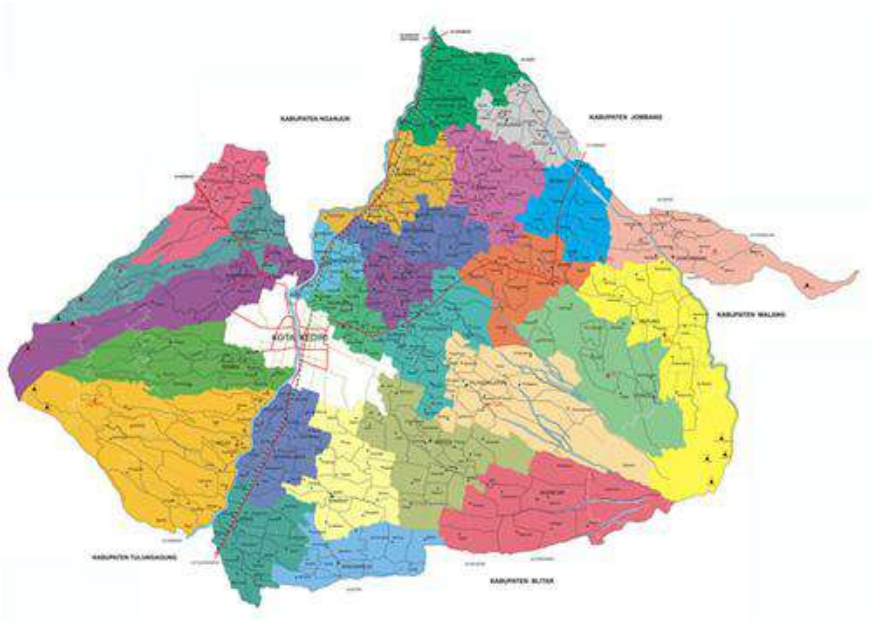
Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Kediri dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

a. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak pada koordinat 111^0 47’ 05” s.d. 112^0 18’ 20” Bujur Timur dan 7^0 36’ 12” s.d. 8^0 0’ 32” Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah seluas 1.523,56 km² atau 152.356 Ha. Sedangkan secara administratif Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 343 desa dan 1 kelurahan, dengan batas-batas dan peta wilayah sebagaimana gambar 2.2 berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Kediri



Berdasarkan topografinya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan luas wilayah yaitu, (1) ketinggian di atas 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl) yang membentang seluas 32,34 persen dari total luas wilayah, (2) ketinggian di atas 100-500 meter dpl yang membentang seluas 53,83 persen dari total luas wilayah, (3) ketinggian di atas 500-1.000 meter dpl yang membentang seluas 9,98 persen dari total luas wilayah, dan (4) ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73 persen dari total luas wilayah.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
- Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Secara hidrologi, di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Saluran Turitunggorono, Kali Bangi dan Kali Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya mengalir pada musim penghujan. Potensi air tanah

sungai-sungai ini sebelum sampai ke Sungai Brantas telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah/irigasi.

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Suhu udara di Kabupaten Kediri berkisar antara 23^{o}C sampai 31^{o}C, dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun 2023, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei mencapai 380 mm^{3} dan hari hujan terbanyak pada bulan Februari dan Mei.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 untuk mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Kediri secara hierarkis meliputi :

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terdapat 4 (empat) PKL terletak di perkotaan Ngasem, Grogol, Pare, dan Ngadiluwih;
2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi Kecamatan Tarokan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Grogol, Papar, Purwoasri, Kayen Kidul, Semen, Wates, dan Plemahan; dan
3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi Kecamatan Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan, Ringinrejo dan Semen.

Sedangkan kawasan strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan potensi wilayah dan koridor ekonomi meliputi :

1) Kawasan Pengembangan Agropolitan, yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan antara lain:
    a) Kawasan agropolitan Ngawasondat berada di Kecamatan Ngancar dan Kecamatan Plosoklaten;
    b) Kawasan agropolitan Pakancupung berada di Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu;
    c) Kawasan agropolitan Segobatam berada di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Mojo;

d) Kawasan agropolitan Palempari berada di Kecamatan Purwoasri.

2) Kawasan Koridor Ekonomi, yang bertujuan mewujudkan koridor ekonomi sebagai kawasan cepat tumbuh antara lain:
   a) Kawasan Ibu Kota Kabupaten berada di Kecamatan Ngasem dan sekitarnya;
   b) Kawasan Aerotropolis di Kecamatan Grogol dan sekitarnya;
   c) Kawasan Agroindustri di Kecamatan Ngadiluwih dan sekitarnya;
   d) Kawasan edukasi Kampung Bahasa berada di Kecamatan Pare.

c. Wilayah Rawan Bencana

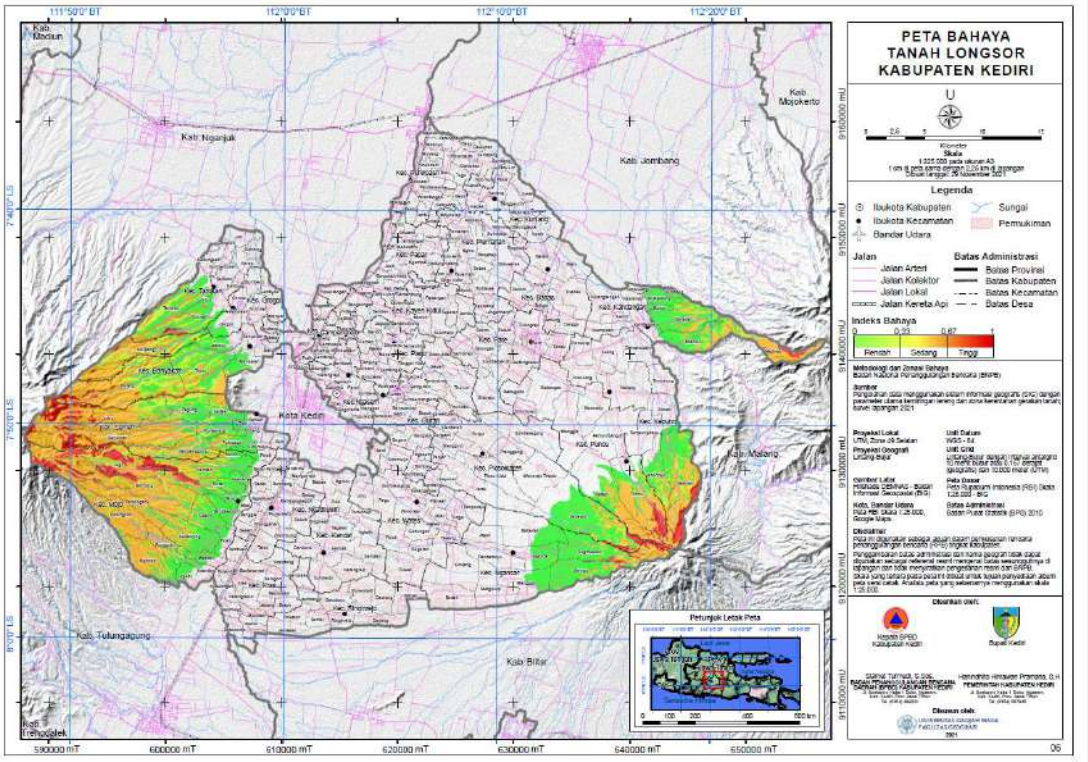
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 dan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sedang. Beberapa risiko bencana dengan jiwa terpapar diatas 50% yang ada di Kabupaten Kediri meliputi :

a. Bencana gempa bumi;
b. Bencana Letusan Gunung berapi;
c. Bencana kekeringan; dan
d. Bencana cuaca ekstrim.

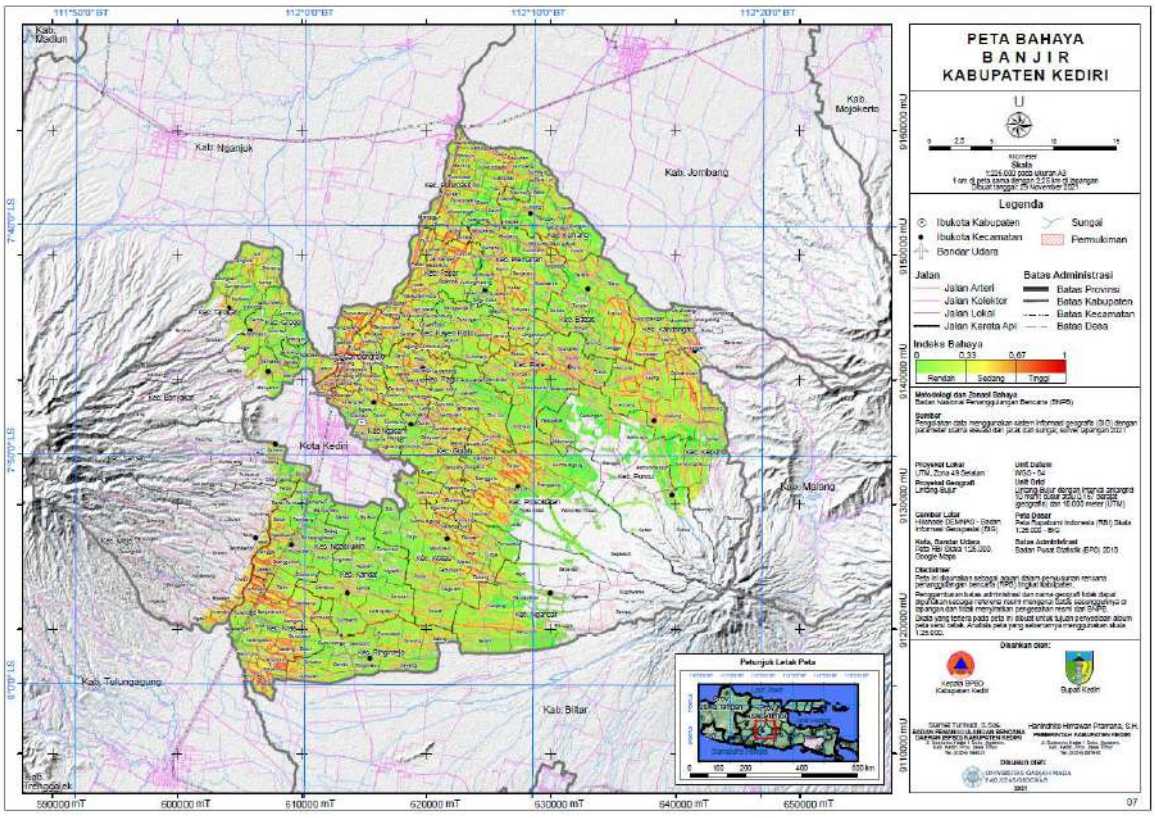
Dalam rangka menanggulangi risiko bencana, maka Kabupaten Kediri menyusun peta guna memetakan wilayah yang rawan akan bencana alam. Peta kawasan rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Kediri terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kawasan rawan longsor, berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, dan Ngancar.

Gambar 2.3
Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Kediri



2) Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar, Purwoasri, Tarokan, Grogol, dan Banyakan.



Gambar 2.4 Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kediri

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, sehingga diharapkan dapat mencegah dan menangani bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kediri.

d. Aspek Demografi

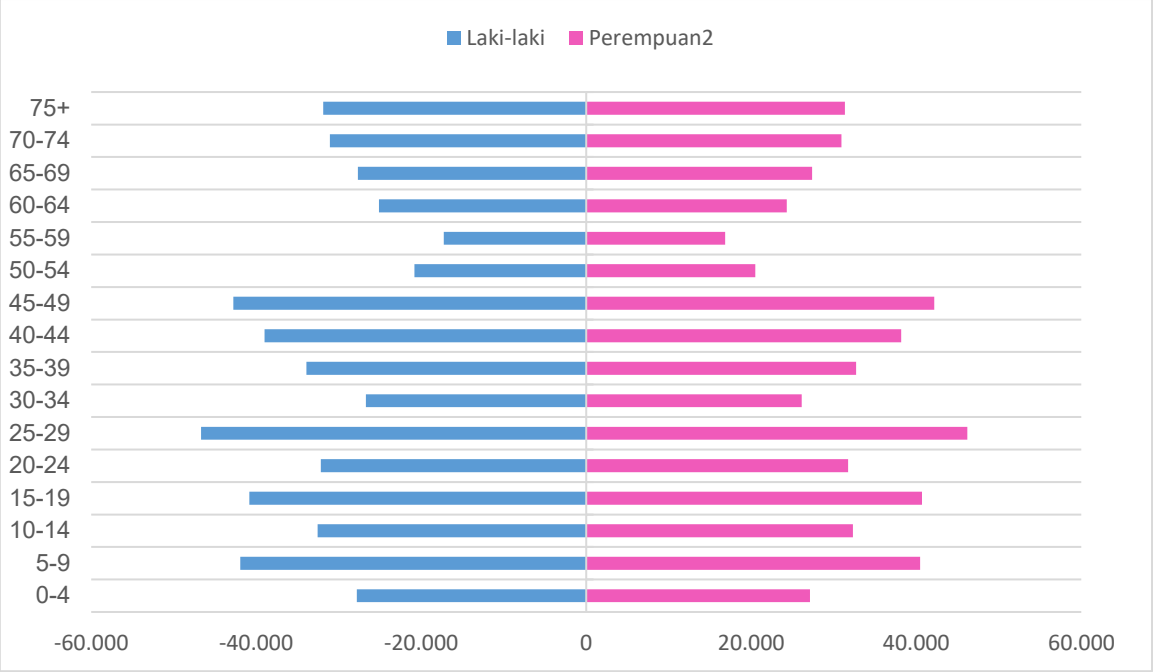
Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1,684,454 jiwa, terdiri dari laki-laki 849,958 jiwa (50,46%) dan perempuan 834.496 jiwa (49,54%). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri tahun 2023 adalah sebesar 101,85%. Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir sebagaimana table 2.1 berikut :

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2024

(Orang)

NO.	U R A I A N	TAHUN			
		2021	2022	2023*	2024**
1.	Laki-laki	845.152	845.526	849.958	853.689
2.	Perempuan	828.006	829.292	834.496	838.287
Jumlah		**1.673.158**	**1.674.818**	**1.684.454**	**1.691.976**
Sex ratio (%)		**102,07**	**101,96**	**101,85**	**101,84**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*



Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Kepadatan penduduk Kabupaten Kediri dihitung dengan menggunakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan demikian kepadatan

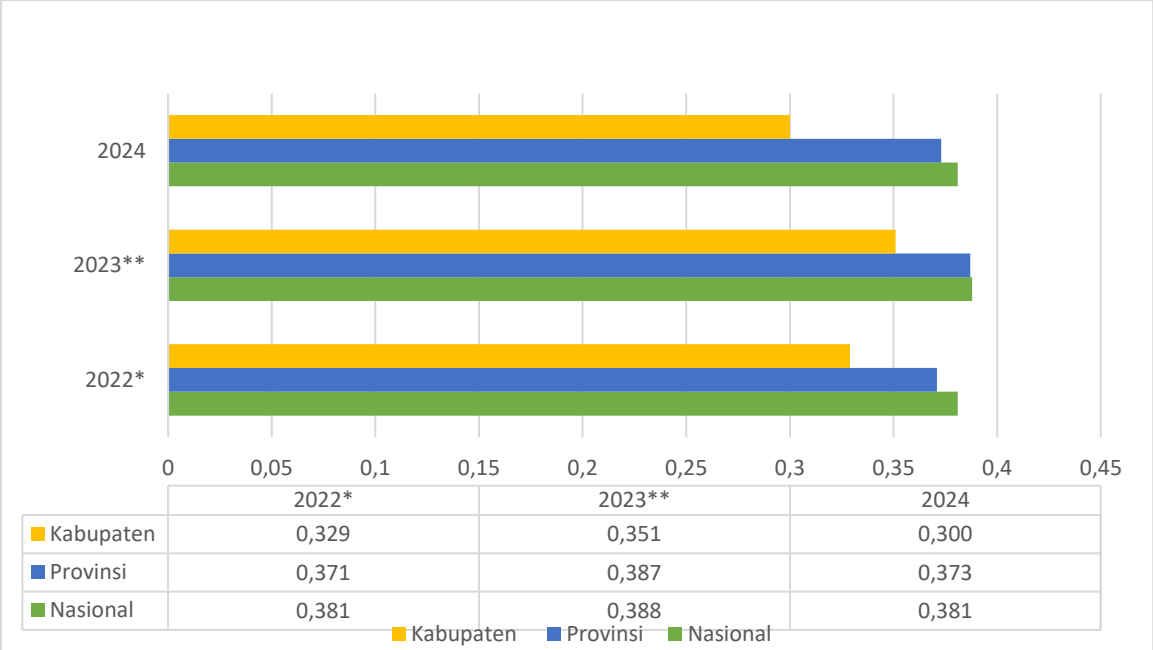
penduduk Kabupaten Kediri adalah 1.046 jiwa/km^2 pada tahun 2023. Ditinjau dari kepadatan penduduk per kecamatan, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ngasem sebesar 3.402,19 jiwa/km² diikuti dengan Kecamatan Pare sebesar 2.324,19 jiwa/km², sedangkan jumlah kepadatan penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Ngancar dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 516,64 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan sebagaimana table 2.2 berikut :

TABEL 2.2
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN
DI KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 2024

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (org/km²)	*Sex Ratio*
Semen	27.797	27.111	54.908	3,26	682,77	102,53
Mojo	41.918	40.463	82.381	4,87	801,92	103,60
Kras	32.559	32.322	64.881	3,84	1.447,91	100,73
Ngadiluwih	40.839	40.712	81.155	4,85	1.948,65	100,31
Kandat	32.180	31.754	63.934	3,79	1.230,45	101,34
Wates	46.683	46.202	92.885	5,52	1.212,91	101,04
Ngancar	26.710	26.109	52.819	3,12	516,61	102,30
Puncu	33.916	32.719	66.635	3,93	976,34	103,66
Plosoklaten	39.000	38.164	77.164	4,56	971,02	102,19
Gurah	42.779	42.186	84.965	5,02	1.671,55	101,41
Pagu	20.814	20.503	41.317	2,45	1.674,79	101,52
Gampengrejo	17.252	16.843	34.095	2.03	1.714,18	102,43
Grogol	25.117	24.317	49.434	2,93	1.432,87	103,29
Papar	27.680	27.371	55.051	3,28	1.519,91	101,13
Purwoasri	31.081	30.930	62.011	3,69	1.459,08	100,49
Plemahan	31.889	31.348	63.237	3,77	1.320,74	101,73
Pare	55.142	54.583	109.725	6,50	2.324,19	101,02
Kepung	44.945	43.221	88.166	5,24	834,51	103,99
Kandangan	26.771	26.366	53.137	3,17	1.275,19	101,54
Tarokan	33.330	32.168	65.498	3,91	1.387,67	103,61
Kunjang	19.377	19.187	38.564	2,29	1.286,32	100,99
Banyakan	30.336	29.744	60.080	3,58	828,12	101,99
Ringinrejo	30.071	29.283	59.354	3,51	1.400,52	102,69
Kayen kidul	24.603	24.490	49.093	2,92	1.372,46	100,46
Ngasem	31.743	31.878	63.621	3,81	3.402,19	99,58
Badas	35.426	34.522	69.948	4,15	1.783,93	102,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2024

GRAFIK 2.1 RASIO GINI NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN KABUPATEN KEDIRI



	2022*	2023**	2024
Kabupaten	0,329	0,351	0,300
Provinsi	0,371	0,387	0,373
Nasional	0,381	0,388	0,381

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri yang secara spesifik terdiri dari beberapa fokus yaitu :

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
b. Fokus kesejahteraan sosial; dan
c. Fokus seni budaya dan olahraga.

Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

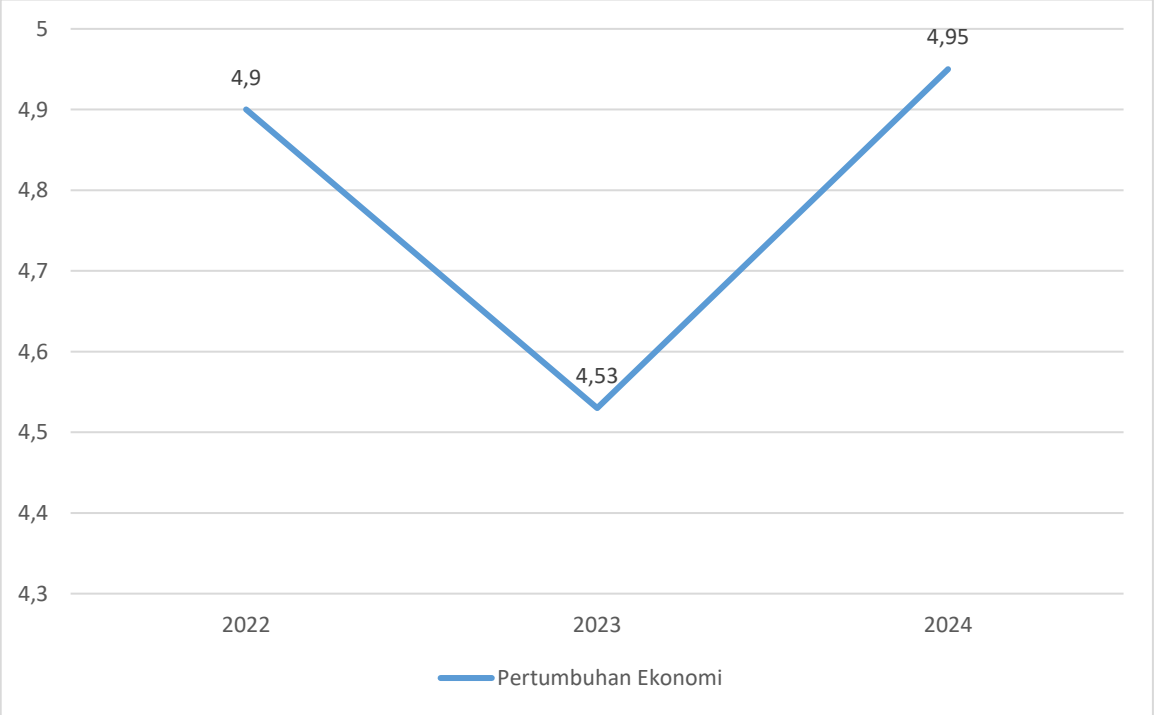
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan di wilayah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat direpresentasikan dengan kinerja Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Kinerja PDRB Kabupaten Kediri tahun 2021-2023 sebagaimana grafik 2.2 berikut :

GRAFIK 2.2
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 - 2024

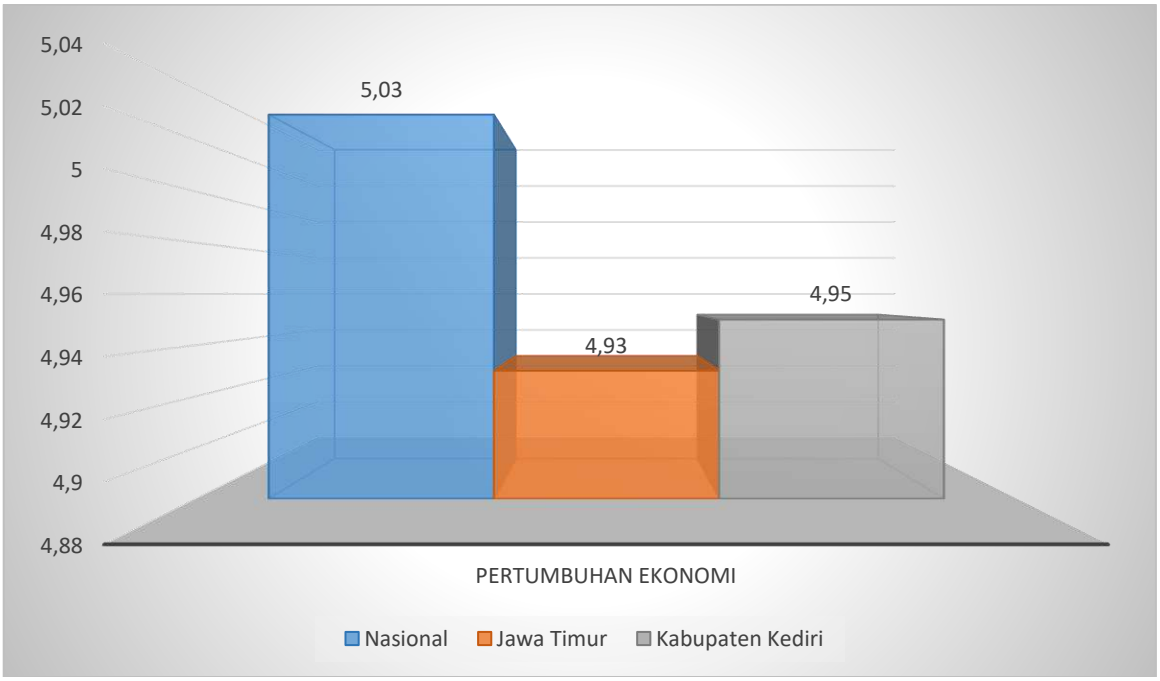


Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari grafik diatas terlihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Kediri cenderung meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri baik atas dasar harga berlaku atau konstan konsisten selalu meningkat disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan mulai bergeraknya roda perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor-sektor strategis. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh tiga sektor utama yang menyumbangkan kontribusi terbesar pada PDRB yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 sebesar 5,03%, Provinsi Jawa Timur sebesar 4,93%, dan Kabupaten Kediri sebesar 4,95%. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Kediri pada tahun 2022-2024 sebagaimana grafik 2.3 berikut :

GRAFIK 2.3
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONALTAHUN 2022 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh kontribusi 17 (tujuh belas) sektor usaha. Masing-masing sektor tersebut memberikan kontribusi yang berlainan besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri berdasarkan sektor usaha pada periode tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

(Persen)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	3,03	-1,73
B	Pertambangan & Penggalian	1,62	5,60	5,92
C	Industri Pengolahan	6,48	3,86	7,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,56	4,84	4,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,93	3,69	7,02
F	Konstruksi	6,80	7,15	7,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,07	5,42	4,94
H	Transportasi dan Pergudangan	14,81	9,96	13,17

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,40	9,79	9,70
J	Informasi dan Komunikasi	7,46	5,60	5,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,18	2,49	4,24
L	*Real Estate*	3,62	2,70	2,13
M,N	Jasa Perusahaan	4,10	6,93	5,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,95	-0,51	7,52
P	Jasa Pendidikan	2,38	2,30	7,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,79	2,09	5,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	14,30	9,22	6,08
Pertumbuhan Ekonomi		**4,90**	**4,53**	**4,95**

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2025
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel di atas tampak bahwa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2024 adalah Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 13,17%. Pertumbuhan terbesar kedua terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,70%. Pertumbuhan pada kedua sektor ini menjadi capaian terbesar dalam kurun tiga tahun terakhir. Tumbuhnya sektor-sektor industri kreatif dan perdagangan digital (*e-commerce)* turut memberikan *impact* pada bertumbuhnya kedua sektor tersebut.

Ditinjau dari distribusi PDRB, perekonomian Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir ditopang oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, (1) Industri pengolahan, (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan (3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gambaran distribusi PDRB Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel 2. 4 berikut :

TABEL 2.4
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 – 2024 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

(*Persen*)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	2023*	2024**
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	17,71	17,46	19,62
B	Pertambangan & Penggalian	12,18	12,2	1,31
C	**Industri Pengolahan**	19,18	19,06	21,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,29	8,5	9,56
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	18,48	18,64	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan	2,05	2,15	2,42

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,33	1,50
J	Informasi dan Komunikasi	7	7,07	7,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58	1,55	1,74
L	*Real Estate*	1,94	1,91	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,96	2,81	3,16
P	Jasa Pendidikan	4,53	4,43	4,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,8	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,63	1,71	1,92
Jumlah		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2025
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel di atas tampak bahwa meskipun kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kediri menurun, namun sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan dalam menunjang perolehan PDRB Kabupaten Kediri dengan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Kediri tahun 2024. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Kediri namun dalam sektor pertanian ini mengalami penurunan persentase kontribusinya, sehingga diperlukan inovasi-inovasi dalam bidang pertanian serta kebijakan strategis yang diterapkan seperti program *smart farming, urban farming, corporate farming*, petani milenial dan pengembangan pertanian organik.

b. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Kediri. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kediri selama tahun 2022 - 2024 seperti terlihat pada grafik 2.4 berikut :

GRAFIK 2.4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
(*Juta Rupiah*)



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

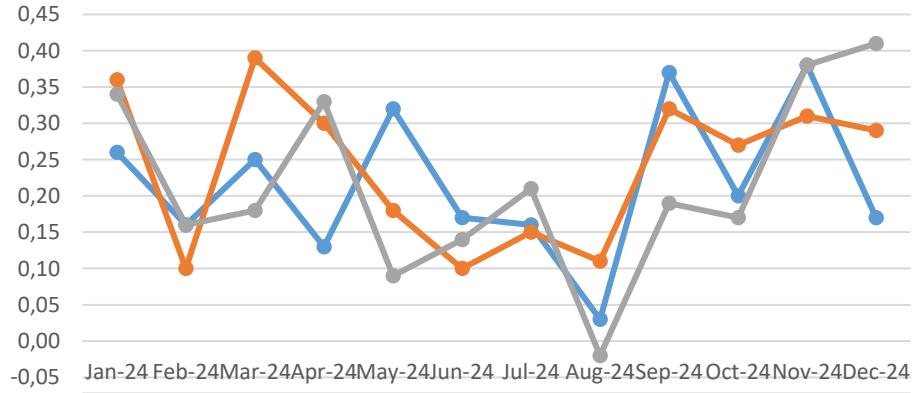
Sebagaimana Grafik 2.4, pendapatan per kapita Kabupaten Kediri pada Tahun 2023 tumbuh sebesar 7,17% dari 28,17 juta Rupiah menjadi sebesar 30,19 juta Rupiah dan pada Tahun 2024 tumbuh sebesar 7,12% dari 30,19 juta Rupiah menjadi 32,34 juta Rupiah. Kondisi ini menunjukan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Kediri semakin meningkat dengan memanfaatkan teknologi dan pengembangan wilayah berbasis potensi local yang turut berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan tersebut.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang ada di masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, ketidaklancaran distribusi barang, dan banyak faktor lainnya. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Oleh karena data yang digunakan inflasi yang ada di wilayah Kota Kediri belum bisa menggambarkan data inflasi yang digunakan sebagai rujukan inflasi Kabupaten Kediri. Perkembangan inflasi Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional sepanjang tahun 2024 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.5
LAJU INFLASI KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
PER BULAN TAHUN 2024

(persen)



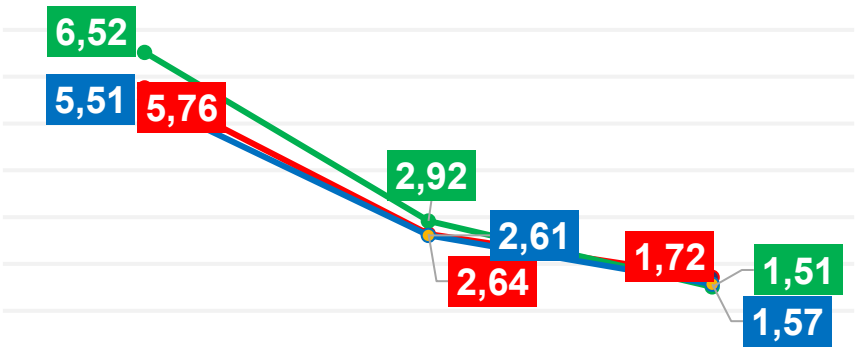
	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Kota Kediri	0,26	0,16	0,25	0,13	0,32	0,17	0,16	0,03	0,37	0,20	0,38	0,17
Provinsi Jawa Timur	0,36	0,1	0,39	0,3	0,18	0,1	0,15	0,11	0,32	0,27	0,31	0,29
Nasional	0,34	0,16	0,18	0,33	0,09	0,14	0,21	-0,02	0,19	0,17	0,38	0,41

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2023

Perkembangan tingkat inflasi (y-o-y) Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional pada periode Tahun 2021 - 2023 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.6
LAJU INFLASI KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
TAHUN 2022 – 2024

(persen)



	2022	2023*	2024**
Kediri	5,76	2,64	1,72
Jatim	6,52	2,92	1,51
Nasional	5,51	2,61	1,57

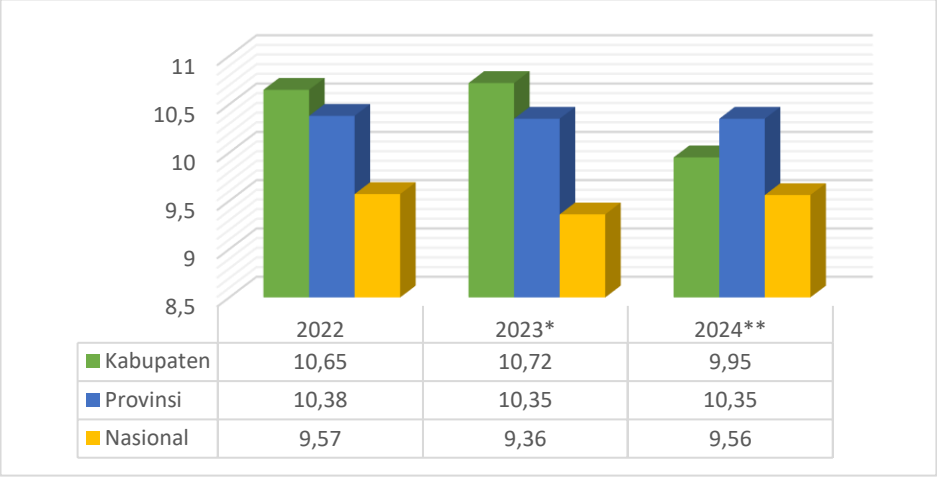
Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

d. Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah terus berupaya dalam percepatan penurunan kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri bisa menurun. Berbagai macam program dan kegiatan dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kediri baik kemiskinan struktural, situasional, maupun absolut diantaranya pemberian bantuan baik berupa tunai maupun non tunai, keterjangkauan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut diharap dapat menekan angka kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 10,65%. Pada tahun 2023 persentase angka kemiskinan sebesar 10,72%, naik sebesar 0,07% dibanding tahun 2022. Namun demikian kemiskinan di Kabupaten Kediri pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari 10,72% pada tahun 2023 menjadi 9,95% pada tahun 2024 sebagaimana grafik 2.7 dan grafik 2.8 berikut :

GRAFIK 2.7
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 – 2024



	2022	2023*	2024**
Kabupaten	10,65	10,72	9,95
Provinsi	10,38	10,35	10,35
Nasional	9,57	9,36	9,56

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

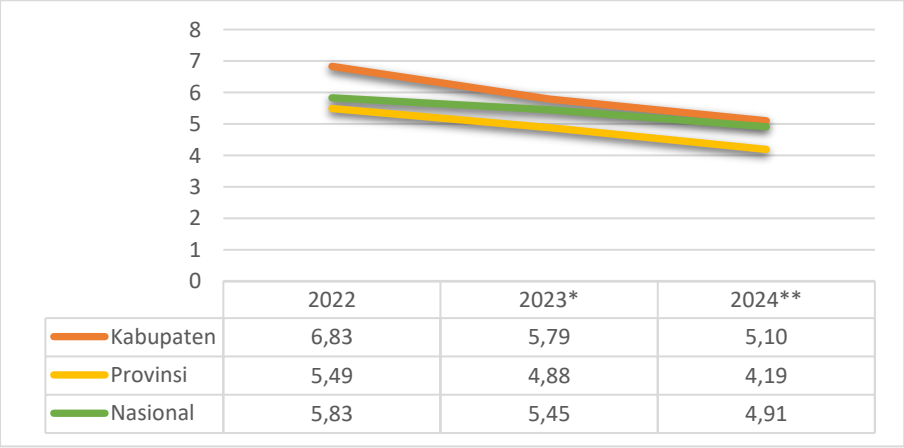
Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kediri diperparah oleh beberapa faktor kritis. Pertama, data kemiskinan yang tidak valid menyebabkan ketidakcocokan antara jumlah penduduk miskin yang sebenarnya dengan angka resmi, sehingga menghambat penyaluran bantuan yang efektif. Kedua, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin masih belum maksimal, seringkali tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, bantuan yang diberikan sering kali tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan yang memadai. Selain itu, minimnya minat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat miskin mengakibatkan

rendahnya tingkat pendidikan, yang selanjutnya mempersempit peluang kerja dan peningkatan kualitas hidup. Terakhir, banyak keluarga miskin tinggal di tempat tinggal yang tidak memadai, dengan kondisi fisik yang buruk dan minimnya akses terhadap fasilitas dasar, seperti air bersih dan sanitasi. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk validasi data kemiskinan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta perbaikan kondisi tempat tinggal.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka atau yang selanjutnya disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri, capaian TPT di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 6,83% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,79% dan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 5,10%. Maka perlu usaha untuk menurunkan angka TPT dengan program-program antara lain padat karya, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan industri, *link and match* pendidikan vokasi serta penyelenggaraan bursa kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat sebagaimana grafik 2.9 berikut :

GRAFIK 2.8
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
NASIONAL, PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022-2024



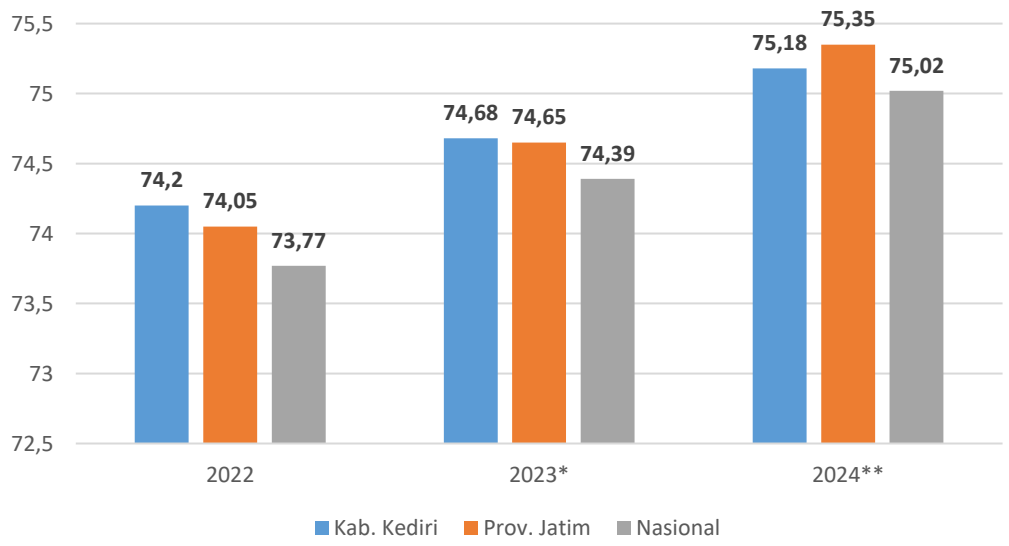
	2022	2023*	2024**
Kabupaten	6,83	5,79	5,10
Provinsi	5,49	4,88	4,19
Nasional	5,83	5,45	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) pada suatu wilayah. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional selama tahun 2022 - 2024 sebagaimana grafik 2.10 berikut :

GRAFIK 2.9
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL TAHUN 2022 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

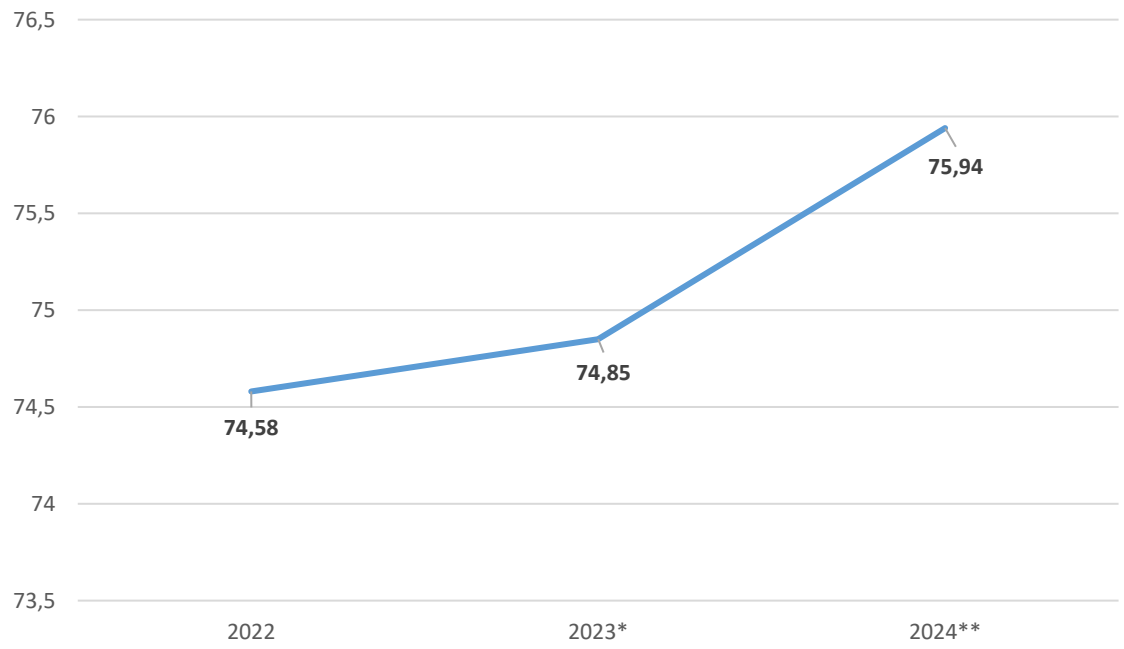
Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Kediri mencapai 74,2, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 74,68. Kemudian pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Kediri kembali meningkat menjadi 75,18. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk terus mengembangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri baik di bidang Pendidikan, Kesehatan,

maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam perhitungan IPM menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar sebagai berikut :

a. Dimensi Umur Panjang dan Sehat

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimensi ini ditunjukkan dengan indikator Umur Harapan Hidup, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2022 - 2024 dapat dilihat pada grafik 2.11 berikut :

GRAFIK 2.10
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

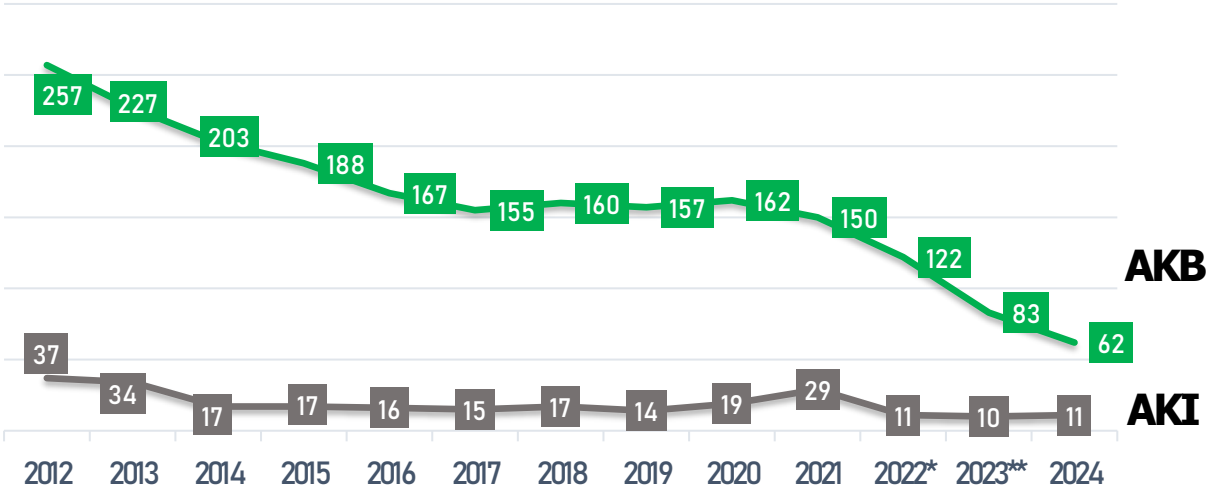
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kediri pada periode tahun 2022 – 2024 mengalami tren kenaikan dari tahun 2023 sebesar 74,85 menjadi sebesar 75,94 pada tahun 2023 yang mencerminkan hasil nyata dari pembangunan khususnya di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, terutama ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses masyarakat/penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar baik melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu (AKI) masih di angka 10/22.000 kelahiran hidup. Jumlah angka ini turun dari tahun sebelumnya yang tercatat 11/22.000 kelahiran

hidup, yang berarti pada tahun 2023 ada sebanyak 10 dari 22.000 kelahiran hidup ada ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan dengan melaksanakan *monitoring* pelayanan, poli sore di puskesmas dan rumah sakit serta persalinan di seluruh puskesmas.

Indikator berikutnya adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun tahun 2022 tercatat AKB sebesar 122/22.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan AKB sebesar 83/22.000 kelahiran hidup. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian, optimalisasi puskesmas pembantu, polindes, posyandu, pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil. Perkembangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2012 - 2024 dapat dilihat pada grafik 2.12 berikut :

GRAFIK 2.11
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

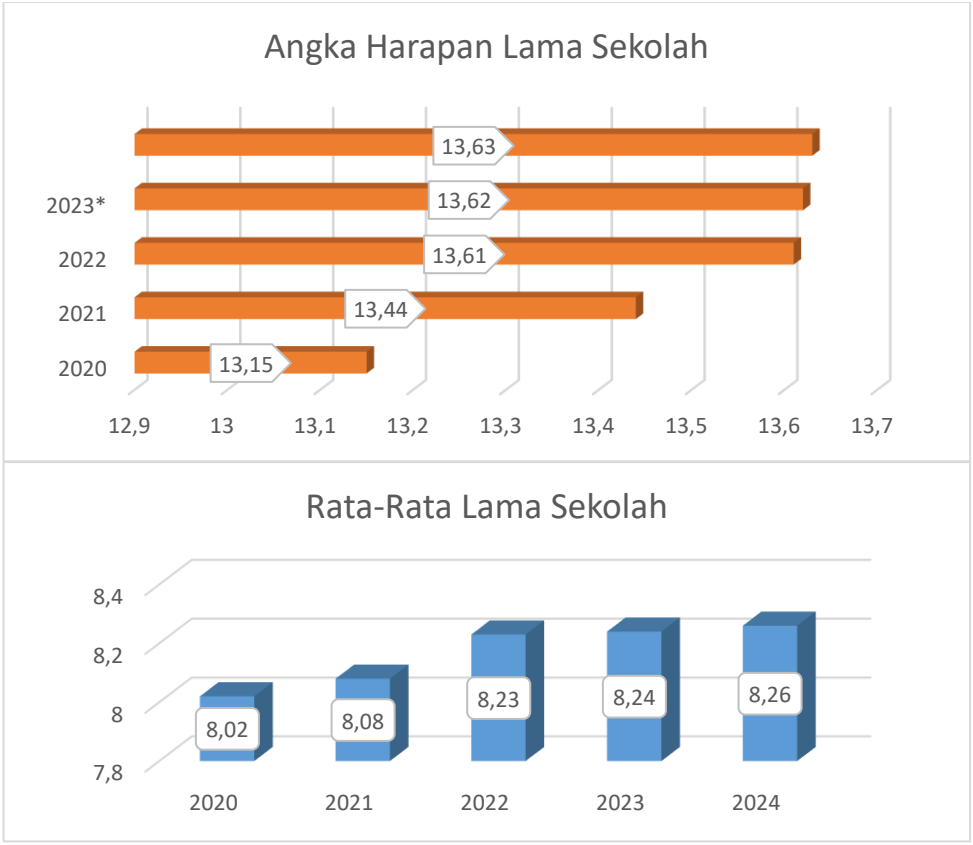
b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Selanjutnya rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Adapun perkembangan kedua indikator dimensi pengetahuan di Kabupaten Kediri selama tahun 2020 – 2024, terlihat sebagaimana grafik 2.13 berikut ini :

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020– 2024



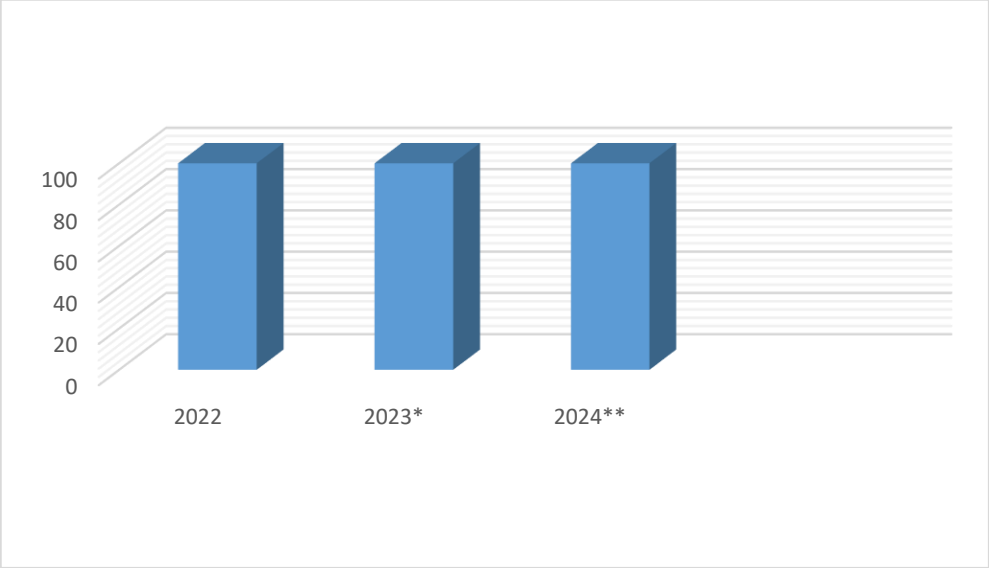
Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir kedua indikator dimensi pengetahuan, yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program keterjangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Kediri.

Sedangkan Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Diasumsikan dengan kebijakan bahwa program pendidikan dasar adalah 12 tahun yaitu 6 tahun menamatkan SD/MI dan 3 tahun

menamatkan SMP/MTs maka usia wajib pendidikan dasar adalah sampai dengan 15 tahun. Oleh karena itu, Angka Melek Huruf dihitung terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk Angka Melek Huruf di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah 100% atau naik 0,10% dari tahun 2021 yang artinya 100% penduduk di Kabupaten Kediri yang berusia >15 tahun bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya sebagaimana grafik 2.14 berikut :

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN (ANGKA MELEK HURUF)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022– 2024



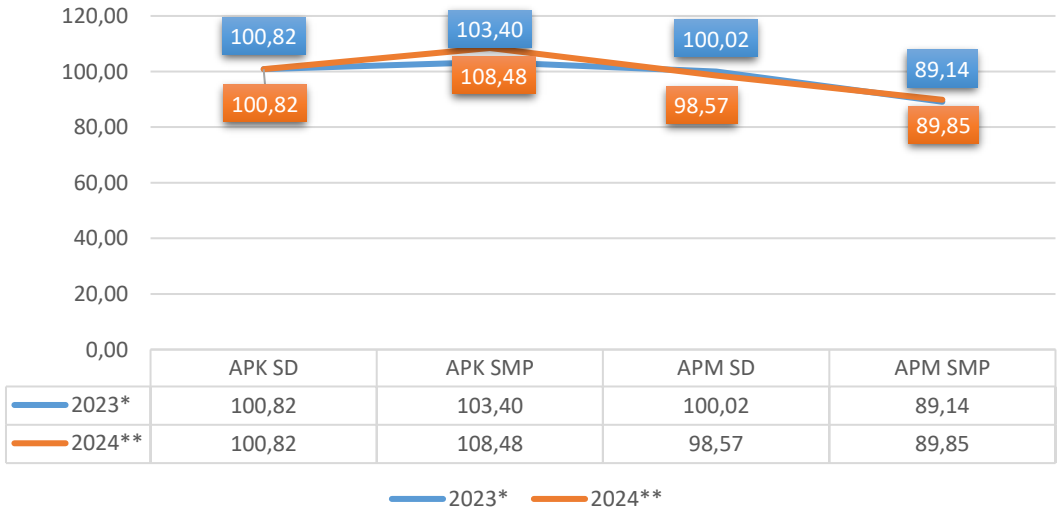
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dijelaskan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersekolah. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Kejar Paket A, B, dan C) juga turut diperhitungkan dalam perhitungan APM ini. Perkembangan APM dihitung untuk kelompok usia SD/MI dan SMP/MTs. Selain itu turut dihitung rasio antara APM perempuan terhadap laki-laki baik untuk kelompok usia SD/MI dan SMP/MTs. Indikator APM Tingkat SD/MI pada tahun 2022 sebesar 100,02 dan menurun jadi sebesar 98,57 pada tahun 2023. Untuk Tingkat SMP/MTs terjadi peningkatan nilai APM pada tahun 2022 sebesar 89,14 menjadi sebesar 89,85 pada tahun 2023.

Indikator dimensi pengetahuan yang terakhir adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Kejar Paket

A, B, dan C) juga turut diperhitungkan. Capaian APK untuk tingkat Pendidikan SD/MI pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100,82, sedangkan capaian APK SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 103,40 dan naik menjadi sebesar 108,48 pada 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi sekolah semakin meningkat tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya sebagaimana grafik 2.15:

GRAFIK 2.14
ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 – 2024

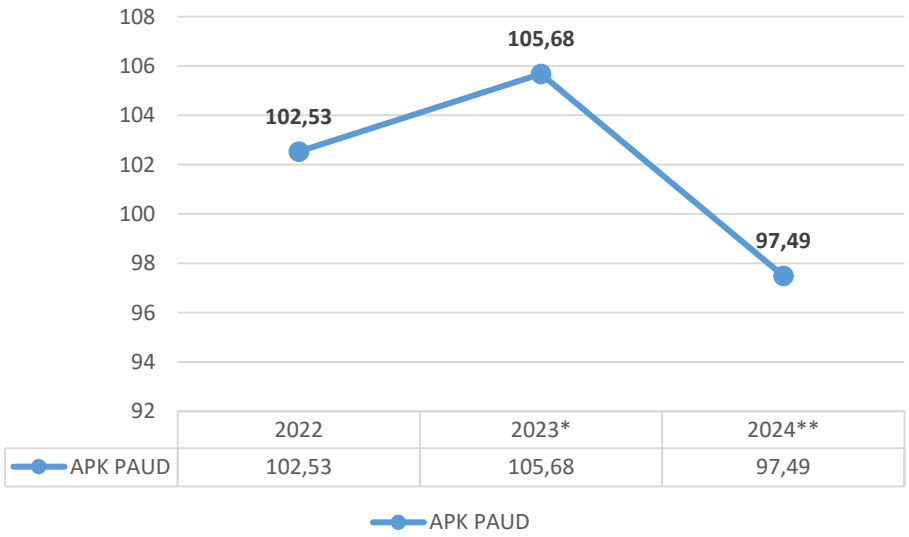


	APK SD	APK SMP	APM SD	APM SMP
2023*	100,82	103,40	100,02	89,14
2024**	100,82	108,48	98,57	89,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2023
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Pada tahun APK PAUD 2024 sebesar 97,49 sebagaimana grafik 2.16 berikut :

GRAFIK 2.15
ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024

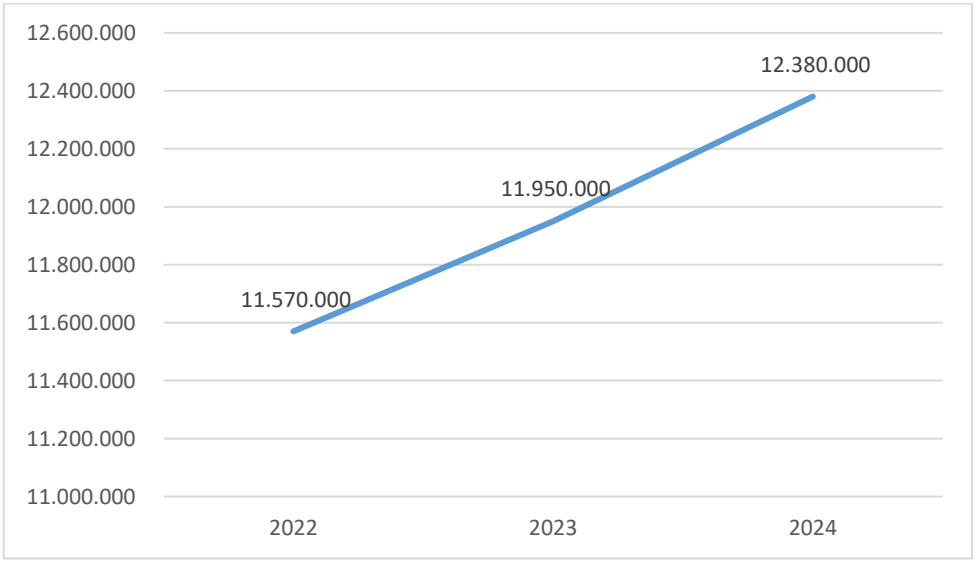


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ini diukur dengan rata – rata pengeluaran (daya beli) per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran (daya beli) per kapita setahun diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Adapun perkembangan pengeluaran (daya beli) Kabupaten Kediri tahun 2022 – 2024 sebagaimana grafik 2.17 berikut :

GRAFIK 2.16
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024
(ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Dari grafik di atas terjadi kenaikan pengeluaran per kapita Kabupaten Kediri pada tahun 2023 menjadi Rp11.950.000,00 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp11.570.000,00. Hal ini tidak terlepas dari mulai pulihnya perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri yang di tunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri setiap tahunnya berhubungan dengan upaya pengembangan pariwisata agar para pelaku seni budaya memperoleh manfaat secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya itu sendiri. Berikut disajikan perkembangan kelompok kesenian Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A.	**KELOMPOK SENI TRADISIONAL:**	**650**	**697**	**625**
1.	Jaranan	507	562	492
2.	Tiban	4	5	4
3.	Reog	7	7	7
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	1	0
5.	Wayang Orang	0	1	0
6.	Wayang Krucil	2	2	3
7.	Wayang Suluh	18	18	18
8.	Wayang Kulit/Dalang	0	0	0
9.	Karawitan	26	29	18
10.	Waranggono	18	18	18
11.	Ludruk	3	4	3
12.	Kentrung	0	0	0
13.	Jemblung	3	4	4
14.	Macapat	8	8	8
15.	Kethoprak	6	6	6
16.	Pramugari	3	3	4

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
17.	Tayub	0	0	0
18.	Pencak silat	10	10	10
19.	Gala Ganjur	1	1	1
20.	Batengan	33	36	29
B.	**SANGGAR SENI :**	**46**	**48**	**48**
1.	Sanggar Tari	44	48	47
2.	Sanggar Lukis	2	1	1
3.	Teater	0	0	0
C.	**KELOMPOK SENI MUSIK :**	**829**	**898**	**1.038**
1.	Orkes Melayu	340	380	333
2.	Campursari	69	85	79
3.	Band	6	6	5
4.	Qosidah	5	5	5
5.	Hadrah (sholawat , rebana , banjari , terbangan , jedor)	298	304	504
6.	Keroncong	7	7	4
7.	Electone	101	104	102
8.	Drumband	3	3	6
9.	Musik Patrol	2	2	0
10.	Angklung	1	1	0
D.	**KELOMPOK PELAWAK**	**2**	**2**	**0**
1.	Lawak	2	2	**0**
E.	**KELOMPOK MC**	**4**	**4**	**4**
1.	Pranotocoro	4	4	4
D.	**KELOMPOK FASHION**	**1**	**1**	**1**
1.	Fashion Carnival	1	1	1
Jumlah		**1.532**	**1.650**	**1.718**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sedangkan dalam penyelenggaraan urusan olahraga dapat digambarkan pada jumlah fasilitas pendukung olahraga yang tersedia sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.6
JUMLAH FASILITAS PENDUKUNG OLAHRAGA TAHUN 2022 - 2024

No.	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
1.	Jumlah Klub Olah Raga	494	494	494
2.	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3.	Jumlah Sekolah Olahraga (Unit)	494	494	494

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu fokus urusan wajib layanan dasar, wajib bukan layanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Dalam peraturan ini, ditetapkan target capaian dan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan implementasi SPM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Kabupaten Kediri menghadapi beberapa permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satunya adalah anggaran yang terbatas. Keterbatasan dana ini menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan anggaran yang tidak mencukupi, banyak program dan proyek penting yang terpaksa ditunda, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati layanan yang optimal. Selain itu, masalah lain yang krusial adalah kurangnya data yang memadai. Data yang akurat dan lengkap sangat diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SPM. Namun, seringkali data yang tersedia tidak lengkap, yang mengakibatkan perencanaan yang kurang tepat sasaran dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Mengatasi kedua masalah ini memerlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan memperbaiki sistem pengumpulan serta pengelolaan data agar kebijakan dan program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

2.1.3.1 Urusan Wajib Layanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan urusan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal dengan sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan. Capaian indikator kinerja urusan pendidikan adalah sebagaimana tabel 2.7 berikut :

TABEL 2.7
INDIKATOR KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2022-2024

NO.	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah :**			
	a. Target	8,10	8,15	8,25
	b. Realisasi	8,23	8,24	8,26
	c. Capaian (b:a)	101,60	101,10	100,12
2.	**Angka Partisipasi Kasar/APK :**			
	1) PAUD (KB, TK, PPT, TPA) / Kelompok Usia 3-6 Tahun :			
	a. Target	128,50	128,75	129,00
	b. Realisasi	105,68	105,68	97,49
	c. Capaian (b:a)	82,24	82,08	75,57
	2) SD/MI			
	a. Target	106,55	106,60	106,65
	b. Realisasi	100,82	100,82	99,78
	c. Capaian (b:a)	94,62	94,58	93,56
	3) SMP/MTs			
	a. Target	102,75	102,80	102,85
	b. Realisasi	103,40	108,48	109,02
	c. Capaian (b:a)	100,63	105,53	106,00
3.	**Angka Partisipasi Murni/APM :**			
	1) SD/MI / Kelompok Usia 7-12 Tahun :			
	a. Target	99,80	99,85	99,90
	b. Realisasi	99,82	98,57	98,66
	c. Capaian (b:a)	100,02	98,72	98,76
	2) SMP/MTs / Kelompok Usia 13-15 Tahun :			
	a. Target	89,00	89,50	90,00
	b. Realisasi	89,14	89,85	99,23
	c. Capaian (b:a)	100,16	100,39	110,26
4.	**Angka Kelulusan (AL) :**			
	1) SD/MI			
	a. Target	99,80	99,85	99,90
	b. Realisasi	99,32	99,70	99,89
	c. Capaian (b:a)	99,37	99,85	99,99
	2) SMP/MTs			
	a. Target	99,95	99,96	99,97
	b. Realisasi	98,40	97,98	99,68
	c. Capaian (b:a)	98,45	98,02	99,71
5.	**Angka Harapan Lama Sekolah :**			
	a. Target	13,25	13,35	13,40
	b. Realisasi	13,61	13,62	13,63
	c. Capaian (b:a)	102,72	102,02	101,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Tahun 2023
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Kinerja urusan pendidikan secara umum menunjukkan tren positif. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2024

angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kediri mencapai 8,25 tahun dari target 8,26 tahun atau capaian sebesar 100,12%.

Dari indikator ini APK pada jenjang Pendidikan Dasar masih di kisaran 100%. Hal ini berarti akses pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sangat efektif, dan mendapat animo dari masyarakat, serta munculnya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi pada pendidikan dasar. Pada tahun 2024 realisasinya sebesar 99,78% dari target 106,65% dengan capaian 93,56%. Angka ini juga memberikan gambaran bahwa ada beberapa gejala yang melatarbelakangi, yaitu :

a. Adanya siswa yang belum mencapai usia kurang dari 7 tahun, tetapi sudah memasuki jenjang pendidikan SD/MI;
b. Adanya siswa yang melebihi usia 12 tahun, tetapi masih menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SD/MI;
c. Adanya penduduk luar daerah Kabupaten Kediri yang kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun, namun masih menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SD/MI di wilayah Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2024 APK SMP/MTs dapat terealisasi sebesar 109,02% (capaian 106%) dari target sebesar 102,85%. Hal ini disebabkan adanya siswa SMP/MTs dari luar daerah Kabupaten Kediri yang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Kediri. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kediri sejak tahun 2013 telah mencapai ”Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun”. Suatu daerah dikatakan telah mencapai ”Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun” apabila daerah tersebut telah mencapai APK SMP/MTs hingga minimal 100%. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2024, yaitu:

a. Jenjang SD/MI target sebesar 99,90% realisasi sebesar 98,66% dengan capaian kinerja 98,76%;
b. Jenjang SMP/MTs target sebesar 90,00% realisasi sebesar 99,23% dengan capaian kinerja 110,26%.

Capaian APM tersebut memberikan gambaran kemerataan akses layanan pendidikan, juga memberikan gambaran akan kualitas layanan pendidikan terkait dengan usia peserta didik. Artinya bahwa secara ideal siswa SD/MI adalah penduduk yang berusia 7-12 tahun, untuk jenjang SMP/MTs, secara ideal siswa SMP/MTs adalah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan di PKL (Pusat Kegiatan Lokal) untuk menambah daya tampung SMP.

Angka Lulusan pada tahun 2024 pada jenjang pendidikan SD/MI target sebesar 99,90% realisasi sebesar 99,89% dengan capaian kinerja 99,99%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, target sebesar 99,97% realisasi sebesar 99,68% dengan capaian kinerja 99,71%. Untuk Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ditargetkan 13,40 tahun

dan terealisasi 13,63 tahun atau 101,72%, hasil ini sedikit menurun daripada tahun 2023 yaitu 102,02%. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS);
2. Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS);
3. Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS);
4. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional;
5. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional;
6. Rata-rata kompetensi LiterasiSMP berdasarkan Asesmen Nasional;
7. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional;
8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B;
9. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV;
10. Iklim keamanan SD;
11. Iklim keamanan SMP;
12. Iklim kebinekaan SD;
13. Iklim kebinekaan SMP;
14. Iklim inklusivitas SD;
15. Iklim inklusivitas SMP.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan lintas sektor, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembangunan urusan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Capaian indikator kinerja urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.8
INDIKATOR KINERJA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2022 – 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Angka Usia Harapan Hidup**			
	a. Target	72,61	72,68	72,74
	b. Realisasi	74,58	74,85	75,07
	c. Capaian (b:a)	102,71	102,98	103,2
2.	**Angka Kematian Ibu (%)**	11	10	11
3.	**Angka Kematian Bayi (%)**	122	83	61
4.	**Hasil Nilai IKM**			
	a. Target	85,00	85,00	85,00

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
	b. Realisasi	82,23	85,55	83,91
	c. Capaian (b:a)	96,74	100,65	98,72
5.	**Indeks Keluarga Sehat**	0,20	0,25	0,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja sasaran Angka Usia Harapan Hidup tahun 2024 yaitu sebesar 75,07 dengan capaian 103,20%. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Angka Usia Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Usia Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2024 Angka Kematian Ibu (AKI) masih di angka 11/19.230 kelahiran hidup. Jumlah angka ini naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 10/19.230 kelahiran hidup, yang berarti pada tahun 2024 ada sebanyak 11 dari 19.230 kelahiran hidup ada ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan dengan melaksanakan monitoring pelayanan.

Indikator berikutnya adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2024 tercatat AKB sebesar 61/19.230 kelahiran hidup, atau sebanyak 61 bayi yang meninggal, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2023 yang masih berkisar di angka 83/19.230 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebanyak 83 bayi. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian. Pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil.

Perhitungan indeks keluarga sehat diambil dari 12 (dua belas) indikator sebagai berikut : (1) keluarga mengikuti program KB; (2) persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat ASI eksklusif; (5) pertumbuhan balita dipantau; (6) penderita TB paru berobat sesuai standar; (7) penderita hipertensi berobat teratur; (8) penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi anggota JKN; (11) keluarga mempunyai saran air bersih; dan (12) keluarga menggunakan jamban sehat.

Capaian indikator urusan kesehatan sesuai Standart Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya meliputi : (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, (4) pelayanan kesehatan balita, (5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan, (6) pelayanan kesehatan pada usia produktif,

(7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, (9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, (10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, (11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan (12) pelayanan kesehatan orang dengan risikon terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Program Penyelenggaraan Jalan;
c. Program Penyelenggaran Penataan Ruang; dan
d. Pembangunan Stadion

Pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Capaian kinerja penyediaan sarana infrastruktur daerah yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 adalah sebagaimana tabel 2.9 berikut :

TABEL 2.9
CAPAIAN SARANA INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2022 – 2024

(persen)

No.	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	% Pemenuhan kebutuhan jalan	100,00	100,00	100,00
2.	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	87,99	79,09	87,00
3.	% Pemenuhan kebutuhan jembatan	100,00	100,00	100,00
4.	% Jembatan dalam kondisi baik	78,37	78,84	78,84
5.	% Jalan dalam kondisi mantap	97,41	97,10	87,48

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah baik jalan penghubung kabupaten, kecamatan dan pedesaan dapat dipenuhi. Persentase indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

pada tahun 2024 realisasi sebesar 87,00%. Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2024 realisasi sebesar 87,48% terjadi penurunan dikarenakan berbagai faktor. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah terus melakukan penanganan yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas konstruksi jalan, pengelolaan lalu lintas yang baik, perbaikan drainase, dan pemeliharaan serta perbaikan jalan.

Indikator jembatan dalam kondisi baik, persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik realisasi sebesar 78,84%. Adapun perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang ditujukan dengan status panjang jalan tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.10 berikut :

TABEL 2.10
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2022 – 2024

No	URAIAN		TAHUN		
		2021	2022	2023*	2024**
1.	**Status dan Panjang jalan (Km):**				
	a. Nasional	39,936	39,936	39,936	39,936
	b. Provinsi	79,616	79,616	79,616	79,616
	c. Kabupaten	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
2.	**Kondisi Jalan Kabupaten (Km) :**				
	a. Baik	1.085,01	1.077,20	968,18	1.065,05
	b. Sedang	108,95	115,26	220,50	5,93
	c. Rusak	30,24	31,74	35,52	153,22
	d. Makadam/Tanah	-	-	-	-
3.	**Panjang jalan kabupaten (Km):**				
	a. Jalan beraspal	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
	b. Jalan tidak beraspal	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Kondisi jalan kabupaten kondisi rusak mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 35,52 kilometer pada tahun 2024 menjadi 153,22 kilometer, hal ini karena pelaksanaan pembangunan, peningkatan/rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan terus menerus berdasarkan skala prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang ada, namun situasi dan kondisi cuaca yang dinamis, membuat bertambahnya kerusakan jalan tidak dapat diprediksi.

b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Penanggulangan Banjir

Pembangunan infrastruktur irigasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti kawasan hutan lindung, sempadan sungai, kawasan rawan bencana dan kawasan konservasi sehingga sistem penyangga kehidupan alam dan ekosistem terjaga dengan baik. Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus

mengalami peningkatan dari 74,68% menjadi 80,79% hal ini menunjukkan sebagai Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kediri yang terus dilakukan, untuk meningkatkan kinerja pelayanan irigasi dan penanggulangan banjir diukur menggunakan dua indikator sebagaimana tabel 2.11 berikut :

TABEL 2.11
KINERJA PELAYANAN IRIGASI DAN PENANGGULANGAN BANJIR
TAHUN 2022 – 2024

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Bangunan irigasi kondisi baik	74,19	74,19	74,19
2.	Panjang irigasi kondisi baik	74,68	69,17	80,79

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Untuk mendukung program ketahanan pangan yaitu peningkatan swasembada pangan dilakukan dengan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan perbaikan talud atau pengaman sungai serta pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air. Pekerjaan fisik perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi pada tahun 2024 direncanakan dapat meningkatkan pelayanan irigasi. Pencapaian indikator tersebut didukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota serta menghasilkan Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik sepanjang 9.775,34 meter dengan persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun 20234sebesar 80,79%.

Beberapa Embung yang merupakan salah satu sumber tersedianya air irigasi yang ada di Kabupaten Kediri yaitu embung Guworejo dan Embung Grogol di Kecamatan Tarokan, Embung Kucur-kucur di Desa Selopanggung, Embung Kalibago di Desa Kalipang, Embung Igir-igir di Desa Joho Kecamatan Semen, serta Waduk Siman di desa Siman Kecamatan Kepung.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) telah meningkatkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, sehingga jaringan irigasi berfungsi lebih maksimal. Pada gilirannya hal ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahannya secara aktif dan lebih produktif.

Jumlah sawah teknis tahun 2022 sampai tahun 2024 tetap pada luasan 25.619 hektar, hal ini disebabkan adanya perubahan beberapa status Daerah Irigasi (DI) pusat dan provinsi menjadi DI kabupaten sebagaimana tabel 2.12 berikut :

TABEL 2.12
PERKEMBANGAN BANGUNAN IRIGASI DAN AREAL SAWAH
TAHUN 2022 - 2024

No	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A.	**BANGUNAN IRIGASI (Unit):**			
1.	Bendung Tetap	284	284	284
2.	Bendung Gerak	21	21	21
3.	Bangunan Cekdam	54	54	54
4.	Bangunan Bagi	90	90	90
5.	Bangunan Bagi Sadap	112	112	112
6.	Bangunan Sadap	391	396	396
7.	Bangunan Ukur	821	821	821
8.	Bangunan Talang	57	54	54
9.	Bangunan Shypon	40	40	40
10.	Bangunan Terjun	80	80	80
11.	Gorong-gorong	449	449	449
12.	Lain-lain	178	178	179
JUMLAH		**2.577**	**2.592**	**2.592**
B	**AREAL SAWAH (Ha) :**			
1.	Sawah Teknis	**39.072**	**39.072**	**39.072**
	a. Pusat	9.095	9.095	9.095
	b. Provinsi	4.358	4.358	4.358
	c. Kabupaten	25.619	25.619	25.619
2.	Sawah Setengah Teknis	**2.517**	**2.517**	**2.517**
	a. Pusat	-	-	
	b. Provinsi	6	6	6
	c. Kabupaten	2.511	2.511	2.511
3.	Sawah Sederhana/belum teknis	**6.055**	**6.055**	**6.055**
	a. Pusat	-	-	
	b. Provinsi	199	199	199
	c. Kabupaten	5.856	5.856	5.856
JUMLAH		**47.644**	**47.644**	**47.644**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Adapun data panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kediri sebagaimana tabel 2.13 berikut :

TABEL 2.13
PANJANG SALURAN IRIGASI TAHUN 2022 – 2024

(meter)

No	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Saluran Primer/Induk :**	**788.900**		
	a. Pusat (Primer)	49.324		
	b. Provinsi (Primer)	10.596		
	c. Kabupaten (Kali)	728.980	728.989	728.989
2.	**Saluran Sekunder :**	**310.800**		
	a. Pusat	109.975		
	b. Provinsi	25.996		
	c. Kabupaten	174.829	174.829	174.829

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Penataan ruang merupakan acuan dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Acuan ini diperlukan untuk mengatur pemanfaatan ruang yang ada dengan mengutamakan keselarasan, keteraturan, kenyamanan, keamanan, serta produktivitas yang berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang :

1. Proses perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada prosesnya Kabupaten Kediri memiliki dokumen perencanaan tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
2. Proses pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya. Adapun realisasi Indikator Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100% tetap, tidak mengalami peningkatan dan penurunan yaitu 100% di tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan sudah sesuainya perencanaan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2022 dilakukan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, dan pada saat ini dilakukan penyusunan RDTR PKL Ngadiluwih dan PKL Pare serta selanjutnya akan disusun RDTR PKL Ngasem. Pada tahun 2023 proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare

dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih. Pada tahun 2025 proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem;

3. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam praktiknya, pengendalian dan pengawasan tata ruang yang dapat dilihat dari penilaian Sistem Infomasi Pengawasan Teknis (SIWASTEK). Berdasarkan kriteria penilaian yang dimuat dalam SIWASTEK, Pada Tahun 2022 Kabupaten Kediri mendapatkan penilaian rata-rata sebesar 79,33 (Sedang) berada pada peringkat ke 6 se Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelayanan tata ruang pada saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU).

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan kawasan permukiman yang diarahkan pada ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas, serta pemenuhan layanan akses air minum layak dan sanitasi layak . Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatnya masyarakat terhadap air bersih, jambanisasi, layanan Penerangan Jalan Umum (PJU), meningkatnya kepemilikan rumah layak huni, serta penurunan luasan kawasan kumuh. Program pembangunan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
d. Penataan Bangunan Gedung;
e. Kawasan Permukiman;
f. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan

Capaian kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2022 – 2024 untuk masing–masing indikator sebagaimana pada tabel 2.14 berikut :

TABEL 2.14
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 – 2024

(persen)

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	% Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak	85,23	86,00	86,08
2.	% KK yang memiliki rumah layak huni	97,14	98,06	98,47
3.	% PJU dalam kondisi baik	98,00	100	100
4.	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	85,75	166,42	182,06
5.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Unit)	1.407	1.125	1.301

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
6.	Kawasan Kumuh (Ha)	132,99	53,32	36,69
7.	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	11.754	9.826	7.794

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/146/418.08/2020 terdapat kawasan kumuh sebesar 218,74 Ha meliputi Kawasan Kampung Inggris, Pare, Gedangsewu, Pelem, Tertek dan Jongbiru pada tahun 2024 yang dapat ditangani seluas 182,406 Ha melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kawasan Kumuh) sehingga kawasan kumuh 36,69 Ha. Seiring dengan tumbuhnya permukiman baru di kawasan perkotaan yang cepat sehingga perlu dilakukan reviu dan kajian luasan kumuh baru. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2024 sebanyak 7.794 Unit menurun dibanding tahun 2023 sebanyak 9.826 Unit, penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 2.032 unit ditangani melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, persentase PJU dalam kondisi baik tahun 2024 sebesar 100% melalui pembangunan PJU baru terutama pada jalur-jalur strategis kabupaten dan Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak tahun 2024 adalah 86,08% melalui program pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan terutama pada daerah-daerah rawan air bersih.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan serta penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. Dalam mendukung pencapaian kinerja, menggunakan 2 (dua) indikator yaitu : rasio Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk dan persentase penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Capaian kinerja dalam penanganan pelanggaran perkembangan kinerja urusan ketentraman dan ketertiban tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15 Perkembangan Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023	2024
A	**Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku**			
1	**Rasio Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk**			
	a. Target	1:0,7	1311,24	1311,24

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023	2024
	b. Realisasi	1:0,27	1:0,08	1:0,08
	c. Capaian (b:a)	38,57	113,34	113,34
2	**% Penegakan Perda/Perbup**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berkembangnya kawasan perumahan di Kabupaten Kediri akan berimplikasi pada resiko terjadinya bencana kebakaran sehingga memunculkan sistem proteksi kebakaran dan pencegahan dini terhadap bencana kebakaran. Salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah melalui pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, perumahan dan lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi, menjaga dan mencegah terjadinya bencana kebakaran. Juga terjalinnya kerja sama yang aktif dengan Pemda sekitar dan pihak swasta. Adapun capaian indikator kualitas penanganan kebakaran selama tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16 Capaian Kualitas Penanganan KebakaranTahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	**% Kasus kebakaran yang direspon**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menjunjung tinggi semangat pemberdayaan (*empowerment*) yang bertujuan membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakmampuan, tak berketerampilan (*unskill*), keterbelakangan dan kemiskinan. Pada tataran operasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program pokok yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kediri tersebut telah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018, jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota adalah :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, adapun tupoksi urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Keberhasilan atas pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, dapat dilihat dari meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial sebagaimana tabel 2.17 berikut :

TABEL 2.17
CAPAIAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL
TAHUN 2022 - 2024

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023	2024
1.	% PMKS yang ditangani	57,35	96,60	87,34
2.	% PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Dana APBD Kab. Kediri	3,27	96,60	95,87
3.	% Jumlah PSKS yang diberdayakan	55,53	102	100
4.	% Penduduk Miskin	10,65	10,72	9,95

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Tahun 2024 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri adalah 315.137 orang, kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 318.358 orang. Seluruh PMKS di Kabupaten Kediri mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Sebagaimana kondisi PMKS, PSKS yang diberdayakan mencapai 100% atau seluruh PSKS di Kabupaten Kediri diberdayakan. Berikut perkembangan PMKS dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel 2.18 berikut :

TABEL 2.18
PERKEMBANGAN PMKS TAHUN 2022 – 2024

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A	PMKS :			
1.	Anak balita terlantar	18	4	3
2.	Anak terlantar	107	5	5
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	31	89	77
4.	Anak jalanan	95	16	17
5.	Anak dengan kedisabilitasan	1799	737	701
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	24	98	31
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	107	98	814
8.	Lanjut usia terlantar	1.692	1	7
9.	Penyandang disabilitas	5.249	6.730	7.289
10.	Tuna Susila	166		-
11.	Gelandangan	75	33	40
12.	Pengemis	96	3	20
13.	Pemulung	343	-	-
14.	Kelompok minoritas	13	-	-
15.	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	542	-	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS	32	-	-
17.	Korban penyalahgunaan Napza	85	179	34
18.	Korban traffiking	-	-	2
19.	Korban tindak kekerasan	23	-	31
20.	Pekerja Migran bermasalah sosial	13	-	3
21.	Korban bencana alam	91	14.627	1.045
22.	Korban bencana sosial	2	400	-
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	5.578	155	111
24.	Fakir miskin	124.107	295.152	304.907
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	266	31	-
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
	Jumlah (A)	**140.554**	**318.358**	**315.137**
B	Jumlah penduduk	**1.674.818**	**1.684.454**	**1.691.976**
C	% PMKS (A:B)	**8,39**	**18,90**	**18,62**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Upaya menekan jumlah PMKS terus dilakukan mengingat permasalahan sosial bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan melalui lintas sektor. Permasalahan pokok yang memerlukan penanganan komprehensif adalah membangkitkan motivasi para PMKS (akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial) dalam melepaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi, karena pada umumnya para PMKS menilai sudah tidak memiliki peluang (*hopeless*) untuk hidup berkelayakan.

Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sosial kepada PMKS dilakukan agar PMKS memiliki keberdayaan untuk mengentaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi. Penanganan PMKS dengan pemberian bantuan sosial pada tahun 2024 meliputi penyantunan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi dan penyantunan lansia/jompo. Sedangkan penanganan PMKS dengan pemberian pelatihan terdiri dari pelatihan ketrampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar (termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal), pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pengiriman anak calon tetirah, ketrampilan eks korban narkotika dan diklat bagi anak putus sekolah di Panti Sosial Remaja Terlantar (PSRT). Keberadaan/ketersediaan panti sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah mendukung proses percepatan pengentasan pada PMKS.

Selanjutnya data potensi dan sumber kesejahteraan sosial selama tiga tahun terakhir yang pendataannya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel 2.19 berikut :

TABEL 2.19
DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
TAHUN 2022 – 2024

No	JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Pekerja sosial professional	2	3	7
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	344	344	344
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40	40	38
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	64	63	66
5.	Karang Taruna	191	3.440	336
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	1	1
7.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-	-	-
8.	Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK)	26	26	26
JUMLAH		**821**	**3.917**	**818**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial mulai dari tingkat bawah yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

2.1.3.2 Wajib Bukan Layanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian, semakin tinggi kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh *output* yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting di tengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah.

Pada periode tahun 2022 hingga 2024, kabupaten kediri menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja serta ketersediaan kesempatan kerja. Indikator- indikator kunci, seperti penurunan angka penganguran dan peningkatan jumlah angkatan kerja yang terserap, menggambarkan keberhasilan beberapa program strategis di bidang ketenagakerjaan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal ditengah dinamika pasar tenaga kerja. Capaian sasaran strategis ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.20 Capaian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja Tahun 2022 - 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)**			
	a. Target	5	4,95	4,80
	b. Realisasi	6,83	5,79	5,10
	c. Capaian (a:b)	73,21	85,50	94,12
2.	**TPAK (% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)**			
	a. Target	71,90	71	71,10
	b. Realisasi	68,73	68,74	71,31
	c. Capaian (b:a)	96,80	96,81	100,30

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan tabel diatas Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan angka pengangguran yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi TPT sebesar 6,83% sedangkan pada tahun 2024 angka ini berhasil ditekan menjadi 5,10%. Tingkat capaian target juga mengalami peningkatan yang singnifikan, dari 73,21 pada tahun 2022 menjadi 94,12% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi pengangguran melalui pengembangan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, realisasi TPAK mencapai 68,73%, dengan capaian target sebesar 96,80%. Pada tahun 2023, realisasi sedikit meningkat menjadi 68,74%, dengan capaian target sebesar 96,81%. Pada tahun 2024, realisasi TPAK bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,10%, dengan capaian 71,31% atau 100,30% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja.

Secara keseluruhan, tren capaian yang terus meningkat menunjukkan efektivitas kebijakan dan program strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja. Upaya ini memberikan dasar yang kuat untuk pembangunan sektor tenaga kerja di masa mendatang. Adapun perkembangan data ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir terlihat pada tabel 2.21 di bawah ini :

TABEL 2.21 PERKEMBANGAN DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022 – 2024

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A.	**Data Ketenagakerjaan (orang):**			
1.	Lowongan Kerja	11.238	10.002	6.715
2.	Pencari Kerja Terdaftar	10.624	9.504	6.383
3.	Penempatan Tenaga Kerja	9.720	8.743	5.836
4.	Angkatan Kerja	865.206	910.447	952.912
5.	Angkatan Kerja Tertampung	806.121	857.724	904.344
6.	Penduduk Usia Kerja	1.258.779	1.324.474	1.336.346
7.	Pengangguran Terbuka	59.085	52.752	48.568
B.	**Upah Minimum Kerja Kab. Kediri (Rp/bulan)**	**2.118.116,63**	**2.243.423,00**	**2.340.668**
C.	**Pengangguran :**			
1.	Angka pengangguran (A7 : A4)	6,83	5,79	5,10
2.	% Penurunan angka pengangguran (angka tahun lalu – tahun ini x 100%)	1,68	1,04	0,69
D.	**Penempatan Tenaga Kerja :**			
1.	% Penempatan tenaga kerja (A3 : A2)	91,50	91,99	91,43
2.	Lowongan kerja tidak terisi (A1 – A3)	1.518	1.259	879
3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia :	3.155	1.064	1.607

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
	a. Laki-laki	812	455	489
	b. Perempuan	2.343	609	1.118

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan pada tabel diatas perkembangan data ketenagakerjaan tahun 2022–2024, Data ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun 2022 hingga 2024. Pada kategori Lowongan Kerja, terjadi penurunan signifikan dari 11.238 pada tahun 2022 menjadi 6.715 pada tahun 2024. Hal serupa juga terlihat pada Pencari Kerja Terdaftar yang menurun dari 10.624 di tahun 2022 menjadi 6.383 pada tahun 2024, menunjukkan penurunan angka pencari kerja yang signifikan. Penurunan juga terlihat pada Penempatan Tenaga Kerja, yaitu dari 9.720 di tahun 2022 menjadi 5.836 di tahun 2024.

Di sisi lain, Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 865.206 pada tahun 2022 menjadi 952.912 pada tahun 2024, dengan proporsi Angkatan Kerja Tertampung yang juga meningkat dari 806.121 menjadi 904.344 dalam periode yang sama. Meskipun demikian, tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan signifikan dari 59.085 di tahun 2022 menjadi 48.568 di tahun 2024.

Untuk Upah Minimum Kabupaten Kediri (UMK), terdapat peningkatan konsisten dari Rp2.118.116,63 di tahun 2022 menjadi Rp2.340.668 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian yang positif terhadap upah minimum di wilayah tersebut.

Dalam kaitannya dengan angka pengangguran, persentase pengangguran terhadap angkatan kerja mengalami penurunan dari 6,83% di tahun 2022 menjadi 5,10% di tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan keberhasilan program-program ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Sementara itu, tingkat Penempatan Tenaga Kerja stabil dengan angka di atas 90%, meskipun terjadi penurunan lowongan kerja yang tidak terisi dari 1.518 pada tahun 2022 menjadi 879 pada tahun 2024.

Pada aspek gender, jumlah tenaga kerja laki-laki yang ditempatkan cenderung lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja perempuan. Namun, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan penurunan jumlah penempatan dari tahun 2022 hingga 2024.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi pasar kerja di Kabupaten Kediri, meskipun terdapat tantangan dalam hal ketersediaan lowongan kerja. Penurunan angka pengangguran dan kenaikan upah minimum

menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan secara umum, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup serta kesadaran dan keadilan gender, serta terhapusnya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Faktor yang berpengaruh pada IPG adalah indeks pembangunan manusia perempuan yang meliputi :

- Kesehatan (angka harapan hidup);
- Pendidikan/melek huruf (angka harapan sekolah dan angkat rata-rata lama sekolah); dan
- Standar hidup dihitung dari Produk Domestik Bruto (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Data IPG di Kabupaten Kediri cukup tinggi sebesar 92,25%, artinya bahwa perempuan di Kabupaten Kediri IPM nya tinggi, demikian pula menandakan bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf dan standar hidup bagi perempuan cukup tinggi. IPG di Kabupaten Kediri tahun 2024 target 93,31% realisasi 93,25% tercapai sebesar 99,93%.

Perkembangan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun 2022 – 2024 diukur dari meningkatnya partisipasi perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan sebagaimana tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22 Capaian Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pembangunan Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			
	a. Target	93,19	93,25	93,31
	b. Realisasi	92,85	93,25	93,25
	c. Capaian (b:a)	99,63	100	99,93
2.	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	73,20	73,36	73,36
3.	**% Kasus KDRT yang ditangani**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
4.	**Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif**			
	a. Target	1	1	1

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
	b. Realisasi	1	1	1
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	**% Peningkatan peran kader wanita**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
6.	**% Kasus kekerasan tehadap perempuan dan anak yang ditangani**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
7.	**% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
8.	**Jumlah partisipasi perempuan di lembaga DPRD (Orang)**	11	11	11
9.	**Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**	26	11	19

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.3 Pangan

Urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Dalam melaksanakan urusan tersebut, sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan yang aman, serta meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, pangan hewani, gula dan lain-lain). Pola Pangan Harapan (PPH) dapat diartikan sebagai komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan dalam bentuk komposisi energi (kalori) aneka ragam pangan dan/atau dalam bentuk komposisi berat (gram dan kg) aneka ragam pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Skor PPH tahun 2023 sebesar 94,4 atau tercapai 99,58% dari target yang ditetapkan yakni 94,8.

Capaian kinerja pangan daerah meliputi nilai pola pangan harapan, rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) dan peningkatan produksi peternakan pada tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.23 di bawah ini :

TABEL 2.23 CAPAIAN INDIKATOR PANGAN DAERAH TAHUN 2021 – 2023

NO	INDIKATOR	2022	2023*	2024**
1.	**Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)**			
	a. Target	143,22	144,65	146,10
	b. Realisasi	117,48	128,08	146,44
	c. Capaian (b:a)	82,03	88,54	100,24
2.	**Ketersediaan energi dan protein per kapita (kal/kapita/hari)**			
	a. Target	2.400 dan 63	2.400 dan 63	3.294 dan 82,81
	b.Realisasi	4.850 dan 139	3,294 dan 82,81	3.296 dan 88,36
	c.Capaian (b:a)	202,08 dan 220,63	137,25 dan 131,4	100,06 dan 106,70
.	**Produktivitas ternak**			
	Service per Conception (SC) (kali) (Jumlah pelayanan inseminasi)			
	a. Target	1,28	1,26	1,24
	b.Realisasi	1,60	1,60	1,58
	c.Capaian (a:b)	80	78,75	78,48
	Conception Rate (CR) (%) (Persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama)			
	a. Target	81	82	83
	b.Realisasi	75,9	74	70
	c.Capaian (b:a)	93,70	90,24	88,34
	Calving Interval (CI) (bulan) (Rata – rata jarak beranak)			
	a. Target	14,00	14	14
	b.Realisasi	14,00	14	14
	c.Capaian (a:b)	100,00	100	100
5.	**Jumlah Populasi Ternak (ekor)**			
	Sapi potong			
	a.Target	234.200	235.371	208.436
	b.Realisasi	234.431	206.372	214.715
	c.Capaian (b:a)	100,10	87,68	103,01
	Sapi perah			
	a. Target	10.850	10.905	10.960
	b.Realisasi	10.917	11.124	11.128
	c.Capaian (b:a)	100,62	102,01	101,53
	Kambing			
	a. Target	146.878	147.612	148.350
	b.Realisasi	149.256	151.473	222.626
	c.Capaian (b:a)	101,62	101,62	150,07
	Domba			
	a. Target	50.048	50.048	50.550
	b.Realisasi	48.496	49.740	50.050
	c.Capaian (b:a)	96,90	98,89	99,01
	Ayam buras			
	a. Target	1.278.311	1.284.702	1.291.126
	b.Realisasi	1.291.199	1.292.324	1.292.026
	c.Capaian (b:a)	101,01	100,59	100,07

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran daerah urusan pangan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Rata-rata ketersediaan pangan utama per penduduk** menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri. Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebanyak 146,10 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2024 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 146,44 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 100,24% (kategori Sangat Baik).

   Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain:

   - Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar);
   - Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri juga mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri.
   - Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan.
   - Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).
   - Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan.
   - Adanya potensi bahan pangan lokal yang beraneka ragam.

   Sedangkan faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja antara lain:

   - Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama.
   - Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang.

   Ketersediaan pangan utama tahun 2024 berhasil mencapai target dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun, maka ketersediaan pangan masih surplus sebesar 74,20 kg/kapita/tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan

utama Kabupaten Kediri sangat mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Kediri.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di atas proyeksi capaian Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 129,14 kg/kapita/tahun. Ketersediaan pangan Kabupaten Kediri juga masih berada di atas capaian Nasional yang sebesar 108,33 kg/kapita/tahun. Adapun data ketersediaan pangan Provinsi Jawa Timur dan Nasional dihitung dari data produksi pangan sepanjang tahun 2024 yang dirilis oleh media Goodstats.id dibagi dengan jumlah penduduk Jawa Timur maupun jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Adapun rencana tindak lanjut peningkatan capaian kinerja antara lain:

- Memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan instansi terkait baik Badan Pangan Nasional maupun Bulog terkait stok serta perumusan kebijakan terkait stok pangan.
- Dari sisi keterjangkauan pangan, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan mitigasi berkelanjutan terhadap daerah rentan pangan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang ada dengan tujuan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga mendorong kemandirian pangan di masing-masing daerah. Stabilitas harga juga senantiasa dijaga melalui pemantauan/survei harga pangan di 26 kecamatan yang tersaji dalam bentuk informasi harga pangan harian pada aplikasi SiPakndut yang dapat diakses secara *realtime* oleh masyarakat sekaligus sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Guna mengendalikan fluktuasi harga juga akan dilakukan operasi pasar, sidak Satgas Pangan dan Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan maupun saat terjadi lonjakan harga pangan.
- Dari sisi pemanfaatan pangan, konsumsi beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayayakan di pekarangan. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi. Keamanan pangan segar asal tumbuhan sebagai bagian dari aspek pemanfaatan pangan juga terus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya

keamanan pangan serta mendorong registrasi ijin edar dan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi pelaku usaha. Dengan adanya diversifikasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan.

2. **Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein per kapita (gram/kapita/hari)**, menggambarkan jumlah energi dan protein yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per hari. Target ketersediaan energi dan protein per kapita per hari tahun 2024 adalah sebesar 3.294 kkal/kapita/hari dan 82,81 gram/kapita/hari. Sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 3.296 kkal/kapita/hari dan 88,36 gram/kapita/hari. Ini berarti pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi per Kapita sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan Angka Kebutuhan Protein per Kapita yang sebesar 63 gram/kapita/hari, maka Kabupaten Kediri surplus energi sebesar 896 kkal/kapita/hari dan surplus protein sebesar 25,36 gram/kapita/hari. Berdasarkan target tahun 2024, capaian kinerja ketersediaan energi dalam kkal per kapita per hari sebesar 100,06%. Sedangkan capaian kinerja ketersediaan protein dalam gram per kapita per hari sebesar 106,70% dari target yang ditetapkan.

   Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja:

   - Adanya Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar).
   - Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri juga mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri.
   - Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan.
   - Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
   - Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan.
   - Adanya potensi bahan pangan lokal yang beraneka ragam.
   - Adanya lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Kediri.

   Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain:

   - Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama.

- Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang.
- Masih adanya daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Kediri.
- Fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
- Pola konsumsi masyarat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- Masih ditemukan pangan segar tidak aman yang yang beredar di Masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kinerja, maka diperlukan rencana tindak lanjut atas capaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

- Pemantauan berkelanjutan serta penyediaan informasi atas harga dan pasokan pangan di sisi produsen, di gudang distributor/ penggilingan serta di tingkat konsumen (pasar) melalui sinergitas lintas sektor.
- Penggalian dan optimalisasi potensi sumber daya lokal di daerah rentan rawan pangan.
- Pelaksanaan operasi pasar, sidak Satgas Pangan dan Gelar Pangan Murah menjelang hari besar keagamaan maupun saat terjadi lonjakan harga pangan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
- Pembinaan dan fasilitasi berkelanjutan atas rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

3. **Produksi peternakan**, menggambarkan seberapa besar produksi peternakan daging dan telur di tahun 2024.
   - Pada tahun 2024, target produksi daging sebesar 24.676 ton. Sedangkan produksi di tahun 2024 sebanyak 24.804,850 ton. Ini berarti pada tahun 2024 capaian kinerja produksi daging sebesar 100,52% dengan kategori kinerja Sangat Baik. Produksi daging pada tahun 2024 juga meningkat sebesar 372,85 ton dibandingkan tahun 2023.
   - Pada tahun 2024 produksi telur ditargetkan mencapai 69.289 ton, dan tercapai sebanyak 72.748,170 ton atau 104,99% dengan kategori kinerja Sangat Baik. Dibandingkan produksi telur tahun 2023, terjadi peningkatan produksi telur sebesar 4.141,17 ton.

     Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja produksi peternakan:
   - Adanya sarana prasarana penunjang pengembangan usaha peternakan dan peningkatan status kesehatan hewan dan kesmavet, antara lain Laboratorium

Pakan, Puskeswan, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, dan Rumah Potong Hewan.

- Adanya pembinaan secara berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi SDM peternak dan kelompok ternak dalam rangka pengembangan peternakan berwawasan agribisnis.
- Adanya perkembangan kelembagaan peternak yang ditandai dengan bertambahnya jumlah kelompok ternak dari tahun ke tahun.
- Adanya hibah pengembangan peternakan bagi kelompok ternak untuk menstimulus pengembangan usaha peternakan.
- Adanya dukungan pendanaan dari Pusat maupun Provinsi dalam pelaksanaan kebijakan peternakan dan kesehatan hewan.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional dan dianggap belum bisa menjamin kesejahteraaan peternak.
- Masih adanya kasus penyakit hewan menular.
- Sarana prasarana laboratorium pakan dan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet sebagai pendukung pencapaian kinerja instansi dalam hal peningkatan produksi ternak serta kesehatan hewan dan kesmavet sekaligus sebagai salah satu sumber PAD masih perlu ditingkatkan.
- Sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai salah satu faktor penentu produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) masih perlu ditingkatkan untuk sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner.
- Banyaknya produk olahan hasil peternakan yang belum memiliki ijin edar serta akses pemasaran produk olahan hasil peternakan perlu ditingkatkan.
- Beberapa kelompok ternak tidak bisa mendapatkan bantuan hibah dari APBD atau bantuan pemerintah dari APBN karena belum berbadan hukum.
- Produktivitas usaha peternakan belum optimal karena mutu genetis ternak lokal masih kurang.

Adapun rencana tindak lanjut dalam meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Penanganan dan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi, bioecurity, regulasi dan kebijakan tata niaga dan alur keluar masuk ternak, pengobatan ternak sakit serta sosialisasi tentang penyakit hewan menular serta optimalisasi fungsi Puskeswan.
- Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui optimalisasi inseminasi buatan (IB) melalui program SI KOMANDAN, pengendalian pemotongan sapi betina produktif dan penanganan gangguan reproduksi ternak, pengembangan kawasan

peternakan dan pembibitan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak serta pelayanan kesehatan hewan terpadu.

- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium pakan dan laboratorium keswan dan kesmavet.
- Peningkatan keamanan produk asal hewan melalui pengawasan produk serta peningkatan sarana prasarana RPH melalui pengadaan peralatan RPH disertai sosialisasi kepada pelaku usaha peternakan akan resiko penyembelihan ternak di TPH.
- Pembinaan dan fasilitasi pengurusan ijin edar pelaku usaha produk hasil peternakan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha Produk Asal Hewan.
- Meningkatkan usaha peternakan yang berwawasan agribisnis dengan pemberdayaan peternak yang sekaligus dapat meningkatkan kesadaran peternak untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya.
- Sosialisasi persyaratan kelompok ternak untuk berbadan hukum serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memasukkan kelompok ternak berbadan hukum ke dalam database Simluhtan sehingga saat pengajuan proposal dapat diusulkan menjadi penerima manfaat kegiatan.

4. **Produktivitas ternak** diukur dengan menghitung angka *Service per Conception* (SC) atau jumlah pelayanan inseminasi (*service*) yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi, *Calving Interval* (CI) atau jarak kelahiran, serta *Conception Rate* (CR) atau persentase betina yang bunting pada inseminasi pertama.
    - Target SC pada tahun 2024 adalah 1,24 kali. Sedangkan realisasi tahun 2024 diperoleh angka **SC** sebesar **1,58 kali** atau tercapai **78,48%** dari target. Hasil ini juga dapat diartikan bahwa pada tahun 2024 seekor betina membutuhkan rata-rata jumlah servis inseminasi sebanyak 1,58 kali. Hasil SC belum mencapai target disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas sehingga pelaksanaan *service* inseminasi buatan tidak tepat waktu saat masa birahi ternak dan kurangnya pengetahuan/kemampuan peternak dalam mendeteksi masa birahi ternak.
    - Rata-rata **CI** pada tahun 2024 adalah **14 bulan** atau tercapai **100,00%** dari target tahun 2024 yang sebesar 14 bulan. Ini menunjukkan rata-rata jarak beranak atau jumlah bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya adalah 14 bulan. Tahun 2024 hasil CI telah mampu mencapai target serta masih dalam *range* rata-rata CI di Provinsi Jawa Timur yaitu 13,5 – 14 bulan.
    - Target CR pada tahun 2024 adalah 83,00%. Sedangkan realisasi tahun 2024 diperoleh CR sebesar 70% atau tercapai 88,74**%** dari target. Ini berarti persentase

sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama adalah sebesar 70%. Capaian CR belum mencapai target disebabkan beberapa faktor yaitu berkurangnya akseptor karena penjualan dan penyembelihan betina produktif, hipofungsi ovarium, ketidaktepatan deteksi birahi serta kompetensi petugas inseminator yang masih perlu ditingkatkan.

5. **Populasi ternak** yang dijadikan indikator pada tahun 2024 adalah untuk komoditas sapi potong, sapi perah, kambing, domba, dan ayam buras.
   - Tahun 2024 telah dihitung populasi sapi potong sebanyak 208.436 ekor atau tercapai 103,01% dari target yang ditetapkan sebanyak 214.715 ekor.
   - Populasi sapi perah tahun 2024 sebanyak 11.128 ekor atau tercapai 101,53% dari target sebanyak 10.960 ekor.
   - Populasi kambing tahun 2024 terhitung sebanyak 222.626 ekor atau tercapai 150,07% dari target sebanyak 148.350 ekor.
   - Populasi domba tahun 2024 sebanyak 50.050 ekor, tercapai 99,01% dari target sebanyak 50.550 ekor.
   - Populasi ayam buras tahun 2024 sebanyak 1.292.026 ekor atau tercapai 100,07% dari target tahun 2024 sebanyak 1.291.126 ekor.

Adapun perkembangan produksi dan produktivitas peternakan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditampilkan dalam tabel 2.24 berikut ini :

Tabel 2.24 Perkembangan Produksi Peternakan Dan Populasi Hewan Ternak Tahun 2022 - 2024

No.	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Jumlah produksi peternakan (kg)**			
	Daging			
	a. Target	19.804	20.002	24.676
	b. Realisasi	23.609,334	24.432,000	24.804,844
	c. Capaian (b:a)	119,21	122,15	100,52
2.	**Telur**			
	a. Target	65.835.000	68.603.000	69.289
	b. Realisasi	66.926.996	68.607.000	72.748,170
	c. Capaian (b:a)	101,66	100.01	104,99

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024 populasi hewan ternak terutama sapi potong, sapi perah, kambing, entog, dan merpati cenderung meningkat. Ini tidak terlepas dari hasil upaya peningkatan populasi hewan ternak yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan, antara lain melalui pembinaan untuk peningkatan kompetensi SDM peternak dan kelompok ternak dalam rangka pengembangan peternakan berwawasan agribisnis, pengembangan teknologi peternakan, peningkatan sarana-

prasarana pendukung pengembangan peternakan, optimalisasi inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi ternak serta pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, populasi hewan ternak tahun 2022-2024 sebagaimana tabel 2.25 berikut :

Tabel 2.25 Populasi Hewan Ternak Tahun 2022 – 2024

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Sapi potong	234.431	206.372	214.715
2.	Sapi perah	10.917	11.124	11.128
3.	Kerbau	90	376	251
4.	Kuda	84	119	145
5.	Kambing	149.256	147.016	222.626
6.	Domba	48.496	49.740	50.050
7.	Babi	1.994	2.554	2.933
8.	Ayam buras	1.291.199	1.292.324	1.292.026
9.	Ayam petelur	6.047.711	6.807.049	6.600.348
10.	Ayam pedaging	4.311.359	17.415.584	17.392.572
11.	Itik	288.673	294.185	293.139
12.	Entog	66.321	67.113	71.764
13.	Kelinci	15.806	16.186	16.368
14.	Burung puyuh	694.116	695.034	688.992
15.	Merpati	33.523	33.907	34.123

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.4 Pertanahan

Urusan pertanahan diselenggarakan bersifat koordinatif karena urusan ini pada dasarnya masih ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Program yang dilakukan dalam menyelenggarakan urusan pertanahan meliputi : (tambah

a. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
b. Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
c. Fasilitasi konflik-konflik pertanahan, sebagaimana tabel 2.26 berikut :

TABEL 2.26
PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2022 – 2024

No.	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Fasilitasi penyelesaian Konflik/kasus pertanahan	0	1	5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri,Tahun 2023
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Penyelenggaraan urusan pertanahan pada tahun 2024 antara lain fasilitasi/penyelesaian konflik pertanahan di dusun mangli desa Puncu Kecamatan Puncu dengan Mangli Dian Perkasa, penyelesaian redistribusi tanah kepada masyarakat di desa Karangtengah Kecamatan Kandangan sebanyak 450 bidang, desa Sidowarek Kecamatan Plemahan sebanyak 235 bidang, desa Kampung Baru Kecamatan Kepung sebanyak 615 bidang, desa Puncu Kecamatan Puncu sebanyak 200 bidang, serta pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk 72.264 bidang di 40 desa pada 15 Kecamatan.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan, dan pertamanan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Pelestarian lingkungan hidup dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran, pencegahan perluasan lahan kritis, pelayanan persampahan dan peningkatan pertamanan untuk menunjang kualitas lingkungan hidup dalam mengantisipasi dampak pemanasan global (*global warming*) serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup meliputi peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan penanganan persampahan dan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Adapun target dan realisasinya sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan

Kabupaten Kediri merupakan wilayah agraris dan belum banyak industri yang memberikan dampak eksternalitas terhadap lingkungan. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan maka digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator. Tiga indikator sebagai dasar penilaian IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa IKA, IKU dan ITL melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi capaian IKU dan ITL setiap tahunnya cenderung menurun. Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya industri yang terus berkembang, volume kendaraan bermotor meningkat dan banyaknya lahan yang terkonversi menjadi pemukiman ataupun pelebaran jalan.

Perkembangan kualitas lingkungan tahun 2022 – 2024 sebagaimana pada tabel 2.27 berikut :

TABEL 2.27
PERKEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2022 – 2024

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,22	62,97	62,97
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	80,94	86,12	94,31
3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	39,34	40,49	39,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan mempunyai indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Angka IKA didapatkan dari pengukuran kualitas air di badan air wilayah Kabupaten Kediri pada beberapa titik sampling. Angka IKU didapatkan dari pengukuran kualitas udara dengan sistem *passive sampler* di kawasan pemukiman, kawasan Industri, kawasan perniagaan/perdagangan, kawasan perkantoran dan jalan raya. Sedangkan angka ITL didapatkan dari pengukuran tutupan lahan yang terdiri dari tutupan kawasan hutan, luas semak belukar, semak belukar kawasan rawa, dan luas ruang terbuka hijau.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas lingkungan adalah melaksanakan pengawasan, pembinaan serta sosialisasi pada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan konservasi dengan penanaman pohon di daerah tangkapan air dan daerah rawan longsor, area turus jalan dan melaksanakan pembinaan sekolah melalui adiwiyata untuk melaksanakan penanaman dan pengelolaan sampah.

2) Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Perkembangan penanganan persampahan yang dilakukan dapat dilihat dari peningkatan persentase penanganan persampahan, persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun capaian perkembangan penanganan persampahan sebagaimana tabel 2.28 berikut :

TABEL 2.28 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2022 – 2024

INDIKATOR	TAHUN		
	2022	2023*	2024**
% Penanganan persampahan			
a. Target	41,75	56,54	75,67
b. Realisasi	20,37	29,68	31,67
c. Capaian (b:a)	48,70	52,49	41,85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Realisasi penanganan persampahan dari tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan. Sampah yang dikelola adalah terdiri dari sampah yang tereduksi (dikurangi) di sumber sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat seperti di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Bank Sampah dan sebagainya serta penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah mulai dari pelayanan penyapuan jalan, pengumpulan sementara di TPS dan Depo Transfer, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

3) Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah area yang dipenuhi vegetasi alami atau buatan, yang berfungsi untuk mendukung keseimbangan ekologi dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Memiliki manfaat yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mendorong perekonommian daerah, mendorong Pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa luas penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Jika dihitung dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri maka luasan RTHKP yang dikelola adalah sebesar 0,12%. Hal tersebut karena RTH yang dikelola adalah RTH kawasan perkotaan berupa taman dan taman plint jalan sedangkan sebagian besar dikelola oleh masyarakat terutama yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Adapun capaian indikator lingkungan hidup lainnya meliputi Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun sebesar 14,7 Ha sebagaimana tabel 2.29 berikut :

TABEL 2.29
PENYELENGGARAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 – 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun	14,45078	14,745078	15,427837

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ada beberapa langkah strategi antara lain :

- Mewujudkan kebersihan kota dan jalan-jalan umum;
- Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pengembangan pelayanan;
- Penataan taman kota/RTHKP yang indah, bersih dan hijau;
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tematik;
- Pembangunan lampu dekoratif perkotaan;

- Pemantauan/pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan bahan pencemar lingkungan;
- Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan pencegahan tanah longsor di kawasan rawan longsor; dan
- Penyuluhan dan pelatihan tentang kepedulian terhadap lingkungan melalui bimtek pada masyarakat/PKK dan sekolah-sekolah (adiwiyata).

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Target Kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2024 yaitu 98,5% dengan realisasi 99,73%. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sesuai dengan target yaitu 99,72%. Pasangan menikah yang sudah memiliki surat nikah dari target 227 pasangan dan realisasi 227 pasangan sehingga tercapai 100%. Penduduk meninggal yang berakta kematian dengan target 100% realisasi sebesar 100%. Diupayakan pelayanan administrasi kependudukan dari tahun ke tahun semakin baik.

Capaian kinerja dalam peningkatan administrasi kependudukan sebagaimana tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.30 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	% Kepemilikan KTP EL			
	a. Target	97,00	98,00	98,5
	b. Realisasi	97,71	97,53	99,73
	c. Capaian (b:a)	100,73	99,52	101,25
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
	a. Target	Sudah	Sudah	Sudah
	b. Realisasi	Sudah	Sudah	Sudah
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
3.	% Penduduk wajib KK yang memiliki KK			
	a. Target	82,00	87	90
	b. Realisasi	91,87	99,87	99,64
	c. Capaian (b:a)	112,03	114	110,71
4.	Pasangan berakta perkawinan/surat nikah			
	a. Target	528	247	227
	b. Realisasi	528	247	227
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	% Penduduk meninggal berakta kematian			
	a. Target	20.893	20.430	17.476
	b. Realisasi	20.893	20.430	17.476
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
6.	Skala Kepuasan Masyarakat (SKM) baik/tidak	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dengan adanya berbagai inovasi menimbulkan beberapa perubahan, baik dalam pelayanan maupun waktu pelaksanaan pelayanan. Dengan sistem dan program baru diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara efektif dan lebih efisien. Kondisi ini berdampak pada data indikator capaian keberhasilan di bidang administrasi kependudukan seperti persentase penduduk terhadap kepemilikan KTP, KK, dan persentase penduduk berakta kelahiran serta kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Adapun data kuantitatif perkembangan administrasi penduduk tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31 Perkembangan Pendaftaran Penduduk
Tahun 2022 – 2024

(Lembar)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Pemberdayaan Akta Catatan Sipil			
	a. Akta Kelahiran	29.537	29.537	29.537
	b. Akta Perkawinan	31.273	31.273	31.273
	c. Akta Kematian	24.214	24.214	24.214
	d. Akta Perceraian	260	260	260
	e. Akta Pengangkatan Anak	247	247	247
2.	Pelayanan KTP	227	227	227
3.	Pelayanan KK	18.335	18.335	18.335
4.	Pelayanan KIA	20.430	20.430	20.430

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah dan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan;
b. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. Pemberdayaan fungsi BUMDes dari segi pengelolaan manajemen produktivitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi;
d. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;
g. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pedesaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktivitas;
h. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan;
i. Peningkatan peran Pemerintahan Desa dalam fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
j. Peningkatan peranan BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target dari sasaran persentase Lembaga desa yang aktif sebesar 87 % dan tercapai 84 %, hal ini disebabkan seringnya terjadi pergantian kepengurusan karena banyak yang mengundurkan diri karena menjadi pengurus Lembaga desa (PKK) adalah sukarela.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan produktivitas ekonomi yang berbasis pada potensi desa. Di Kabupaten Kediri, target BUMDes aktif pada tahun 2024 adalah 310 desa.

Namun, realisasi hingga saat ini menunjukkan bahwa baru 258 desa atau sekitar 83% yang aktif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pasang surut usaha yang dialami oleh beberapa BUMDes, serta adanya pembaharuan indikator dalam menentukan klasifikasi BUMDes. Pembaharuan indikator ini menyebabkan beberapa BUMDes yang sebelumnya dianggap aktif, kini tidak lagi memenuhi kriteria.

Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya untuk meningkatkan jumlah BUMDes aktif. Berbagai program pelatihan, pendampingan, bantuan keuangan serta fasilitasi legalitas yang diberikan kepada pengelola BUMDes agar dapat mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya kerjasama antar BUMDes dan dengan pihak swasta untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing..

Laporan keuangan yang tepat waktu sesuai ketentuan dengan target 89 % bisa terealisasi 89 % atau capaian 100 %.

Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2021 – 2024 sebagaimana tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.32 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Dan Pemerintah Desa Tahun 2022 – 2024

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023*	2024**
1.	**% Lembaga Desa yang aktif**			
	a. Target	81	84	87
	b. Realisasi	84	83	84
	c. Capaian (b:a)	102,00	98,80	97
2.	**BUMDes yang aktif**			
	a. Target	280	295	310
	b. Realisasi	286	252	258
	c. Capaian (b:a)	102,00	85,00	83
3.	**% Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan**			
	a. Target	83,00	86	89
	b. Realisasi	83,00	86	89
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

Sumber : DPMPD Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui:

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB;
2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan;
3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; dan
4) Memperkuat kelembagaan dan jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2022 – 2024 dapat diukur dari meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana tabel 2.33

Pencapaian Kesertaan ber-KB aktif kabupaten Kediri tahun 2024 sebesar 70,57%. Pencapaian kualitas atau peserta KB aktif MKJP sebesar 34,99%. Dari pencapaian Kersertaan ber-KB aktif dan pencapaian peserta KB aktif MKJP yang melebih target menandakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi terutama pemakaian alat kontrasepsi yang efektif yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang pemakaiannya minimal 3 tahun yang bertujuan menjarangkan ataupun mengakhiri kehamilan.

TABEL 2.33
CAPAIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022 – 2024

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Prevalensi peserta KB aktif	67,32	70,38	70,57
2.	Persentase KB aktif MKJP	35,54	33,67	34,99
3.	Persentase *Unmeet Need*	12,02	10,54	9,85
4.	Persentase pencapaian peserta KB baru	79,7	12,49	61,59
5.	Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	15,61	15,43	12,63
6.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100	100	100
7.	Persentase anggota kelompok tribina yang aktif			
	BKB	30,89	34,20	35,87
	BKR	19,59	18,80	30,15
	BKL	24,85	28,57	37,09

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Prevalensi peserta KB aktif capaian tahun 2024 naik dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran PUS untuk menjadi peserta KB. Persentase KB aktif MKJP capaian tahun 2024 naik dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya minta peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Persentase Unmeet Need capaian tahun 2024 turun dibanding tahun 2023. Dengan menurunnya unmeet need hal ini menandakan keberhasilan dari program KB. Namun yang perlu mendapat perhatian pada sasaran yang mempunyai resiko tinggi untuk hamil maupun melahirkan terutama PUS pada usia 40 tahun keatas, karena PUS usia 40 tahun sebaiknya terlindungi oleh alat kontrasepsi untuk mencegah kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Persentase pencapaian peserta KB baru capaian tahun 2024 turun dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran pelayanan KB baru turun.

Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun capaian tahun 2024 turun dibanding tahun 2023. Dengan menurunnya persentase perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun berarti keberhasilan pola asuh orang tua yang dapat mencegah perkawinan di usia kurang dari 20 tahun. Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga. Terpenuhinya data mikro keluarga sampai pada tingkat desa/kelurahan yang akurat dan dinamis akan sangat berguna dalam menentukan perencanaan dan sasaran yang tepat sehingga program Bangga Kencana dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

Persentase cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) capaian tahun 2024 naik dibanding tahun 2023. Penambahan anggota kelompok kegiatan BKB menjadi aspek penting karena dalam kegiatan ini keluarga

dengan anak balita akan diberi pengetahuan terkait pola asuh dan tumbuh kembang anak yang optimal sehingga ketika tumbuh kembang anak berjalan dengan baik maka ketahanan keluarga meningkat.

Bina Keluarga Remaja (BKR) capaian tahun 2024 naik dibanding tahun 2023. Peningkatan cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan BKR menjadi salah satu indikator disebabkan karena sasaran utama BKR yakni adalah keluarga dengan anak usia remaja sehingga salah satu kegiatan BKR mengacu kedalam pemberian informasi dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja yang diharapkan semakin baik dan tinggi pengetahuan remaja maka ketahanan dan pemberdayaan keluarga meningkat.

Bina Keluarga Lansia (BKL) capaian tahun 2024 naik dibanding tahun 2023. Dengan menjadi anggota serta mengikuti kegiatan kelompok BKL diharapkan keluarga Lansia dan lansianya akan bertambah ilmu pengetahuannya serta bisa menigkatkan produktifitas dalam berkegiatan sehari-hari yang akan berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan lansia.

Perkembangan peserta KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.34 berikut :

TABEL 2.34
PERKEMBANGAN PESERTA KB DAN PUS TAHUN 2022 – 2024

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Peserta KB Aktif/Lestari	176.954	172.838	175.680
2.	Peserta KB Baru	21.814	29.844	22.244
3.	Pasangan Usia Subur (PUS)	262.842	252.991	248.933
4.	Peserta KB Mandiri	115.144	94.930	87.461

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Keberhasilan program KB dipengaruhi oleh jaringan pelayanan KB yang telah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kediri beserta ketersediaan alat kontrasepsinya, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan/program sebagai kader Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat sebagai kader program KB selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan karena dinilai sudah memadai, yaitu di setiap desa sudah terdapat seorang kader PPKBD dan antara 6 sampai dengan 9 kader sub PPKBD. Jumlah kader PPKBD pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.35 di bawah ini :

TABEL 2.35
JUMLAH KADER PPKB TAHUN 2022 - 2024

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	PPKBD	344	344	344
2.	Sub PPKBD	2.931	2.931	2.931

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran mobilitas baik orang dan barang, mengurangi kecelakaan lalu lintas, sehingga meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Selanjutnya seiring dengan dinamika terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang perhubungan, pemerintah berupaya mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah yang ditunjang dengan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur perhubungan yang memadai.

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan Publik Perhubungan pada tahun 2023 sebesar 86,59meningkat pada tahun 2024 sebesar 87,44. Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dan Sarana Pendukung Lain juga meningkat pada tahun 2023 sebesar 21,40% dan tahun 2024 meningkat sebesar 33,39%, untuk persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan pada tahun 2023 sebesar 98,57 pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 87,70.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan selama kurun waktu tahun 2022 – 2024 dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.36 Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2022 – 2024

(Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dan Sarana Pendukung Lain**			
	a. Target	11,37	32,86	54,79
	b. Realisasi	14,68	21,40	33,39
	c. Capaian (b:a)	129,11	65,12	60,95
2.	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan Publik Perhubungan**			
	a. Target	65,00	70,00	86,59
	b. Realisasi	86,48	86,59	87,44
	c. Capaian (b:a)	133,05	123,70	100.98

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
3.	**% Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan**			
	a. Target	86,25	86,67	87,08
	b. Realisasi	79,66	98,57	87,70
	c. Capaian (b:a)	92,36	113,73	100,71
4.	**Jumlah Ketersediaan unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kediri**			
	a. Target	1,00	1,00	1,00
	b. Realisasi	1,00	1,00	1,00
	c. Capaian (b:a)	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri. Tahun 2023
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sarana prasarana perhubungan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Walaupun ada beberapa yang jumlahnya tetap seperti *Moving Sign Display* (MSD), *Traffic Announcer System* (TAS), paku marka *solar cell*, *running text*, dan lampu penerangan jalan umum sebanyak 10.113 titik. Peningkatan sarana prasarana perhubungan akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi karena semakin lancarnya lalu lintas dan terjaminnya keselamatan masyarakat di jalan. Gambaran pengadaan sarana prasarana perhubungan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.37 berikut :

Tabel 2.37 Perkembangan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2021 – 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				SATUAN
		2021	2022	2023*	2024**	
1.	Rambu-rambu lalu lintas	36	72	60	95	unit
2.	Guardrail	0	6	0	10	beam
3.	APILL	3	13	4	5	unit
4.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	3	6	3	10	unit
5.	Marka	8.257	19 (tilok)	26(tilok)	35(tilok)	m’
6.	Road Barrier	16	0	0	0	buah
7.	Pengadaan CCTV/Monopole	1	4	6	7	unit
8.	Pengadaan TL	0	1	1	1	unit
9.	Pengadaan ATCS	1	1	1	5	unit
10.	Palang Pintu KA	2	2	2	2	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Perkembangan dalam sarana prasarana uji kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri

melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pengguna pengujian kendaraan bermotor. Peningkatan PAD dari sektor perhubungan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 dikarenakan sektorretribusi PAD dari pengujian kendaraan bermontor yang diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat. Perkembangan pemenuhan sarana prasarana uji kendaraan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.38 berikut :

Tabel 2.38 Perkembangan Pemenuhan Sarana Prasarana Uji Kendaraan Tahun 2022 – 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Ketersediaan Unit Pelayanan Uji Kir Kendaraan**			
	a. Target	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	100,00	100,00	100,00
	c. Capaian (b:a)	100,00	100,00	100,00
2.	**Peningkatan PAD dari Sektor Perhubungan**			
	a. Target	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	99,51	93,63	99,55
	c. Capaian (b:a)	99,51	93,63	99,55

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Jumlah kendaraan yang mengikuti wajib uji untuk tahun 2024 mengalami penurunan terutama untuk kendaraan angkutan umum seperi Mobil Penumpang Umum (MPU), bus umum, dan mobil barang bukan umum. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya mobil angkutan umum karena turunnya minat masyarakat pemakai angkutan umum. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Perkembangan jumlah kendaraan yang lulus wajib uji mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel 2.39 berikut :

Tabel 2.39 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji Tahun 2022 – 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Mobil Penumpang Umum	13	8	8
2	Bus Umum	228	191	208
3	Bus Bukan Umum	712	534	598
4	Mobil Barang Umum	2.707	2.778	2.273
5	Mobil Barang Bukan Umum	16.714	13.521	13.571
6	Kendaraan Khusus	212	205	204
7	Kereta Gandengan Umum	41	43	39
8	Kereta Gandengan Bukan Umum	31	9	11
9	Kereta Tempelan	28	28	19
Jumlah Kendaraan Melakukan Uji		**24.011**	**17.317**	**16.931**
Jumlah Kendaraan Lulus Uji		**23.305**	**16.332**	**15.606**
Kendaraan yang Lulus Uji KIR (%)		**97,06**	**94,31**	**92,17**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2024

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah; dan
5. Publikasi hasil-hasil Pembangunan.

Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi yang ditargetkan 1.000/tahun di tahun 2023 bisa mencapai 1.805/tahun. Tentu saja ini penurunan yang relatif tinggi dari target yang ditentukan. Jumlah update pada media pemerintah daerah sama dengan tahun 2023 yaitu 5 kali per hari di tahun 2023. Hal ini didukung dengan adanya media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter* yang juga aktif digunakan selain *website* pemerintah. Hal ini dikarenakan di era sekarang pemanfaatan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* lebih efektif dalam menyampaikan informasi baik secara cepat maupun secara luas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kediri juga memiliki akun dalam platform *Youtube* sebagai media penyiaran. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemerintah Kabupaten Kediri (content viewer) tahun 2023 mencapai 168 ribu. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah pengunjung (content viewer) di tahun 2023 ini mengalami penurunan tajam dikarenakan ada perubahan web, yaitu web khusus berita (BERITA.KEDIRIKAB.GO.ID) dan web portal (KEDIRIKAB.GO.ID).

Adapun perkembangan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tabel 2.40 berikut :

Tabel 2.40 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 - 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Web site milik pemerintah daerah (situs)			
	a. Target	1	1	1
	b. Realisasi	1	1	1
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
2.	% Kecukupan SDM di bidang TIK			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
3.	Jumlah Ruang publik yang terlayani free wifi			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	52	62	69
	c. Capaian (b:a)	52%	62%	69%

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
4.	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerja sama			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	2865	1805	1610
6.	% PPID aktif pada SKPD	100	100	100
7.	% SKPD yang berbasis e-government	100	100	100
8.	Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	1000 Mbps	1000 Mbps	1000 Mbps
9.	Jumlah update pada media pemerintah daerah	10x/hr	10x/hr	1148/Th
10.	Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab	183.000	168.000	238.794
11.	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	198	210	114

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam era kemajuan teknologi ketersediaan sarana prasarana komunikasi/ informatika sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi komunikasi/informatika semakin diperlukan mengingat kebutuhan dan tuntutan kerja aparatur Pemerintah Daerah dalam penggunaan sarana komunikasi dan informasi yang semakin tinggi. Di samping pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi pembangunan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggunakan media komunikasi lainnya.

Selain itu dalam bidang persandian, Kabupaten Kediri juga telah mencapai beberapa kemajuan penting. Penerapan sistem persandian yang lebih aman dan andal telah berhasil dilakukan, meningkatkan keamanan data dan informasi pemerintah daerah. Pelatihan intensif dan berkelanjutan untuk petugas persandian telah meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menangani berbagai ancaman terhadap keamanan informasi. Penggunaan teknologi enkripsi canggih telah diimplementasikan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keamanan informasi nasional dan internasional telah ditingkatkan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang persandian. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi juga telah dilakukan di berbagai instansi pemerintah dan masyarakat umum di Kabupaten Kediri.

Meskipun telah ada berbagai capaian, Kabupaten Kediri masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam urusan persandian. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pengadaan peralatan dan teknologi persandian yang mutakhir. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam

bidang persandian juga menjadi tantangan utama. Serangan siber yang semakin canggih dan terus berkembang memerlukan peningkatan berkelanjutan dalam teknologi dan strategi keamanan, yang sering kali memerlukan investasi yang signifikan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol keamanan informasi di berbagai instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan data yang lebih baik. Terakhir, koordinasi antar lembaga dalam penanganan dan respons terhadap insiden keamanan informasi perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar koperasi dan usaha mikro menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mampu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelatihan, bantuan sarana promosi, akses jaringan pasar, dan pendampingan yang kesemuanya berorientasi kepada pengembangan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kemampuan organisasi manajemen serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemitraan.

Jumlah koperasi yang aktif sampai tahun 2024 ada 861 unit dengan capaian persentase koperasi aktif sebesar 100,04%, namun untuk capaian pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya sebesar 119,41%, pada tahun 2023 tercapai sebesar 106,20%.

Sementara kinerja persentase peningkatan kualitas usaha mikro cukup menunjukkan hasil yang positif pada kurun waktu 2022 – 2024 dengan jumlah usaha mikro yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 10.422 unit usaha mikro. Persentase peningkatan kualitas usaha mikro tercapai sebesar 105,98% pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya yang sebesar 115,44%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan usaha mikro yang tercapai sebesar 178,58% pada tahun 2024.

Pembangunan koperasi dan usaha mikro daerah meliputi persentase koperasi sehat, persentase koperasi aktif dan persentase pertumbuhan usaha mikro sebagaimana tabel 2.41 berikut :

Tabel 2.41 Pembangunan Koperasi Dan Usaha Mikro
Tahun 2022 – 2024

No.	Indikator	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
1.	**Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya**			
	a. Target	30,00	34,62	41,34
	b. Realisasi	38,09	41,34	43,90
	c. Capaian (b:a)	126,97	119,41	106,20

No.	Indikator	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
2.	**Persentase peningkatan kualitas usaha mikro**			
	a. Target	14,55	14,96	17,27
	b. Realisasi	16,37	17,27	18,30
	c. Capaian (b:a)	112,51	115,44	105,98
3.	**Persentase koperasi aktif**			
	a. Target	60,35	61,58	62,95
	b. Realisasi	61,26	61,67	62,97
	c. Capaian (b:a)	101,51	100,15	100,04
4.	**% Pertumbuhan Usaha Mikro**			
	a. Target	5,84	5,93	9,99
	b. Realisasi	9,97	9,99	17,84
	c. Capaian (b:a)	170,72	168,47	178,58

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri, Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar terlaksana tujuan tersebut perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Beberapa hal di tahun 2023 yang menjadi perhatian dalam meningkatkan daya tarik investasi antara lain:

a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk pengembangan usaha, seperti : jalan, jembatan, fasilitas perbankan dan infrastruktur telekomunikasi;
b. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi;
c. Pemberian fasilitas dan keamanan dalam berusaha bagi penanam modal terutama Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berupa : pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal;
d. Ketersediaan bahan baku dan penyiapan tenaga kerja yang terdidik; dan
e. Pelayanan profesional, cepat, dan memuaskan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani investasi.

Peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kediri ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan investasi sebesar 29,99%. Sedangkan untuk skala kepuasan masyarakat telah melebihi target yaitu sebesar 84,70 (baik) atau dengan pencapaian 100,41%. Adapun capaian sasaran strategis pembangunan penanaman modal daerah sebagaimana tabel 2.42 berikut :

Tabel 2.42 Perkembangan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2022 – 2024

No	Indikator kinerja	Tahun		
		2022	2023*	2024**
1.	**Nilai realisasi investasi (Rupiah)**			
	Target	694.396.060.924	736.059.824.579	3.200.000.000.000
	Realisasi	3.180.910.111.886	3.204.083.366.778	4.636.215.436.458
	Capaian (b : a)	458.08	435.30	144.88
2.	**Persentase pertumbuhan investasi**			
	Target	5,00	6,00	7,00
	Realisasi	35,07	26,16	29,99
	Capaian (b : a)	701,4	436	428,43
3.	**Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan**			
	Target	79,60	79,65	84,70
	Realisasi	83,07	84,25	85,05
	Capaian (b : a)	104.36	105,78	100.41

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri. Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Capaian persentase pertumbuhan investasi sebesar 428,43 terutama disebabkan adanya kemudahan dalam berinvestasi dan terdapatnya dampak dengan adanya program strategis nasional di Kabupaten Kediri. Perkembangan capaian kinerja urusan penanaman modal digambarkan dengan jumlah usaha baru, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana tabel 2.43 berikut :

Tabel 2.43 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi
Tahun 2022 - 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Usaha Baru (Perusahaan)	10.744	16.937	22.117
2.	Penyerapan Tenaga Kerja (Org)	58.706	68.501	59.754
3.	PMDN dan PMA	146	159	205
4.	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	12.250.345	15.454.429	20.090.644

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Jumlah penyerapan tenaga kerja 59.754 orang. Demikian pula dengan nilai investasi Rp20.090.644.000.000,00. Selanjutnya perkembangan jumlah pelayanan perizinan di Kabupaten Kediri selama tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.44 berikut :

Tabel 2.44 Perkembangan Pelayanan Perizinan Tahun 2022 - 2024

No.	URAIAN	JUMLAH SK IZIN YANG DITERBITKAN		
		2022	2023*	2024**
1.	Izin Pemasangan Reklame	661	422	324
2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	254	98	57

No.	URAIAN	JUMLAH SK IZIN YANG DITERBITKAN		
		2022	2023*	2024**
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR Non Usaha)	81	79	105
IZIN USAHA MELALUI OSS				
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	10.744	16.937	22.117
2.	Izin Usaha Mikro Kecil	0	266	297
JUMLAH		**11.740**	**17.802**	**22.900**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Dengan berlakunya OSS (*Online Single Submission*) terdapat perubahan nomenklatur izin yaitu pemenuhan izin usaha sektor kesehatan, izin usaha sektor ketenagakerjaan, izin usaha sektor lingkungan hidup, izin usaha sektor perikanan dan peternakan.

Berdasarkan tabel di atas untuk izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip perluasan penanaman modal di tahun 2021 tidak ada, diubah menjadi pendaftaran penanaman modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat digambarkan melalui dua aspek kualitas dan prestasi pemuda, serta prestasi olahraga daerah. Capaian kedua aspek tersebut sebagaimana tabel 2.45 berikut :

TABEL 2.45 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 – 2024

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
Kepemudaan				
1.	Jumlah organisasi kepemudaan (Unit)	87	87	87
2.	Persentase wirausaha muda	1,34	4,35	5,86
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	10,87	12,34	16,80
Olahraga daerah				
1.	Jumlah Klub Olah Raga	494	494	494
2.	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3.	Jumlah sekolah olahraga (Unit)	494	494	494
4.	Cakupan Pembinaan Olahraga dan Atlet Muda	61,02	62,35	64,00
5.	Jumlah Atlet Berprestasi	13	97	82
6.	Jumlah Prestasi Olahraga	6	97	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mengembangkan organisasi dan kegiatan kepemudaan yang positif serta membudayakan aktivitas olahraga di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Pembangunan fasilitas keolahragaan diarahkan pada upaya mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan mempertahankan kondisi lapangan olahraga yang ada tetap layak untuk digunakan.

TABEL 2.46 PERKEMBANGAN FASILITAS DAN KEGIATAN OLAH RAGA TAHUN 2022 – 2024

(unit)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Jumlah klub Olah raga :**			
	- Bola Voli	48	48	48
	- Bulutangkis	132	132	132
	- Sepak bola	76	76	76
	- Tenis Meja	80	80	80
	- Tenis Lapangan	40	40	40
	- Atletik	35	35	35
	- Senam Aerobik/Sanggar	20	20	20
	- Senam Artistik	2	2	2
	- Renang	35	35	35
	- Catur	26	26	26
2.	**Jumlah gedung/lapangan olah raga :**			
	- Bola Voli	85	85	85
	- Bulutangkis	98	98	98
	- Sepak bola	173	173	173
	- Tenis Lapangan	8	8	8
	- Atletik	1	1	1
3.	**Jumlah sekolah olah raga :**			
	- Sekolah Sepak Bola (SSB)	76	76	76
	- Sekolah Bulutangkis	132	132	132
	- Sekolah Tenis Meja	80	80	80
	- Sekolah Tenis Lapangan	40	40	40
	- Sekolah Bola Voli	48	48	48
	- Sekolah Atletik	35	35	35
	- Sekolah Renang	35	35	35
	- Sekolah Senam	22	22	22
	- Sekolah Catur	26	26	26

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Dalam urusan kepemudaan dan olahraga, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Pertama, rendahnya tingkat pemuda wirausaha menunjukkan kurangnya inisiatif dan dukungan untuk pengembangan keterampilan kewirausahaan di kalangan

pemuda. Kedua, partisipasi pemuda dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan masih rendah, yang mengindikasikan kurangnya minat dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan sosial. Ketiga, masih banyak pemuda yang terlibat dalam masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, yang memerlukan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Keempat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga juga masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan aktif. Terakhir, peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi belum optimal, sehingga potensi atlet muda belum bisa dimaksimalkan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kualitas hidup pemuda serta prestasi olahraga nasional.

2.1.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berguna baik bagi para pemangku kepentingan maupun lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kediri. Melalui data statistik dapat dilakukan kegiatan perencanaan sehingga menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Sedangkan bagi lingkungan internal pemerintah data statistik tersebut merupakan rujukan dalam melakukan pemantauan/*monitoring* dan mengevaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, merumuskan perbaikan dan optimalisasi kinerja, dan media akuntabilitas kepada publik. Penyelenggaraan urusan statistik sektoral diwadahi melalui Forum Satu Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/93/418.08/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Implementasi teknologi modern, seperti big data dan artificial intelligence, telah mempercepat dan memperdalam analisis data, memberikan wawasan yang lebih baik tentang berbagai aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Kediri. Publikasi laporan statistik secara berkala telah ditingkatkan, mencakup berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan demografi, sehingga informasi yang relevan dan terkini selalu tersedia bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data statistik terus dilakukan, memastikan bahwa staf statistik memiliki keterampilan yang diperlukan. Kerjasama dengan badan statistik Kabupaten Kediri juga telah diperkuat, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas statistik di Kabupaten Kediri. Namun, Kabupaten Kediri masih menghadapi berbagai tantangan dalam urusan statistik yang perlu diatasi. Akses data dari daerah terpencil atau sektor yang kurang terorganisir juga menjadi hambatan, mengakibatkan data yang tidak lengkap atau kurang representatif. Selain itu, kualitas data yang dikumpulkan sering kali mengalami masalah

seperti ketidakakuratan dan inkonsistensi, yang dapat mempengaruhi analisis dan hasil statistik. Kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap kegiatan statistik juga menjadi isu penting, di mana kurangnya kerjasama dari responden dapat mempengaruhi kualitas dan integritas data yang diperoleh. Perubahan dalam metodologi statistik juga menimbulkan tantangan tersendiri, memerlukan penyesuaian dan pelatihan ulang bagi staf untuk memastikan mereka tetap kompeten dan up-to-date dengan metode terbaru.

Kebijakan Satu Data Kabupaten Kediri adalah kebijakan tata kelola untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah, instansi vertikal dan instansi pusat melalu pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kelompok seni dan budaya yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan karya seni budaya, sehingga akan menaikkan kemampuan mereka untuk bisa ditampilkan dalam pagelaran di dalam daerah maupun luar daerah, baik skala lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Dengan meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi berarti seni dan budaya lokal akan terangkat, dikenal, dihargai dan dilestarikan yang akhirnya akan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya melalui :

a. peningkatan budaya lokal yang dilestarikan;
b. peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan;
c. peningkatan kelompok seni yang diberdayakan; dan
d. cagar budaya yang dilestarikan

Kesenian yang berkembang di Kabupaten Kediri merupakan bagian dari kebudayaan daerah yand didukung olek masyarakat yang multikultural. Posisi strategis Kabupaten Kediri menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dalam mencari kehidupan yang layak sehingga muncul keragaman budaya yang menjadikannya sebagai aset daerah yang bernilai.

Perkembangan kegiatan seni dan kebudayaan Kabupaten Kediri sebagaimana tabel 2.47 berikut :

Tabel 2.47 Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah Tahun 2022 – 2024

No	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Jumlah grup kesenian	1.595	1.813	1960
2.	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	7,79	98,11	98,21

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
3.	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	48	48	48
4.	Jumlah gedung kesenian	3	3	3
5.	Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya	128	343	183
6.	% cakupan even budaya skala kabupaten	22,9	35,86	56,65
7.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	509	511	511

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Sedangkan budaya spiritual dan upacara adat daerah yang masih terpelihara dengan baik antara lain : Budaya Spiritual Wiwitan (Tanam Padi), Methik Kopi, Nyadran (Bersih Desa), Mendhem Golekan, Megengan (menjelang bulan Ramadhan), Kebur Banyu (upacara minta hujan), Upacara Adat Ritual Sesaji Gunung Kelud, Upacara Adat Ziarah Menang Satu Suro, Upacara Adat Ziarah Prabu Anom, Upacara Adat Tirto Husada, Wisuda Waranggono, dan sebagainya. Aktivitas perkembangan seni budaya selama tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.48 berikut :

Tabel 2.48 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya
Tahun 2022 – 2024

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A.	**Kegiatan Budaya Tradisi :**			
1.	Ritual Sesaji Kelud, Ngancar	1	1	1
2.	Nyadran Poso	1	1	1
3.	Megengan	1	1	1
4.	Wiwitan Pari	1	1	1
5.	Puputan Pari	1	1	1
6.	Manten Tebu (Buka Giling), Kras	1	1	1
7.	Methik Kopi, Plosoklaten	1	1	1
8.	Kegiatan tradisional/suroan			
	- Ziarah Menang (Sri Aji Joyoboyo), Pagu	1	1	1
	- Ziarah Makam Kyai Prabu Anom Doko	1	1	1
	- Mbah Suko (Memetri) Ds. Katang, Ngasem	1	1	1
	- Pelestarian Budoyo Botoputih, Plosoklaten	1	1	1
	- Lestari Budoyo Setono Lilir, Kandat	1	1	1
	- Sesaji Tirtohusodo, Sukowono, Ironggolo- Mojo	1	1	1
	- Ritual Sesaji Ki Onggomerto (Sedekah Bumi), Kepung	1	1	1
	- Ritual Tiban Purwokerto, Ngadiluwih	1	1	1
	- Kebur Banyu, Ubalan, Plosoklaten	1	0	1
	- Mendhem Golekan, Kandangan	1	1	1
	- Nyadran Mbah Kabul, Ngasem	1	1	1
	- Bersih Desa Jabon, Banyakan (KA Suryo Hadi Kusumo)	1	1	1
	- Nyadaran Suran	1	1	1

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
	- Ziarah Makam Syech Abdul Mursyad, Grogol	1	1	1
	- Bersih Desa Larungan, Semen	1	1	1
	- Ritual Sesaji Dam Sumberpucung Galuhan, Kandat	1	1	1
	- Grebeg Tumpeng Desa Bangsongan, Kayen Kidul	1	1	1
	Sub Jumlah	**24**	**23**	**24**
B.	**Festival Seni Budaya :**			
1.	Festival Tari Kontemporer/Tradisi	0	1	1
2.	Pagelaran Kesenian Daerah	128	343	323
	Sub Jumlah	**128**	**344**	**324**
C.	**Pengiriman Duta/Tim Kesenian :**			
1.	Pengiriman Duta/Team Kesenian ke berbagai daerah/Provinsi	18	3	4
	Sub Jumlah	**18**	**3**	**4**
1.	Pembinaan Seniman dan Organisasi Kesenian	**2**	**1**	**0**
	JUMLAH	**172**	**371**	**352**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2023
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Adapun perkembangan kelompok kesenian selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.49 berikut :

Tabel 2.49 Perkembangan Kelompok Kesenian Tahun 2022 – 2024

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
A.	**KELOMPOK SENI TRADISIONAL:**	**697**	**625**	**815**
1.	Jaranan	562	492	665
2.	Tiban	5	4	2
3.	Reog	7	7	4
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	0	1
5.	Wayang Orang	1	0	1
6.	Wayang Krucil	2	3	2
7.	Wayang Suluh	18	18	0
9.	Karawitan	0	0	15
10.	Waranggono	29	18	37
11.	Ludruk	18	18	18
13.	Jemblung	4	3	3
14.	Macapat	0	0	0
15.	Kethoprak	4	4	3
16.	Pramugari	8	8	6
18.	Pencak silat	6	6	4
19.	Gala Ganjur	3	4	3
20.	Batengan	0	0	0
B.	**SANGGAR SENI :**	**49**	**48**	**54**

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Sanggar Tari	48	47	48
2.	Sanggar Lukis	1	1	6
3.	Teater	0	0	0
C.	**KELOMPOK SENI MUSIK :**	**898**	**1.038**	**1084**
1.	Orkes Melayu	380	333	470
2.	Campursari	85	79	122
3.	Band	6	5	24
4.	Qosidah	5	5	5
5.	Hadrah (sholawat , rebana , banjari , terbangan , jedor)	304	504	283
6.	Keroncong	7	4	8
7.	Electone	104	102	168
8.	Drumband	3	6	0
9.	Musik Patrol	2	0	3
10.	Angklung	1	0	1
D.	**KELOMPOK PELAWAK**	2	0	2
1.	Lawak	2	0	2
E.	**KELOMPOK MC**	4	4	4
1.	Pranotocoro	4	4	4
D.	**KELOMPOK FASHION**	1	1	1
1.	Fashion Carnival	1	1	1
Jumlah		**1.256**	**1.532**	**1.650**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Sejalan dengan perkembangan kondisi seni budaya di Kabupaten Kediri, maka pembangunan seni budaya daerah terus diupayakan pada peningkatan pengembangan nilai seni dan pengelolaan budaya daerah. Hal ini terus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi di berbagai event seni budaya baik skala regional maupun nasional. Keberhasilan pengembangan di bidang ini dipengaruhi oleh :

1) Faktor geografi Kabupaten Kediri yang letaknya strategis;
2) Banyaknya objek wisata yang berpotensi sebagai wisata unggulan serta peran aktif seniman dan budayawan dalam mengembangkan seni budaya daerah;
3) Adanya beberapa destinasi wisata baru yang sangat potensial untuk menarik kunjungan wisata;
4) Meningkatnya kerjasama antar daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; dan
5) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana pariwisata, *event-event* promosi pariwisata dan pagelaran seni budaya.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah urusan wajib non pelayanan dasar dapat diukur dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi buku, sumber

daya manusia, sarana prasarana dan keterjangkauan layanan perpustakaan. Hal ini dalam upaya meningkatkan tumbuh kembangnya budaya baca dan literasi di masyarakat. Salah satu prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang beradab adalah meningkatnya minat baca di masyarakat melalui gerakan gemar membaca.

Kinerja urusan perpustakaan indeks minat baca masyarakat kabupaten kediri tercapai 97,88% pada tahun 2024, dan presentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebesar 89,35%. adalah sebagaimana tabel 2.50 berikut :

Tabel 2.50 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2022 - 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Indeks Minat Baca Masyarakat**			
	a. Target	62	64	66
	b. Realisasi	61,3	62,2	64,6
	c. Capaian (b:a)	98,87	97,19	97,88
2.	**Persentase masyarakat yang melakukan Kunjungan Ke Perpustakan**			
	a. Target	8,02	9,25	11,74
	b. Realisasi	5,47	11,74	10,49
	c. Capaian (b:a)	68,20	126,92	89,35

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.2.17 Kearsipan

Kebijakan urusan kearsipan dilaksanakan dalam upaya pelestarian dan penyelamatan dokumen daerah. Pada tahun 2023 indeks pengawasan kearsipan sebesar 81,64 mengalami kenaikan menjadi 80,67 pada tahun 2023 atau tercapai 98,81%, pengawasan kearsipan menjadi bagian penting pemerintahan. Pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, demikian juga tertib arsip pada OPD terus mengalami peningkatan. Adapun pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 – 2024 tampak sebagaimana tabel 2.51 berikut :

Tabel 2.51 Perkembangan Kinerja Kearsipan Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1	**Indeks Pengawasan Kearsipan**			
	a. Target	69,75	71,60	81,64
	b. Realisasi	79,43	81,64	80,67
	c. Capaian (b:a)	113,88	114,02	98,81
2	**Persentase OPD yang tertib arsip**			
	a. Target	58,57	62,86	68,06
	b. Realisasi	24,64	68,06	93,06
	c. Capaian (b:a)	42,07	108,27	136,73

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.3 Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang perikanan bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, pelestarian sumber daya perairan umum, peningkatan sarana prasarana perikanan, kontes ikan dan program-program lain dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sehat dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, tujuan ekonomis lainnya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan dan olahannya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ikan. Perkembangan produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel 2.52 berikut :

TABEL 2.52 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN TAHUN 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Produksi perikanan budidaya :			
	- Pembesaran (Ton)	23.094,15	23.996,40	24.687,82
	- Ikan hias (ribu ekor)	352.599,80	369.804,79	388.412
	- Benih ikan (juta ekor)	21.114,356	21.457,55	21.544,63
2.	Tingkat konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42,07	46,33	47

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi jumlah produksi perikanan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 umumnya mengalami peningkatan. Peningkatan produksi perikanan meliputi realisasi produksi perikanan budidaya pembesaran sebesar 691,425 ton atau 2,88%, ikan hias sebesar 18.607,21 ribu ekor atau 5,03%, dan benih sebesar 87,086 juta ekor atau 0,41%. Selanjutnya, perkembangan realisasi konsumsi asal ikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu realisasi konsumsi asal ikan tahun 2023 sebesar 46,33 (kg/kapita/tahun), sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 47 (kg/kapita/tahun), dengan demikian konsumsi ikan mengalami peningkatan sebesar 0,67 kg/kapita/tahun atau 1,45 %.

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja program pengelolaan perikanan budidaya tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra umumnya sudah melampaui target yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang juga merupakan penyebab keberhasilan peningkatan kinerja antara lain melaksanakan kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB; pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan); sosialisasi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru; pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar); sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan; penguatan kelembagaan melalui kegiatan *workshop* kelembagaan perikanan dan penilaian kelas kelompok budidaya ikan; upaya perluasan pemasaran melalui kontak bisnis juga kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan.

Lebih lanjut, pencapaian angka konsumsi ikan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra telah melampaui target yang ditetapkan bahkan juga melampaui revisi target yang ditetapkan untuk tahun 2024 tapi belum melampaui tingkat konsumsi asal ikan Provinsi Jawa Timur (51,45 kg/kapita/tahun) dan masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan nasional (62,5 kg/kapita/tahun).

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja yaitu pelatihan pengolahan berbahan dasar ikan (lele dan patin) terhadap poklahsar dan masyarakat; mengadakan bazar online produk - produk olahan berbahan dasar ikan; mengadakan kegiatan Makin Kece Sekali (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada lagi) untuk meningkatkan konsumsi ikan; pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pengolah perikanan) berupa peralatan produksi pengolahan ikan; pendampingan sertifikasi SKP, BPOM dan halal; juga lomba cipta menu dalam rangka memasyarakatkan makan ikan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tumbuh dan berkembangnya pembangunan kepariwisataan didukung oleh infrastruktur dan sarana prasana maupun kuantitas dan kualitas SDM sektor kepariwisataan atau lazim dengan istilah pelaku industri pariwisata, yang bergerak di bidang usaha dan jasa kepariwisataan. Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata diharapkan mampu berkontribusi dalam penerimaan PAD Kabupaten Kediri.

Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, hal ini disebabkan karena sudah mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perbaikan di sektor pariwisata secara bertahap.

Adapun pembangunan kepariwisataan pada tahun 2022- 2024 adalah sebagaimana tabel 2.53 berikut :

TABEL 2.53 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Jumlah Kunjungan Wisata yang tercatat (orang)	1.307.815	2.521.454	2.806.417
2.	% Peningkatan destinasi wisata	7,31	6,97	10,46
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,40	9,79	
4.	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9,459	18,31	10,95

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki* *** Angka sementara*

2.1.3.3.3 Pertanian

Arah kebijakan pertanian dan perkebunan yaitu meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memadukan sub sistem sarana prasarana, produksi, distribusi dan pemasaran secara terintegrasi dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal wilayah dengan strategi :

1) Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengendalian hama penyakit, penanggulangan dampak bencana alam banjir dan kekeringan serta memperkecil *losses* (kehilangan/susut hasil sebagai akibat dari penanganan panen dan pasca panen);
2) Memenuhi sarana dan prasarana *on-farm* untuk petani mulai dari ketersediaan pupuk, ketersediaan benih/bibit, pestisida, alat mesin pertanian, infrastruktur pertanian (berupa jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani dan jalan produksi) sampai dengan memulihkan kembali kesuburan tanah lahan pertanian dan optimalisasi lahan dengan sumur bor dalam maupun dangkal untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP);
3) Pengembangan agribisnis pertanian mulai dari sarana produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan sampai pemasaran hasil;
4) Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian melalui pelatihan-pelatihan, sekolah lapang, demplot dan sosialisasi serta laboratorium lapang;
5) Memenuhi ketersediaan data dan informasi sebagai pendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

6) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha tani dan pemanfaatan pekarangan serta peningkatan produktivitas;
7) Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan.
8) Peningkatan peran Perusahaan berbasis potensi lokal dalam akses jaringan pasar.

Jumlah produksi bahan pangan utama pada tahun 2024 yaitu 813.072 ton meningkat dari tahun 2023 dan jumlah produksi hasil Perkebunan juga meningkat dari tahun 2023 sebesar 2.378.490 ton menjadi 2.433.480 ton di tahun 2024. Nilai produksi pertanian dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.54 berikut :

TABEL 2.54
NILAI PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2021 - 2023

No	Formula	2022	2023*	2024**
1.	Jumlah produksi bahan pangan utama (Ton)	809.536	812.266	813.072
2.	Jumlah produksi hasil Perkebunan (x10 Ton)	239.642	237.849	243.348

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Prioritas Intervensi Pemerintah Kabupaten Kediri fokus pada peningkatan sektor pertanian, kelestarian sumber daya alam, dan penyediaan pangan yang berkelanjutan, melalui :

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Perekonomian Daerah:
   a. Meningkatkan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:
   b. Meningkatkan Produktivitas dan NilaiTambah Pertanian:
      - Memanfaatkan teknologi, infrastruktur,SDM, dan akses pasar;
      - Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
      - Memperkuat kelembagaan petani melalui korporasi, koperasi, permodalan, informasi pasar, dan partisipasi kebijakan.
   c. Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam:
      - Menerapkan praktik berkelanjutan,pelestarian hutan dan lahan.
      - Memberikan edukasi masyarakat tentang kelestarian lingkungan.
2. Evaluasi Ketersediaan Pangan dan Mengatasi Potensi Permasalahan:
   a. Evaluasi Ketersediaan Pangan:
      - Mengukur persentase peningkatan ketersediaan pangan disetiap tahunnya.
   b. Potensi Permasalahan:
      - Antisipasi kenaikan harga pangan;
      - Pengelolaan cadangan pangan sesuai SEMENDAGRI No. 500.1.7/339/SJ.
      - Program Petani Milenial.
   c. Upaya Pemerintah:
      - Menjaga stabilitas harga pangan;

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- Program Petani Milenial.

3.1. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum produksi bahan pangan utama tahun 2024 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun yang mengalami kenaikan adalah komoditas padi, jagung, dan ubi jalar, sementara komoditas ubi kayu mengalami penurunan. Faktor dominan yang menyebabkan penurunan produksi ubi kayu dikarenakan menurunnya luas tanam dan panen akibat petani lebih tertarik ke komoditas lainnya. Sedang produktivitas 3 tahun terakhir mengalami peningkatan untuk komoditas padi dan ubi jalar. Untuk tanaman pangan, pengaruh pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) mempengaruhi terjadinya pergeseran tanam dari jagung ke tanaman padi.

Produktivitas buah-buahan utama tahun 2024 seperti : nanas, mangga, sirsat, durian, alpukat, papaya, nangka, salak, sawo, duku, jambu biji, dan jeruk mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan peningkatan intensifikasi budidaya dan iklim yang mendukung.

Namun demikian, kenaikan produktivitas pada sebagian besar komoditas, belum mampu menutupi penurunan produksi yang diakibatkan oleh menurunnya luas tanam dan panen. Untuk itu upaya peningkatan produktivitas harus terus ditingkatkan, baik melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, peningkatan kesuburan tanah, penggunaan teknologi pertanian, sistem tanam, maupun dengan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), sehingga laju penurunan produksi akibat penurunan luas tanam dan panen bisa diminimalisasi.

Tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara lebih rinci seperti pada tabel 2.55 berikut :

TABEL 2.55 PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2022 – 2024

NO	U R A I A N	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
I.	**Produksi Pertanian**			
A.	**Produksi Bahan Pangan Utama (Ton)**			
1.	Padi	297.940	299.202	299.270
2.	Jagung	335.791	339.501	353.309
3.	Ubi Kayu	157.407	154.935	138.727
4.	Ubi Jalar	18.398	18.627	21.808
B.	**Produksi Sayuran Utama (Ton)**			
1.	Bawang Merah	15.649	11.571	11.396
2.	Cabe Besar	10.309	5.255	5.274
3.	Cabe Kecil	42.491	46.202	51.392
C.	**Produksi Buah - Buahan Utama (Ton)**			
1.	Nanas	160.992	165.370	175.101
2.	Mangga	110.029	102.190	66.840

NO	U R A I A N	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
3.	Sirsat	7.153	7.356	8.692
4.	Durian	13.261	16.728	16.974
5.	Alpukat	13.603	13.891	20.076
6.	Pepaya	9.823	8.115	9.822
7.	Pisang	16.104	42.447	21.883
8.	Nangka	7.359	3.195	4.100
9.	Rambutan	11.239	10.989	10.832
10.	Salak	615	4.360	1.299
11.	Sawo	1.806	2.174	4.742
12.	Blimbing	1.142	1.339	1.500
13.	Duku / Langsep	43	50	52
14.	Jambu Biji	2.645	3.106	3.200
15.	Jeruk	9.539	11.689	13.000
D.	**PRODUKSI PERKEBUNAN (X 10 Ton)**			
1.	Tebu	239.452	237.777	243.201
2.	Kakao	33	49	44,9
3.	Kopi	25	29	55,4
4.	Cengkeh	27	33	33,7
5.	Kelapa	104	92	77
II.	**Produktivitas Tanaman Pangan Utama**			
A.	**Produtivitas Bahan Pangan Utama (Ton/Ha)**			
1.	Padi	6,18	6,20	6,23
2.	Jagung	6,72	6,75	6,88
3.	Ubi Kayu	39,07	38,88	43,70
4.	Ubi Jalar	37,56	38,33	43,44
B.	**Produktivitas Sayuran Utama (Ton/Ha)**			
1.	Bawang Merah	7,22	7,52	7,79
2.	Cabe Besar	7,43	7,44	7,76
3.	Cabe Kecil	6,62	6,76	6,99
C.	**Produktivitas Buah-Buahan Utama (Ton/Ha)**			
1.	Nanas	80,78	82,71	82,75
2.	Mangga	8,46	8,71	8,99
3.	Sirsat	8,4	8,67	11,78
4.	Durian	8,06	8,05	8,32
5.	Alpukat	8,02	9,29	11,89
6.	Pepaya	45,42	62,16	65,09
7.	Pisang	11,61	19,56	15,06
8.	Nangka	4,38	4,56	4,58
9.	Rambutan	4,98	5,86	5,66
10.	Salak	17,04	13,03	13,05
11.	Sawo	5,49	6,39	6,5
12.	Blimbing	7,30	7,53	7,60
13.	Duku / Langsep	4,67	5,95	5,96

NO	U R A I A N	T A H U N		
		2022	2023*	2024**
14.	Jambu Biji	14,77	15,41	15,42
15.	Jeruk	15,70	24,46	26.00
D.	**Produktivitas Perkebunan (Ton/Ha)**			
1.	Tebu	108,16	106,07	109,83
2.	Kakao	0,64	0,71	0,69
3.	Kopi	0,54	0,59	0,57
4.	Cengkeh	0,19	0,24	0,26
5.	Kelapa	0,42	0,39	0,42
6.	Tembakau		1,47	1,51

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Pengembangan agribisnis untuk penumbuhan dan pengembangan unit usaha pertanian yang dikelola oleh petani/kelompok tani di pedesaan atau di sentra produksi mulai dari hulu yakni usaha yang bergerak di bidang sarana produksi dan alat mesin pertanian sampai dengan hilir yakni usaha yang bergerak di bidang pengolahan/ *processing* dan pemasaran hasil pertanian, berupa produk segar maupun olahan jadi dan setengah jadi. Penerapan agribisnis secara produktif dan efisien dapat menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi di pasar. Di samping itu dengan berkembangnya usaha pertanian di pedesaan dan kluster- kluster produk berbasis potensi lokal dapat memperluas kesempatan kerja.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun kewenangan kabupaten/kota pada sub urusan energi baru terbarukan berupa penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Terkait sub urusan mineral dan batu bara yang di dalamnya termasuk izin pertambangan, kabupaten/kota hanya memfasilitasi pemerintah pusat dan provinsi.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Urusan perdagangan dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain meliputi tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di dalam mendorong iklim berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat baik melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan berupa revitalisasi pasar dan rehabilitasi pasar, perencanaan pembangunan pasar dan perencanaan kawasan industri kabupaten, misi dagang, pameran, pelatihan ekspor impor, serta pelatihan pada Industri Kecil Menengah (IKM) yang semuanya berorientasi kepada pengembangan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kediri.

Capaian sasaran strategis perdagangan yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan nilai ekspor tahun 2024 sebesar 63.980,80 ribu USD mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 62.509,74 ribu USD. Perkembangan urusan perdagangan pada tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.56 berikut :

Tabel 2.56 Perkembangan Urusan Perdagangan Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**Volume perdagangan**			
	Perkembangan ekspor :			
	a. Nilai ekspor daerah (ribu US $)	60.161,28	62.509,74	63.980,80
	b. % Pertumbuhan ekspor	-22,29%	3,90%	2,35%

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Perkembangan nilai ekspor dan impor menurut komoditas kurun waktu tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.57 berikut :

TABEL 2.57 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR MENURUT KOMODITAS TAHUN 2022 - 2024

(US $)

	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
I.	**EKSPOR**			
1.	Produk industri Kertas	24.404.728.79	14.391.641,65	17.636.581,38
2.	Produk berbahan kayu/Triplek	32.853.106,84	44.956.413,82	39.411.123,15
3.	Bahan Kimia	-	-	15.35.971
4.	Produk Pertanian	75.061,82	1.324.741,23	2.620.555,90
5.	Snack Wafer Chocolate	-	-	-
6.	Bonggol Jagung	2.820..850,54	1.836.952,68	1.874.013,02
7.	Nanas	5.580,68		-
8.	Kopi	1.950,0		-
9.	Daun Tebu			832.544,25
10.	Bagasse			33.589,91
11.	Alat Elektronik			21.793
12.	Arang Kayu			14.628,37
	Jumlah	**60.161.278,68**	**62.509.749,39**	**63.980.800,00**

	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
II.	**IMPOR**			
1.	Bahan Baku Kertas/Pulp	104.098.656,75	97.435.588,55	104.766.450,42
2.	Chemical	10.100.224,62	3.141.283,33	5.079.647,50
3.	Spareparts	53.006.623,34	15.520.540,95	14.996.064,65
4.	Lobak	119.600	-	-
5.	Sawi	46.000	-	
6.	Bahan Baku Mur, Baut, Skrup	118.631,11	75.492,29	79.153,95
7.	Mesin Pembuat Roti/Biscuit	-	-	
8	Accecories	-	-	
9	Jasa	-		
10	Produk berbahan kayu	661.034,82	-	
11	Benih pertanian	-	139.700,00	288.318
	Jumlah	**168.159.726,61**	**116.312.605,24**	**125.209.634,51**

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.3.6. Perindustrian

Pembangunan industri daerah diarahkan pada sektor industri yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan industri. Penyelenggaraan urusan industri dilaksanakan melalui program peningkatan kemampuan teknologi industri yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan. Perkembangan jumlah unit usaha industri tahun 2023 sebesar 1.105 unit usaha. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2022 pada jenis industri kecil dan industri sedang, sebagaimana tabel 2.58 berikut :

TABEL 2.58 PERKEMBANGAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2021 - 2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022*	2023**
1.	Jenis Usaha (Unit)			
	- Industri Kecil/Rumah Tangga	1.002	1.051	1.100
	- Industri Sedang/Menengah	15	16	18
	- Industri Besar	38	38	44
	Jumlah	**1.055**	**1.105**	**1.162**
2.	Tenaga Kerja (Orang)			
	- Industri Kecil	17.317	18.080	18.587
	- Industri Menengah/Sedang	669	673	689
	- Industri Besar	16.720	16.720	17.822
	Jumlah	**34.706**	**35.473**	**37.098**

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Kenaikan jumlah unit usaha industri berjalan paralel dengan perkembangan nilai investasi dan nilai produksi industri tahun 2022 - 2024 setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana table 2.59 berikut :

TABEL 2.59 NILAI INVESTASI DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI TAHUN 2022 – 2024

TAHUN	NILAI INVESTASI		NILAI PRODUKSI	
	Jumlah (Ribuan Rp)	%^ thd. Tahun yl	Jumlah (Ribuan Rp)	% ^ thd. Tahun yl
2022	2.500.649.421.419	-	2.241.508.919.449	-
2023*	5.160.371.453.981	106,36%	4.519.001.295.742	101,61%
2024**	10.985.370.630.608	112,88%	7.326.013.237.252	62,12%

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.3.7. Transmigrasi

Sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan penyediaan lapangan kerja lokal, Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program Transmigrasi dengan pendekatan baru. Program ini menjadi alternatif untuk mewujudkan pemerataan penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Pada tahun 2023, minat masayarakat kabupaten kediri terhadap program transmigrasi masih tergolong tinggi. Namun, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan lokasi tujuan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, lokasi yang ditawarkan seringkali tidak sesuai dengan preferensi calon transmigran. Tantangan lainnya adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran untuk survey lokasi dan pendampingan pemberangkatan di daerah tujuan, yang turut mempengaruhi kemampuan pelaksanaan program.

Perkembangan pelayanan transmigrasi Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 2.60 berikut :

TABEL 2.60
PERKEMBANGAN PELAYANAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022 – 2024

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Jumlah kerjasama dengan daerah tujuan penempatan transmigran	1	1	1

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
2.	% Calon transmigran yang lolos diseleksi	100	100	14
3.	Calon transmigran yang dilatih	10 Orang	1 Orang	1 Orang
4.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	3 KK	1 KK	1 KK
5.	% Jumlah transmigran dilatih yang diberangkatkan	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Berdasarkan data tabel diatas, Pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Kediri menunjukkan perkembangan yang stabil pada beberapa indikator kinerja, meskipun masih menghadapi tantangan dalam beberapa aspek selama periode 2022 hingga 2024.

Indikator Jumlah Kerja Sama dengan Daerah Tujuan Penempatan Transmigran tetap konsisten, dengan satu kerja sama yang terjalin setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kestabilan hubungan dengan daerah tujuan penempatan, meskipun tidak ada peningkatan jumlah kerja sama baru.

Pada indikator Persentase Calon Transmigran yang Lolos Seleksi, terlihat angka 100% pada tahun 2022 dan 2023. Namun, angka ini menurun drastis menjadi 14% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan kuota lokasi tujuan yang tersedia dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat yang mendaftar, serta kurangnya kesesuaian lokasi dengan preferensi calon transmigran.

Jumlah Calon Transmigran yang Dilatih juga mengalami penurunan signifikan, dari 10 orang pada tahun 2022 menjadi hanya 1 orang pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menggambarkan tantangan dalam menyediakan pelatihan yang optimal bagi calon transmigran.

Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan juga menunjukkan penurunan, dengan 3 Kepala Keluarga (KK) diberangkatkan pada tahun 2022 , menjadi hanya 1 KK pada tahun 2023 dan 2024. Meski begitu, Persentase Jumlah Transmigran Dilatih yang Diberangkatkan tetap mencapai angka 100% di seluruh periode, yang mencerminkan keberhasilan dalam memberangkatkan seluruh peserta pelatihan yang telah memenuhi syarat.

Data ini menunjukkan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Kediri tetap berjalan meskipun menghadapi kendala, seperti keterbatasan kuota lokasi tempat tujuan dan preferensi calon transmigrant

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Proses perencanaan dilakukan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode salah satunya Tematik, Holistik, Integral, Spasial (THIS) dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Upaya untuk mensinergikan antara visi, misi dan program/kegiatan dilakukan dengan memverifikasi, menganalisis, dan memformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD atas penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah “Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai pada tahun 2024 dalam rangka penunjang daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel 2.61 berikut :

TABEL 2.61
TINGKAT EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2024

No	INDIKATOR	Target 2024	Realisasi 2024**	% Capaian
1.	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	95	100	100
2.	Persentase PD yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	95	100	100
3.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kediri, Tahun 2024
*** Angka sementara*

2.1.3.4.2 Keuangan

Fungsi penunjang bidang keuangan dilaksanakan dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan daerah.

2.1.3.4.2.1 Keuangan dan Aset Daerah

Capaian sasaran strategis bidang keuangan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Wajar Tanpa Pengecualian dalam rangka menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 kali berturut-turut. Opini WTP berarti Laporan Keuangan (LK) disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.1.3.4.2.2 Pendapatan Daerah

Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 636.075.970.326,88 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp.712.307.489.035,96. Hal tersebut terjadi karena penurunan komponen PAD yakni Lain-lain PAD yang sah yaitu komponen BLUD.

Pelaksanaan urusan keuangan pada pendapatan daerah sebagaimana tabel 2.62 berikut :

TABEL 2.62
PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022 - 2024

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Realisasi PAD (Rp)	649.630.917.159,76	636.075.970.326,88	712.307.489.035,96
2.	Peningkatan PAD (%)	26,44	- 2,09	11,98
3.	Kontribusi PAD thd Pendapatan Daerah (%)	21,23	20,11	21,50
4.	Kontribusi PAD thd Belanja Daerah (%)	20,60	19,34	21,44
5.	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah : (%)			
	1) Pajak	17,77	7,74	9,00
	2) Retribusi	- 1,38	6,43	16,95

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menjalankan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas kerja dan prestasi aparatur harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan. Dalam mewujudkan sistem kepegawaian, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian dilakukan melalui evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai. Pembangunan kepegawaian/aparatur pemerintah meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah
2. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Pembinaan dan pengembangan aparatur
4. Peningkatan kedisiplinan

Pembangunan kepegawaian digambarkan melalui empat aspek, yaitu kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, meningkatnya kapasitas penyelenggaraan diklat, pengelolaan aparatur yang profesional, dan kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tabel 2.63 berikut :

TABEL 2.63
PERKEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2022 - 2024

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2022	2023	2024
A	**Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah**			
1.	% Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan :			
	a. Struktural	74,06	82,80	86,69
	b. Teknis	88,35	81,51	82,54
	c. Fungsional	45,63	48,63	48,70
2.	% Kelulusan peserta pendidikan dan latihan:			
	a. Struktural	100	100	100
	b. Teknis	100	100	100
	c. Fungsional	100	100	100

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2022	2023	2024
B	**Kapasitas penyelenggaraan Diklat**			
1.	% penyelenggaraan pendidikan dan latihan:			
	a. Struktural	100	100	100
	b. Teknis	100	100	100
	c. Fungsional	100	100	100
C	**Kapasitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian**			
1.	% Pemenuhan jumlah pejabat dibanding dengan jumlah jabatan	76,51	84,40	84,22
2.	% Pemenuhan pegawai dibanding dengan kebutuhan	46,76	42,32	38,64
3.	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :			
	a. SK CPNS	-	100	-
	b. SK PNS	100	100	-
	c. SK Pensiun	100	100	100
	d. SK Kenaikan Pangkat	100	100	100
	e. SK Mutasi	100	100	100
	f. SK Gaji Berkala	100	100	100
D	**Pengelolaan Aparatur yang Profesional**			
1.	% Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	74,06	82,8	86,69
2.	% PD yang memiliki jabatan fungsional	37	39	48
3.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai (kasus)	4	3	7
4.	% Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional	45,63	48,63	48,70
5.	% jabatan struktural/eselonering yang terisi	76,51	84,40	84,22
6.	% Jabatan Struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007	79,21	74,56	
E	**Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik**	98,98	99,79	99,8
F	**Indeks Profesionalitas ASN**			
1.	Target	60	63	70,1
2.	Realisasi	54,91	70,1*	81,62**
3.	Capaian	91,52	111,3	116%

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Secara umum, kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu melalui diklat struktural, teknis, dan fungsional. Ketiga kategori pendidikan dan pelatihan tersebut memiliki tingkat kelulusan

sebesar 100% yang diharapkan bisa meningkatkan tingkat profesionalisme dan integritas ASN. Untuk perkembangan jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Kediri pada tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.64 berikut :

TABEL 2.64 PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022 – 2024

(Orang)

No	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	**Jumlah PNS berdasarkan Golongan**			
	a. Golongan I	64	52	15
	b. Golongan II	1.071	1.015	895
	c. Golongan III	4.553	4.357	4.228
	d. Golongan IV	2.348	1.849	1.503
2.	**Jumlah PNS berdasarkan pendidikan**			
	a. SD	39	39	24
	b. SLTP	84	74	53
	c. SLTA	936	812	570
	d. D-1	27	27	1
	e. D-2	222	170	50
	f. D-3/ Sarjana Muda	906	903	804
	g. D-4	141	140	186
	h. Sarjana (S1)	5.294	4.767	4.413
	j. Pasca Sarjana (S2)	381	341	534
	k. Doktor (S3)	6	6	6
3.	**Jumlah PNS yang mengikuti program diklat**			
	a. LPJ (Diklat Prajabatan)	78	23	-
	b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30	60	30
	c. Diklat Kepemimpinan Tk. III	60	30	30
	d. Diklat Kepemimpinan Tk. II	6	5	6
	e. Diklat Teknis/Fungsional	6.242	6.028	7.427
	f. Psikotes	40	100	-
	g. Izin Belajar	92	91	-
	h. Tugas Belajar	8	7	82
	i. Ujian Dinas	-	-	-
	j. Ujian Penyesuaian Ijasah	-	-	50
	k. Orientasi	-	-	-
4.	**PNS yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional**			
	a. Eselon II	19	26	24
	b. Eselon III	186	198	184
	c. Eselon IV	238	244	224
	d. Eselon V	-	-	-
	e. Jabatan Fungsional Tertentu	5.099	5.223	5.031
	f. Jabatan Fungsional Umum	2.494	1.582	1.178
	g. PNS Pensiun	830	743	568
5.	**Jumlah Total PNS**	**8.036**	**7.273**	**6.641**
6.	**Jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisa Jabatan**	**17.187**	**17.187**	**17.187**

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Meningkatnya kinerja kepegawaian berakibat pada turunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Untuk memberikan *punishment* berbagai kriteria sanksi disiplin dikenakan kepada pegawai sebagaimana peraturan perundangan. Adapun jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana tabel 2.65 berikut :

TABEL 2.65
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPATKAN SANKSI DISIPLIN TAHUN 2022 - 2024

(Orang)

NO	JENIS SANKSI DISIPLIN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Ringan	1	1	5
2.	Sedang	1	-	1
3.	Berat	2	2	1

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2023
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk mendorong inovasi, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai penguat daya saing daerah. Urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kajian-kajian yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi yang ada di daerah. Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut :

TABEL 2.66
CAPAIAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2022 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	100	100	100
4.	Persentase kabijakan inovasi yang diterapkan Daerah	100	100	100
5.	Jumlah dokumen penguatan SIDa	1	1	0

Sumber : Balitbangda Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.5 Kelembagaan

Pada tahun 2024 indikator kinerja Perangkat Daerah yang mendapat nilai IKM berkriteria baik adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil / tercapai. Hal ini dapat ditunjukan dengan tersusunnya Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana survey tersebut dilaksanakan pada 2 semester dalam kurun waktu 1 tahun capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 105,01% dengan nilai indeks IKM sebesar 86,35 dengan rincian sebagaimana tabel 2.67 berikut :

Tabel 2.67 Nilai IKM Tahun 2022 – 2024

INDIKATOR	TAHUN		
	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
a. Target	84,00	84,3	84,5
b. Realisasi	85,77	86,38	88,74
c. Capaian (b:a)	102,11	102,46	105,01

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Kediri, Tahun 2024
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Pada tahun 2024 hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, dikarenakan semua Organisasi Perangkat Daerah sudah membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK).

Pada indikator hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, dikarenakan sudah terbentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, yaitu perubahan pada tugas pokok dan fungsi asisten dan perubahan nomenklatur pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan.

Pada indikator ini hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 semua Perangkat Daerah telah dilakukan Analisis Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hasil Analisis Jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri yaitu Keputusan Bupati Kediri

tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah sejumlah 59 Keputusan Bupati Kediri.

Pada indikator ini hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil / tercapai. Hal ini dikarenakan telah tersusunnya rumusan kebijakan dan dilaksanakan pembinaan serta monitoring evaluasi Pelayanan Publik di bidang ketatalaksanaan tiap semester atau menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pada indikator ini hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil / tercapai, hal ini dikarenakan adanya pelatihan/workshop, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di 57 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Perkembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah tahun 2022–2024 sebagaimana tabel 2.68 berikut:

TABEL 2.68 PERKEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 – 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Persentase SAKIP PD yang Berpredikat B	88,8	90,48	96.49
2.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	100	100	100
3.	Persentase Kelembagaan PD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100
4.	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK	100	100	100
5.	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan	100	100	100
6.	Persentase PD yang telah menyusun SOP	100	100	100
7.	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik	92	92	100
8.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku	95	90,78	97,70

Sumber : Bagian Organisasi & BKD Kab. Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.6. Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi dalam pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan tata usaha, perpustakaan, dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun 2023 realisasi sebesar 80,5% dengan capaian 89,4%. Nilai capaian untuk persentase jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu terealisasi sebesar 53,3% di tahun 2023. Peningkatan peran Sekretariat DPRD tahun 2022 – 2024 adalah sebagaimana tabel 2.69 berikut:

Tabel 2.69 Peningkatan Peran DPRD 2022-2024

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	**% Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**			
	a. Target	90,00	90,00	90,00
	b. Realisasi	78,75	80,50	77,8
	c. Capaian (b:a)	87,50	89,40	86,44
2.	**% Jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu**			
	a. Target	90,00	80,00	90,00
	b. Realisasi	78,00	53,30	80,00
	c. Capaian (b:a)	86,00	66,60	88.8
3.	**Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**			
	a. Target	77,00	80,00	91,00
	b. Realisasi	86,25	91,75	92.75
	c. capaian (b:a)	112	114	101.92

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Selain itu, rincian peningkatan peran DPRD tahun 2022 – 2024 sebagaimana tabel 2.70 berikut :

Tabel 2.70 Rincian Kinerja Peningkatan Peran DPRD Tahun 2022 – 2024

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2022	2023*	2024**
1.	**Jumlah pengaduan masyarakat :**			
	- Pengaduan masyarakat yang diterima	18	19	9
	- Ditindaklanjuti	14	17	7
	- Persentase penanganan pengaduan	77,7	89,47	77.8
2.	**Jumlah Perda yang ditetapkan :**			
	- Rancangan Perda diterima dari Bagian Hukum pada tahun bersangkutan	8	12	5
	- Penetapan Perda atas Rancangan Perda yang dibahas pada tahun bersangkutan	7	8	11

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2022	2023*	2024**
	- Persentase penyelesaian	87,5	66,6	220

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.7. Pengawasan

Fungsi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas audit atau pemeriksaan, *review*, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain. Perkembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022-2024 sebagaimana table 2.71 berikut :

TABEL 2.71 PERKEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2022 - 2024

(Persen)

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2022	2023	2024
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab. Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Secara umum pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah telah berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2024 tingkat kapabilitas APIP dan maturitas SPIP dipertahankan pada level 3. Rekomendasi atas penilaian kapabilitas APIP tahun sebelumnya belum bisa dipenuhi (ditindaklanjuti) karena bersamaan dengan beban tugas pelaksanaan PKPT, mulai tahun 2022 diterapkan komponen penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang merupakan sistem baru sehingga SKPD belum mampu melaksanakan.

2.1.3.4.8. Penanggulangan Bencana

Penanganan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
f. pengumpulan dan penyaluran uang dan barang kepada korban terdampak bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan suatu perangkat penilaian berupa indeks yang memberikan informasi tingkat risiko bencana. Semakin rendah capaian indeks berarti semakin baik dengan semakin rendahnya risiko bencana yang mengancam sehingga semakin minim risiko kerugian terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kediri masuk dalam kategori sedang dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 112,47, tahun 2023 sebesar 104,53, kemudian semakin membaik dengan capaian indeks 97,89 pada tahun 2024. Selanjutnya persentase masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menghadapi, mampu mengenali ancaman bencana di wilayahnya, serta mampu mengurangi risiko bencana dan memulihkan diri dari bencana. Persentase masyarakat tangguh bencana di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 – 2024 konsisten capaiannya sebesar 100%.

Kemudian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu daerah terhadap berbagai risiko dan ancaman terhadap bencana serta kapasitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Indeks Ketahanan Kabupaten Kediri pada tahun 2022 – 2024 konsisten mengalami peningkatan nilai capaian indeks. Capaian IKD pada tahun 2022 sebesar 0,59, pada tahun 2023 sebesar 0,63, dan pada tahun 2024 sebesar 0,67. Adanya konsistensi peningkatan Indeks Ketahanan Daerah ini menggambarkan kondisi Kabupaten Kediri yang semakin baik dalam upaya peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman risiko bencana.

Capaian penanganan penanggulangan bencana daerah tahun 2021-2023, adalah sebagaimana tabel 2.72 berikut :

Tabel 2.72 Capaian Penanganan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 - 2024

No	JENIS KASUS	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Indeks Resiko Bencana	112,47	104,53	97,89
2.	% Masyarakat Tangguh Bencana	100%	100%	100%
3.	Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,63	0,67

Sumber : BPBD Kab. Kediri, Tahun 2024

2.1.3.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya peningkatan kerukunan, kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat di Kabupaten Kediri menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Kediri, mengingat tingkat heterogenitas agama yang ada di masyarakat serta banyaknya aktivitas masyarakat yang diwarnai oleh aktivitas pelaksanaan keyakinan atau keagamaan. Sesuai dengan data hasil laporan beberapa kegiatan selama 3 (tiga) tahun

terakhir yaitu Wawasan Kebangsaan, persentase penanganan konflik agama serta peran aktif Tokoh Agama memperoleh capaian cukup bagus dengan rata-rata hasil capaian 100%.

Sedangkan terkait dengan peningkatan kondusivitas daerah di wilayah Kabupaten Kediri, kegiatan koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pelatihan deteksi dini masyarakat menjadi perhatian utama dalam upaya pencapaian kondusivitas daerah dengan capaian 100%.

Untuk pembinaan dan pengendalian aktivitas politik masyarakat, telah berhasil menumbuhkan etika dan budaya politik yang mengedepankan kepentingan bersama dengan lancarnya penyelenggaran Pesta Demokrasi Pemilu Serentak, meningkatnya peran aktif masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli tentang politik penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Kediri menjadi sebesar 79 pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 77,86.

Adapun perkembangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2022 - 2024 adalah sebagaimana tabel 2.73 berikut :

TABEL 2.73 PERKEMBANGAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2022 - 2024

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023	2024
A	**Kerukunan dan kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat**			
1.	Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	100	100	100
2.	% penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100
3.	% Penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	100	100	100
4.	% Penanganan kejadian konflik terkait poleksosbud dan ketertiban masyarakat	100	100	100
B	**Suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara**			
1.	% tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih	65	65	-Pemilu 83,09 - Pilkada 72,15
2.	% Peningkatan ormas/ LSM yang terdaftar	8,7	8,11	8
C	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	76,71	77,86	79

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Akan tetapi pada tataran pembinaan Ormas terutama terkait persentase pembinaan ORMAS/LSM yang terdaftar sedikit mengalami stagnansi mengingat sejak awal Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 bahwa terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dan LSM sudah menjadi kewenangan Pusat/Mendagri. Adapun perkembangan infrastruktur bidang politik tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 2.74 berikut :

TABEL 2.74
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR POLITIK TAHUN 2022 - 2024

No	U R A I A N	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Partai Politik	9	9	8
2.	Partai Politik peserta Pemilu	18	18	18
3.	Ormas Profesi	10	10	10
4.	Ormas Keagamaan	62	62	62
5.	Ormas Kepemudaan	24	24	24
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat	134	155	158

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator variabel aspek daya saing daerah antara lain :

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mulai menunjukkan pertumbuhan. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tumbuh sebesar 3,06 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,90 persen dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,53 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebagai dampak indikator ekonomi makro nasional.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Penyediaan sarana infrastruktur daerah salah satunya meliputi pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah dapat dipenuhi. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 1.077,20 Km. Sementara itu, kondisi jalan kabupaten kondisi rusak mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 31,74 kilometer pada tahun 2023 menjadi 35,52 kilometer, hal ini ditindaklanjuti pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan terus menerus dengan skala prioritas.

Perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 2.75 berikut :

TABEL 2.75
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2022 – 2024

(km)

No	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1.	Status dan Panjang jalan :			
	a. Pusat	39,936	39,936	39,936
	b. Provinsi	79,616	79,616	79,616
	c. Kabupaten	1.224,20	1.224,20	1.224,20
2.	Kondisi Jalan Kabupaten :			
	a. Baik	1.077,20	968,18	1.065,05
	b. Sedang	115,26	220,50	5,93
	c. Rusak	31,74	35,52	153,22
3.	Panjang jalan kabupaten :			
	a. Jalan beraspal	1.224,20	1.224,20	1.224,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas perlu disikapi secara komprehensif karena hal tersebut merupakan indikasi dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tataran praktis, untuk memperkecil peluang terjadinya kriminalitas masyarakat perlu mengefektifkan pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat keamanan. Pada tataran struktural, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator fokus sumber daya yaitu angkatan kerja dan pengangguran.

2.1.4.4.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Sedangkan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam sebuah perekonomian, semakin tinggi kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada *output* yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting di tengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Angkatan kerja tertampung mengalami peningkatan dari 910.447 pada tahun 2023 menjadi sebanyak 952.912 pada tahun 2024 sehingga berdampak pada menurunnya pengangguran terbuka dari 52.753 pada tahun 2023 menjadi sebanyak 48.568 pada tahun 2024. Angkatan Kerja tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel 2.76 berikut :

TABEL 2.76
ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022 - 2024

No	Indikator	2022	2023*	2024**
1.	Angkatan Kerja	865.206	910.447	952.912
2.	Angkatan kerja tertampung	806.121	857.724	904.344
3.	Pengangguran Terbuka	59.085	52.753	48.568

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab Kediri, Tahun 2024
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan. Evaluasi realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dan target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2.3 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi pada saat rencana sedang dibuat. Untuk mengurangi adanya *gap expectation* yang terjadi akibat kebutuhan dan keinginan masyarakat perubahannya sangat cepat, sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sebagian besar pendanaannya masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Permasalahan pembangunan tersebut sangat erat kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah, permasalahan dengan keterjangkauan layanan dasar masyarakat serta tugas pokok fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan sendiri adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun penghambat perlu dilakukan telaah dan analisis lebih lanjut sehingga menghasilkan perbaikan dan dapat mencapai kinerja pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2026, Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2026, Isu Strategis RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 serta pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah, maka perlu untuk merumuskan isu strategis yang akan menjadi bahan kebijakan perencanaan kegiatan untuk tahun 2026.

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 tidak terlepas dari tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 serta 8 (delapan) agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan;

Isu strategis Provinsi Jawa Timur ada 7 (tujuh) sebagai berikut :

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal;
2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
3. Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Sanitasi & Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal;
5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana;
7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan Pembangunan Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029, maka isu strategis Kabupaten Kediri dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan berfluktuasi sementara kemiskinan ekstrim mengalami penurunan;
2. Angka stunting berdasar SSGI/SKI masih di atas target nasional, walaupun secara bulan timbang sudah mencapai 1 digit;
3. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah sementara harapan lama sekolah meningkat signifikan;
4. Pembangunan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi yang kurang maksimal;
5. Infrastruktur dan konektivitas terutama sebagai dampak proyek strategis nasional;
6. Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Bidang Pendidikan
2. Peningkatan Bidang Kesehatan
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
4. Peningkatan Bidang Pertanian dan Transformasi Ekonomi
5. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Stunting
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

Hubungan antara Isu Strategis Kabupaten Kediri dengan Prioritas Daerah RKPD tahun 2026 sebagaimana tabel 2.77 berikut :

TABEL 2.77
HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIS
DENGAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2026

NO.	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	Angka kemiskinan berfluktuasi sementara kemiskinan ekstrim mengalami penurunan	Percepatan penurunan kemiskinan dan stunting
2.	Angka stunting berdasar SSGI/SKI masih di atas target nasional, walaupun secara bulan timbang sudah mencapai 1 digit	Peningkatan Bidang Kesehatan
3.	Angka rata-rata lama sekolah masih rendah sementara harapan lama sekolah meningkat signifikan	Peningkatan Bidang Pendidikan
4.	Pembangunan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi yang kurang maksimal	Peningkatan Bidang Pertanian dan Transformasi Ekonomi
5.	Infrastruktur dan konektivitas terutama sebagai dampak proyek strategis nasional	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
6.	Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kediri secara umum, yaitu (i) Pembangunan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi yang kurang maksimal (ii) Layanan akses infrastruktur dasar belum optimal, (iii) Fluktuasi angka stunting dan kemiskinan, dan (iv) Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah

dari hasil evaluasi dan proyeksi masa mendatang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2026 :

TABEL 2.78
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026

No.	Permasalahan	Uraian
1.	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Percepatan penurunan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial; b. Percepatan penurunan prevalensi stunting; c. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas Pendidikan; d. Keterjangkauan layanan dan peningkatan kualitas Kesehatan; e. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
2.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	a. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi
3.	Infrastruktur dan Wilayah	a. Infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut juga menggambarkan proyeksi perekonomian tahun berjalan 2025 yang meliputi sasaran-sasaran yang akan dicapai sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah akan menjabarkan (i) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan (ii) Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan proyeksi perekonomian daerah. Arah kebijakan keuangan daerah akan membahas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Pembiayaan pembangunan erat kaitannya dengan kapasitas fiskal daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha dalam mengimplementasikan pembangunan. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia, dengan kata lain bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah dan daya dukung keuangan daerah secara bersama-sama akan menentukan kualitas pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045, RKP Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, serta rancangan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya arah kebijakan ini akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2026 antara lain : peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan fasilitas pendidikan serta meningkatkan pembangunan lingkup pertanian guna mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Kediri optimis di tahun 2026 kondisi perekonomian akan lebih baik. Dengan diterapkannya kebijakan-

kebijakan baru diharapkan kondisi masyarakat akan pulih sehingga diprediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri kembali meningkat.

TABEL 3.1 DATA INDIKATOR MAKRO
PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN KEDIRI

NO	URAIAN	2022		2023*		2024**	
		Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,90	4,95	4,53	4,93	4,95
2.	Tingkat Kemiskinan (Ribu Jiwa)	10,38	10,65	10,35	10,72	9,56	9,95
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,49	6,83	4,88	5,79	4,19	5,10
4.	Rasio Gini	0,371	0,329	0,387	0,306	0,373	0,300

Sumber: BPS Kabupaten Kediri 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel 3.1 dapat dilihat untuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri pada capaian indikator makro yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Rasio bergerak secara fluktuatif mulai dari tahun 2022 sampai 2024.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kediri dapat digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pada RKPD Tahun 2026 ini, penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan 17 lapangan usaha. Gambaran selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kediri pada tahun 2024 adalah sektor **industri pengolahan** yaitu sebesar Rp12.600,94 miliar atau sebesar 22,06% dari total PDRB Kabupaten Kediri. Sektor penyumbang kontribusi terbesar kedua adalah sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** dengan capaian sebesar Rp11.658,03 miliar atau sebesar 21,33% dari total PDRB Kabupaten Kediri pada tahun 2024. Lapangan usaha ini merupakan potensi unggulan dan harus lebih diperhatikan, salah satu contohnya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi usaha tani dan pengembangan pola agroekonomi dan rantai pasok yang didukung oleh lapangan usaha lain yang terkait.

Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.2 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	%	2023*	%	2024**	%	2025***	%
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**10.488,38**	**22,48**	**11.305,74**	**22,32**	**11.658,03**	**21,33**	**11.984,08**	**22,00**
B	Pertambangan & Penggalian	688,38	1,48	754,17	1,48	804,30	1,47	803,22	1,47
C	**Industri Pengolahan**	**10.239,94**	**21,94**	**11.186,17**	**22,09**	**12.600,94**	**23,06**	**12.180,49**	**22,36**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,86	0,07	34,76	0.07	36,38	0,07	37,73	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	26,31	0,06	27,88	0,06	29,87	0,05	29,78	0,05
F	Konstruksi	4.142,94	8,88	4.547,98	8,98	4.899,30	8,96	4.855,45	8,91
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**9.425,65**	**20,20**	**10.280,66**	**20,30**	**11.019,26**	**20,16**	**11.068,57**	**20,32**
H	Transportasi dan Pergudangan	1.038,01	2,23	1.245,74	2,46	1.446,05	2,65	1.388,60	2,55
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	738,60	1,58	850,01	1,68	968,03	1,77	939,34	1,72
J	Informasi dan Komunikasi	2.777,31	5,95	2.987,65	5,98	3.181,67	5,82	3.265,67	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	845,55	1,81	897,53	1,76	939,22	1,72	961,60	1,77
L	Real Estate	943,99	2,02	979,65	1,93	1.048,22	1,92	1.048,18	1,92
M,N	Jasa Perusahaan	133,08	0,29	147,58	0,29	157,99	0,29	158,01	0,29
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib	1.655,70	3,55	1.679,82	3,30	1.862,68	3,41	1.765,14	3,24
P	Jasa Pendidikan	2.240,25	4,80	2.327,35	4,60	2.490,65	4,56	2.480,23	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415,25	0,89	449,69	0,89	483,94	0,89	489,64	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	817,81	1,75	941,81	1,86	1.023,16	1,87	1.020,92	1,87
	JUMLAH PDRB ADHB	**46.665,03**	**100,00**	**50.638,15**	**100,00**	**54.649,67**	**100,00**	**54.476,66**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri

) Angka diperbaiki **) Angka sementara *) Angka Proyeksi*

Mencermati tabel di atas, perekonomian Kabupaten Kediri Tahun 2023 ditopang oleh tiga lapangan usaha yaitu :

- **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp11.658,03 miliar atau sebesar 21,33% dari segi nominal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar Rp11.305,74 miliar, namun dari segi persentase kontribusi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 22,32%.
- **Industri Pengolahan** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp12.600,94 miliar atau 23,06%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar sebesar Rp11.186,17 miliar atau 22,09%.
- **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp11.019,26 miliar atau 20,16%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar Rp10.280,66 miliar atau 20,30%.

Stabilitas dan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut berdampak luas terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Ketiga sektor tersebut dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB merupakan sektor yang potensial untuk menjadi motor perekonomian di Kabupaten Kediri. Maka dari itu perlu didorong dengan kebijakan pembangunan yang tepat untuk dapat memaksimalkan potensi sektor unggulan tersebut.

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Tahun dasar yang digunakan untuk penetapan harga konstan sudah menggunakan tahun dasar 2010. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.3 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2022	%	2023*	%	2024**	%	2025***	%
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**6.131,98**	**19,91**	**6.317,80**	**19,62**	**6.208,51**	**18,38**	**6.472,38**	**19,10**
B	Pertambangan & Penggalian	399,81	1,30	422,20	1,31	447,21	1,32	433,20	1,28
C	**Industri Pengolahan**	**6.639,00**	**21,55**	**6.895,45**	**21,41**	**7.436,96**	**22,01**	**7.335,93**	**21,64**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,62	0,08	26,86	0,08	28,09	0,08	28,36	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,28	0,06	20,00	0,07	21,40	0,06	21	0,06
F	Konstruksi	2.871,10	9,32	3.076,29	9,56	3.294,09	9,75	3.235,47	9,55
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**6.397,46**	**20,77**	**6.744,47**	**20,95**	**7.077,62**	**20,95**	**7.113,92**	**20,99**
H	Transportasi dan Pergudangan	708,99	2,30	779,59	2,43	882,25	2,61	845,16	2,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	439,77	1,43	482,83	1,49	529,67	1,57	515,63	1,52
J	Informasi dan Komunikasi	2.423,12	7,87	2.558,71	7,95	2.704,57	8,01	2.789,44	8,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	546,94	1,78	560,55	1,75	584,33	1,73	586,15	1,73
L	Real Estate	671,91	2,18	690,06	2,14	704,77	2,09	727,86	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	88,49	0,29	94,62	0,29	99,97	0,30	99,23	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.023,09	3,32	1.017,91	3,16	1.094,45	3,24	1.046,91	3,09
P	Jasa Pendidikan	1.566,39	5,09	1.602,41	4,98	1.714,59	5,08	1.688,57	4,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	282,76	0,92	288,66	0,89	304,57	0,90	305,93	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	565,01	1,83	617,10	1,92	654,60	1,94	650,28	1,92
	JUMLAH PDRB ADHK	**30.800,71**	**100,00**	**32.195,50**	**100,00**	**33.787,64**	**100,00**	**33.895,60**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara ***) Angka Proyeksi 2024

Pada tahun 2024 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK yaitu sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp7.436,96 miliar atau sebesar 21,01%. Sektor dengan kontribusi terbesar kedua yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp7.077,62 miliar atau 20,95%. Selain kedua sektor tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar ketiga nilai sebesar Rp6.208,51 miliar atau sebesar 18,38%. Secara keseluruhan pada tahun 2024 PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp33.787,64 miliar, capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan capaian sebesar Rp32.195,50 miliar.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,90%. Namun pada Tahun 2023 ekonomi Kabupaten Kediri mengalami perlambatan menjadi 4,53%. Hal ini akibat dari menurunnya laju pengeluaran konsumsi rumah tangga dari 4,21 pada tahun 2022 menjadi 4,07 di tahun 2023, menurunnya laju pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan tekanan bagi perekonomian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu angka tertinggi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi satu daerah. Pada tahun 2024 ekonomi Kabupaten Kediri tumbuh sebesar 4,95, kenaikan pertumbuhan ekonomi ini menunjukan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya untuk memanfaatkan potensi lokal dalam mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat.

4) Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2024 mengalami peningkatan pada semua sektor, namun terdapat perubahan pola kontribusi yang menunjukkan perubahan struktur penyangga perekonomian Kabupaten Kediri. Sektor penyumbang perekonomian tertinggi tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Namun terjadi perubahan pada penyumbang terbesar kedua dan ketiga pada PDRB pada tahun 2024, dari sebelumnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada peringkat tiga menjadi peringkat dua kontribusi terbanyak terhadap PDRB Kabupaten Kediri. Sebaliknya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menduduki peringkat dua tergeser menjadi peringkat tiga.

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita yang lebih kita kenal dengan pendapatan per kapita didapat dari volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah

penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kediri secara ADHK maupun ADHB pada tahun 2023 mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada akhir tahun 2024 sebesar Rp32,34 juta, naik sebesar Rp2,15 juta dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp30,19 juta. Sejalan dengan capaian pendapatan per kapita ADHB, pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 tercatat sebesar Rp19,99 juta, meningkat Rp0,80 juta dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp19,19 juta. PDRB per kapita Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.4 PDRB PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2022 – 2024

(Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2023*	2024**
1.	ADHB PDRB Perkapita	28,17	30,19	32,34
2.	ADHK PDRB Perkapita	18,60	19,19	19,99

Sumber : BPS Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

6) Perkembangan Harga (Inflasi)

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan tingkat kenaikan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi dan terus-menerus terjadi pada waktu tertentu, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat pula menggambarkan stabilitas perekonomian daerah. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 90 kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Oleh karena itu, data inflasi yang digunakan sebagai rujukan inflasi Kabupaten Kediri adalah data inflasi milik Kota Kediri. Perkembangan inflasi Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.5 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KOTA KEDIRI TAHUN 2022 - 2024

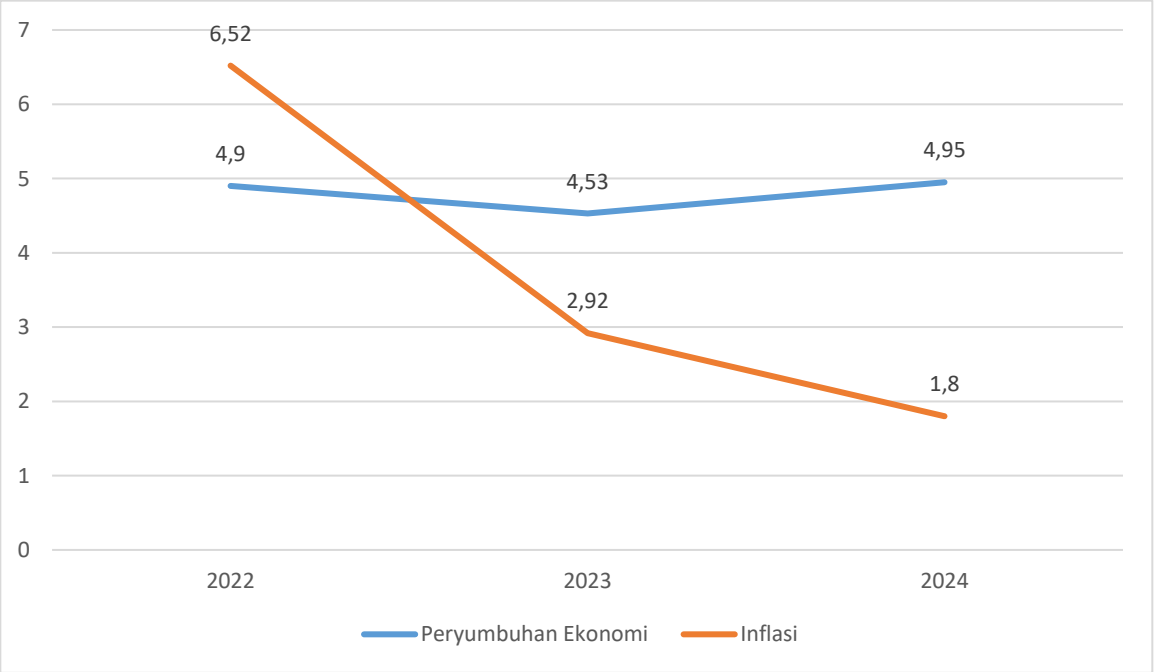
(%)

NO	URAIAN	2022	2023*	2024**
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	4,53	4,95
2	Inflasi Kota Kediri	6,52	2,92	1,19

Sumber: BPS Kabupaten Kediri Tahun 2024
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Laju pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Kota Kediri tahun 2022 – 2024 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI DAN INFLASI KOTA KEDIRI TAHUN 2022 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Melihat data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selain Infrastruktur, Sektor pertanian serta pariwisatanya, pengembangan kawasan industri dan melalui program pelatihan dapat meningkatakan ketrampilan tenaga kerja lokal sehingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri meningkat menjadi sebesar 4,53 dan pada tahun 2024 meningkat lagi sebesar 4,95.

7) Tingkat Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar terlaksana tujuan tersebut perlu didukung dengan faktor-faktor yang menentukan daya

tarik suatu daerah terhadap investasi daerah yaitu faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik.

Perkembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.6 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL/INVESTASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 – 2024

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1	Usaha Baru (Perusahaan)	10.744	16.937	22.117
2	Penyerapan Tenaga Kerja (Org)	58.706	68.501	59.754
3	PMDN dan PMA	146	159	205
4	Nilai Realisasi Investasi	3.180.910.111.886	3.204.083.366.778	4.636.215.436.458
5	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	35,07	26,16	29,99

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Beberapa hal di tahun 2024 yang menjadi perhatian dalam meningkatkan daya tarik investasi antara lain :

a. Penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai untuk pengembangan usaha, diantaranya jalan dan jembatan;
b. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi;
c. Ketersediaan bahan baku dan penyiapan tenaga kerja yang terdidik; dan
d. Pelayanan profesional, cepat dan memuaskan dalam penanganan investasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri diarahkan untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
   Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran.
   Belanja daerah Kabupaten Kediri diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran.
   Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Proyeksi/Target Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber- sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 – 2024, tahun berjalan 2024 dan proyeksi/target pada tahun 2025 – 2026 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.7 REALISASI TAHUN 2023 – 2024 PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI

(Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH	
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**636.075.970.326,88**	**692.872.682.301,00**
4.1.1	Pajak Daerah	268.862.706.928,78	304.720.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	28.141.450.670,00	29.753.090.650,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.392.016.816,90	13.227.527.771,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	327.679.795.911,20	345.172.063.880,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.526.670.467.437,00**	**2.556.513.327.516,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.229.982.070.239,00	2.277.378.367.616,00
4.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	296.688.397.198,00	279.134.959.900,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**721.452.668,00**	**0**
4.3.1	Pendapatan Hibah	721.452.668,00	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
4.3.4	Pendapatan Lainnya	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	**3.163.467.890.431,88**	**3.249.386.009.817,00**

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

TABEL 3.8 REALISASI TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 – 2027

(Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH		
		Tahun Berjalan 2025	Proyeksi /Target tahun 2026	Proyeksi /Target tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**863.184.917.931,00**	**941.327.141.107,00**	**1.015.302.780.474,82**
A.1.	Pajak Daerah	462.396.318.826,00	471.410.476.797,00	480.516.163.717,00
A.2.	Retribusi Daerah	110.879.057.500,00	139.862.511.374,00	41.037.803.073,00
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.990.158.640,00	14.361.833.087,00	14.753.849.842,00
A.4.	Lain-lain PAD yang Sah	275.919.382.965,00	315.692.319.849,00	478.994.963.842,82
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.403.396.894.400,00**	**2.477.929.405.389,00**	**2.394.270.361.100,00**
B.1.	Transfer Pemerintah Pusat	2.285.949.255.000,00	2.365.624.629.989,00	2.276.822.721.700,00
B.2.	Transfer Antar Dareah	117.447.639.400,00	112.304.775.400,00	117.447.639.400,00
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**
C.1.	Hibah	0	0	0
C.2.	Dana Darurat	0	0	0
C.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan per UU	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	**3.266.581.812.331,00**	**3.419.256.546.496,00**	**3.409.573.141.574,82**

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah secara garis besar merupakan proses mengamati dan menggali sumber pendapatan yang dapat diperoleh serta melakukan perkiraan terhadap jenis-jenis sumber dana tersebut. Pembahasan terhadap analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan Kabupaten Kediri diuraikan sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Kabupaten Kediri tahun 2026 pada sisi pendapatan lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat dikurangi menuju pembiayaan mandiri (*self financing*).

Gambaran pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat, oleh karena itu penerimaan daerah yang dapat dipacu dan ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Diarahkan melalui kebijakan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya peningkatan PAD juga akan ditempuh melalui kebijakan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah, meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pajak berbasis teknologi informasi, meningkatkan ketaatan pembayaran wajib pajak daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat.

2. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga mengalami peningkatan khususnya dari laba atas penyertaan modal pada BUMD.

Pada tahun 2024 tercatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp692.872.682.301,00, dengan proporsi terhadap pendapatan daerah sebesar 18,54%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proporsinya terhadap pendapatan daerah tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.9 PERKEMBANGAN PAD DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 – 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI 2026 – 2027

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan daerah (Rp)	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1.	2023	586.353.720.275,00	3.163.467.890.431,88	18,54
2.	2024*	692.872.682.301,00	3.249.386.009.817,00	21,32
3.	Tahun Berjalan 2025	863.184.917.931,00	3.266.581.812.331,00	26,42
4.	Proyeksi 2026**	941.327.141.107,00	3.419.256.546.496,00	26,11
5.	Proyeksi 2027*	915.302.753.475,00	3.565.047.829.550,82	25,67

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri
**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp863.184.917.931,00dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 26,42% dan pada tahun 2026 diproyeksikan naik lagi menjadi Rp891.536.762.963,00 dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 26,11%.

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.10 STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 – 2027

No	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
1.	2023	586.353.720.275,00	2.526.670.467.437,00	721.452.668,00	3.113.745.640.380,00
2.	2024*	692.872.682.301,00	2.556.513.327.516,00	0,00	3.249.386.009.817,00
3.	Tahun Berjalan 2025**	863.184.917.931,00	2.403.396.894.400,00	0,00	3.266.581.812.331,00
4.	Proyeksi 2026**	941.327.141.107,00	2.477.929.405.389,00	0,00	3.419.256.546.496,00
5.	Proyeksi 2027**	915.302.753.475,00	2.649.745.076.076,00	0,00	3.565.047.829.551,00

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri, data diolah
**) Angka diperbaiki **)Angka sementara*

Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi/Target Tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.11 KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD KABUPATEN KEDIRITAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026 – 2027

No.	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3)/(4))
1.	2023	257.953.317.700,00	586.353.720.275,00	43.99
2.	2024*	304.720.000.000,00	692.872.682.301,00	43.98
3.	Tahun Berjalan 2025**	462.396.318.826,00	863.184.917.931,00	53.57
4.	Proyeksi 2026**	471.410.476.797,00	941.327.141.107,00	52.88
5.	Proyeksi 2027**	480.516.163.717,00	915.302.753.475,00	52.50

Sumber : Bappeda dan Bapenda Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **)Angka sementara*

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam

rangka Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Dana Transfer antar Daerah yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Terhadap pendapatan transfer ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kediri secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan bagi hasil bagi daerah.
2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Pada tahun berjalan 2025 proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 73,58% dan pada tahun 2026 naik menjadi 73,89% dari total Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer dan proporsinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 - 2024, tahun berjalan 2025 dan proyeksi/target tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.12 DANA PERIMBANGAN DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 – 2027

No.	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2023	2.526.670.467.437,00	3.163.467.890.431,88	79,87
2.	2024*	2.556.513.327.516,00	3.249.386.009.817,00	78,68
3.	Tahun Berjalan 2025*	2.403.396.894.400,00	3.266.581.812.331,00	73,58
4.	Proyeksi 2026**	2.477.929.405.389,00	3.419.256.546.496,00	73,89
5.	Proyeksi 2027**	2.649.745.076.076,00	3.565.047.829.550,82	74,33

Sumber: Bappeda ,Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan penerimaan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah dengan aktif bekerja sama

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan dapat memperoleh alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui hibah, dana/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lain–lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 dan 2024, tahun berjalan 2025 beserta proyeksi/target pada tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026 – 2027

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2023	721.452.668,00	3.163.467.890.431,88	0,02
2.	2024	0,00	3.249.386.009.817,00	0,00
3.	Tahun Berjalan 2025*	0,00	3.266.581.812.331,00	0,00
4.	Proyeksi 2026**	0,00	3.419.256.546.496,00	0,00
5.	Proyeksi 2027**	0,00	3.565.047.829.550,82	0,00

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kab. Kediri
) Angka diperbaiki) Angka sementara*

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2023 - 2024, tahun berjalan 2025 serta proyeksi/target tahun 2026 - 2027, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Secara bertahap berusaha meningkatkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional;
2. Melakukan program-program untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah;
4. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur;
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil dari provinsi;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah;

7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut; dan
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Kediri, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan pedesaan dan kecamatan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program-program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subjek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Kediri, meskipun terjadi dinamika ekonomi global dan domestik. Belanja daerah dikelola berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Peningkatan tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang berkualitas, memiliki konsekuensi logis dengan meningkatnya kualitas belanja daerah. Di samping itu inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis dan volume kegiatan.

Arah belanja daerah juga mengacu pada prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi. Prioritas pembangunan tersebut diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan daya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga dengan penambahan volume kegiatan menunjukkan peningkatan *coverage* (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Kediri.

Prioritas belanja daerah digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Belanja Daerah merupakan perwujudan dari

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah disusun dengan mengedepankan program prioritas yang sinergi dengan program prioritas nasional maupun provinsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat serta lebih menarik bagi para investor;
c. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan;
d. Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mengantisipasi dan menangani keadaan darurat akibat bencana alam dan bencana sosial;
f. Menguatkan program - program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
g. Belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2023 - 2024, Tahun Berjalan 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 - 2027 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.14 STRUKTUR BELANJA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 – 2027

NO.	URAIAN	REALISASI TA. 2023 (Rp)	REALISASI TA. 2024 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2026 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2027 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**BELANJA**	**3.288.924.911.656,40**	**3.659.923.926.392,00**	**3.451.742.373.257,00**	**3.595.257.424.549,00**	**3.498.233.702.499,82**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.196.425.893.300,31**	**2.557.789.145.560,00**	**2.504.621.510.572,00**	**2.519.435.412.018,00**	**2.520.277.381.839,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.037.290.457.852,41	1.159.102.998.373,00	1.356.081.876.770,00	1.218.238.248.580,50	1.235.412.442.330,50
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	897.026.040.443,90	1.129.659.793.213,00	955.914.464.746,00	1.030.284.403.803,90	1.013.952.179.874,90
5.1.5	Belanja Hibah	204.961.109.059,00	229.046.336.249,00	152.844.943.556,00	229.751.448.356,85	229.751.448.356,85
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	57.148.285.945,00	39.980.017.725,00	39.780.225.500,00	41.161.311.276,75	41.161.311.276,75
5.2	**Belanja Modal**	**483.080.137.961,09**	**404.935.154.394,00**	**277.582.643.517,00**	**382.042.425.648,15**	**359.574.126.815,30**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.368.065.000,00	15.500.000.000,00	6.908.795.600,00	15.000.000.000,00	15.500.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.312.599.441,76	74.248.712.044,00	50.818.915.751,00	48.198.985.313,85	48.198.985.313,85

NO.	URAIAN	REALISASI TA. 2023 (Rp)	REALISASI TA. 2024 (Rp)	APBD TA 2025 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2026 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2027 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	278.354.511.586,00	228.138.168.041,00	127.397.468.910,00	241.640.335.290,90	218.672.036.458,05
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.327.660.166,33	84.985.215.295,00	91.264.894.233,00	75.076.855.043,40	75.076.855.043,40
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.632.801.767,00	1.425.059.014,00	872.569.023,00	1.456.350.000,00	1.456.350.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	84.500.000,00	638.000.000,00	320.000.000,00	669.900.000,00	669.900.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**709.476.100,00**	**15.109.459.688,00**	**17.911.034.168,00**	**15.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	709.476.100,00	15.109.459.688,00	17.911.034.168,00	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**608.709.404.295,00**	**682.090.166.750,00**	**651.627.185.000,00**	**678.779.586.882,85**	**593.382.193.845,52**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	24.509.268.000,00	34.850.304.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	584.200.136.295	647.239.862.750,00	615.127.185.000,00	642.279.586.882,85	556.882.193.845,52

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kab. Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk membiayai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penetapan SiLPA menyesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang setiap tahunnya mengalami penurunan, digunakan untuk mengurangi kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan APBD tahun berikutnya

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   - Pembayaran angsuran pinjaman
   - Pembentukan dana cadangan

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2023, Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 - 2026 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.15 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 - 2024, TAHUN BERJALAN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026 - 2027 DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI

(Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Tahun Berjalan 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2027 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	430.994.937.799,49	335.537.916.575,00	212.660.560.926,00	205.678.297.409,00	112.660.560.926,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	90.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	75.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**520.994.937.799,49**	**410.537.916.575,00**	**212.660.560.926,00**	**205.678.297.409,00**	**112.660.560.926,00**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pembayaran Utang/Kewajiban kepada pihak ketiga	0,00	0,00	24.000.000.000,00	9.677.419.356,00	24.000.000.000,00
6.2	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**60.000.000.000,00**	**0,00**	**27.500.000.000,00**	**29.677.419.356,00**	**24.000.000.000,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**460.994.937.799,94**	**410.537.916.575,00**	**185.160.560.926,00**	**176.000.878.053,00**	**88.660.560.926,00**

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kab. Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 periode ke-1 (satu) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 (dua) RPJMD mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

VISI

"Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju,

Sejahtera, dan Berkelanjutan"

Visi tersebut dijabarkan dalam misi dengan tujuan dan sasaran masing-masing adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing, serta Nasionalis-Religius	
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing serta nasionalis religius. (Indikator : Indeks Pembangunan Manusia dengan target 75,91-76,19)	a. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata (Indikator : Rata-rata Lama Sekolah dengan target 8,33 dan Harapan Lama Sekolah dengan target 13,66) b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Indikator : Usia Harapan Hidup dengan target 75,44) c. Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender di masyarakat (Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga dengan target 63,85 dan Indeks Ketimpangan Gender dengan target 0,343 - 0,342) d. Terwujudnya kehidupan masyarakat nasionalis-religius (Indikator : Indeks

Tujuan	Sasaran
	Harmoni Indonesia dengan target 7,13)
Misi 2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian melalui Pemanfaatan Potensi Lokal.	
Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal (Indikator : Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,06 - 5,13)	Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal (Indikator : PDRB Per Kapita dengan target 39,85 juta)
Misi 3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	
Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif (Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 85,86-86,19)	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik (Indikator : Indeks Pemerintah Digital dengan target 2,1 dan Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,38)
Misi 4 Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur	
Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkeadilan (Indikator : Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,98-4,00)	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan (Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dengan target 72)
Misi 5 Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda	
Berkembangnya daya tarik pariwisata berbasis seni budaya daerah dan potensi unggulan (Indikator : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum dengan target 2,14-2,16)	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata (Indikator : Tingkat pertumbuhan wisatawan dengan target 1,50 - 2,00)
Misi 6 Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan	
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan (Indikator : Indeks Risiko Bencana dengan target 93,02-92,68)	a. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim (Indikator : Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,75) b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan (Indikator

Tujuan	Sasaran
	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 71,74)
Misi 7 Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkeadilan (Indikator : Indeks Desa Membangun dengan target 0,783-0,791)	Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Indikator : Persentase Desa Mandiri dengan target 36,44)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Indikator : Tingkat Kemiskinan dengan target 9,60-9,50)	Menurunnya angka pegangguran dan ketimpangan pendapatan di masyarakat (Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,05)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2026 disusun selaras dengan prioritas nasional dan provinsi.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2026 sangat strategis karena dilaksanakan pada masa transisi kepemimpinan untuk meneruskan estafet kemajuan bangsa. Tema RKP Tahun 2026 adalah ***"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"***. Berdasar tema tersebut ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 4.2 berikut menyajikan perbandingan indikator makro utama antara provinsi dan nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan perkembangan daerah dalam konteks yang lebih luas

TABEL 4.2 INDIKATOR MAKRO NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	URAIAN	2022			2023*			2024**		
		Nas.	Prov.	Kab.	Nas.	Prov.	Kab.	Nas.	Prov.	Kab.
1.	Pertumbahan Ekonomi	5,31	5,34	4,90	5,05	4,95	4,53	5,03	4,93	4,95
2.	Tingkat Kemiskinan	9,71	10,38	10,65	9,54	10,35	10,72	8,57	9,56	9,95
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,86	5,49	6,83	5,32	4,88	5,79	4,91	4,19	5,10
4.	Rasio Gini	0,381	0,371	0,329	0,388	0,387	0,306	0,381	0,373	0,300
5.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54	-	-	0,55	-	-	0,73	-	-
6.	Penurunan emisi gas rumah kaca	26,72%	2.019.943 Ton CO2EQ	98.912 Ton CO2EQ	27,19%	1.846.571 Ton CO2EQ	95.488 Ton CO2EQ	24,93%	2.292.799 Ton CO2EQ	211.654,2 Ton CO2EQ

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana RKP Tahun 2026, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2026 :

"Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Berdasar tema tersebut ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan;
2. Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas;
3. Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;
4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan;
5. Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan;
6. Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan;
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif;
8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif;
9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur yang hendak dicapai pada akhir tahun 2026, antara lain :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,15% – 5,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,41 – 3,91;
3. Rasio Gini sebesar 0,3760 – 0,3540;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,62*;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,45 – 8,30;

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terbesar dan paling berkembang di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal emisi gas rumah kaca . Industri, yang menjadi tulang punggung ekonomi provinsi ini, berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon dioksida dan gas berbahaya lainnya. Dalam upaya

mengurangi emisi GRK, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, termasuk promosi teknologi hijau dalam industri, peningkatan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya provinsi untuk mendukung target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Dalam proses perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri yaitu: Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, Percepatan penurunan stunting, Angka Rata-rata lama sekolah masih rendah (Gap yang semakin tinggi antara HLS dan RLS), Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Kawasan Mataraman, Pembangunan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi yang belum maksimal, Reformasi Birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan Percepatan penurunan angka kemiskinan.

Dengan menganalisis hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah : **“Kediri Berbudaya: Perwujudan Masyarakat Unggul, Tangguh dan Berdaya Saing Yang Didukung Transformasi Ekonomi Serta Kelestarian Budaya dan Ekologi”**, dari tema tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Bidang Pendidikan
2. Peningkatan Bidang Kesehatan
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
4. Peningkatan Bidang Pertanian dan Transformasi Ekonomi
5. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Stunting
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah

Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur yang hendak dicapai pada akhir tahun 2026, antara lain :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,5% – 5,00%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,05;
3. Rasio Gini sebesar 0,295;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,19;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,50;

6. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2-eq) sebesar 204.702,59 ton CO2-eq;

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi di dalam RPJMN pada Pemerintah Kabupaten Kediri diantaranya:

1. Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri;
2. Preservasi jalan ruas Kediri - Tulungagung - Trenggalek dan Kediri - Tulungagung – Blitar;
3. Tema kewilayahan Kabupaten Kediri sebagai bagian dari : Kawasan Perkotaan Kediri; Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi Brantas; serta Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Lingkar Kelud – Kawi Arjuna – Welirang;
4. Penguatan jalan daerah untuk menunjang Hilirisasi Komoditas Unggulan
5. Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara). Program prioritas dan strategi sektor transportasi lebih mengarah pada peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten dan desa. Layanan transportasi publik dapat dipertimbangkan di kawasan perkotaan dahulu dengan output kajian mobilitas dan potensi rute transportasi publik.
6. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis;
7. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
9. Dukungan Pemerintah daerah terhadap program nasional terkait Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel 4.3 berikut :

TABEL 4.3 PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
1.	**Nasional :** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas (PN 4) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN 2) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk	**Provinsi :** - Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan; - Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan; - Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan; - Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan; - Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	**Kabupaten Kediri :** - Percepatan penurunan kemiskinan dan stunting; - Peningkatan Bidang Pendidikan - Peningkatan Bidang Kesehatan - Peningkatan Tata Kelola Pemerintah.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan Persentase Kecamatan STBM Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
	Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN 6) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN 7) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN 8)	dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; - Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif; - Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif;			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin AKI AKB	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko. Alkes Dan Optikal, UMOT	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
					Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-IRT	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	Dinas Kesehatan
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan program rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pengembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja (kemiskinan)

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja
				Program hubungan industrial	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
				Program pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terakreditasi A Cakupan Layanan Pendisikan Non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
					Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase penerapan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Rasio guru pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal dengan peserta didik	Dinas Pendidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase izin pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat	Dinas Pendidikan
				Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	DP2KBP3A
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	DP2KBP3A
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	DP2KBP3A

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	DP2KBP3A
				Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	DP2KBP3A
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB aktif	DP2KBP3A
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	DP2KBP3A
				Program Kawasan Permukiman	Terpenuhinya jumlah KK yang menerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Kediri	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Terpenuhinya relokasi pembangunan Rumah Layak huni bagi warga dampak dari retakan tanah di Dukuh Badut Dusun Besuki Desa Jugo Kecamatan Mojo	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase Konflik sosial terselesaikan	Lintas Sektor
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan agama dan kepercayaan	Bakesbangpol
				Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang terstandarisasi	Dinas Perdagangan
2.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di	- Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	Dinas PUPR

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
	Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3)					
				Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase Sampah yang Dikelola Presentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Lingkungan Hidup DPKP
3.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN 2)	- Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas; - Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan; - Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan	Peningkatan Bidang Pertanian dan Transformasi Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian Jumlah Desa yang melaksanakan inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
		Petani, Peternak dan Nelayan; - Pemberdayaan Pemerintahan Desa.”		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dengan kondisi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal dan kesenian lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan group kesenian yang diberdayakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pelestarian Dan Penge lolaan Cagar Budaya	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pengelolaan Permuseuman	Prosentase sarpras museum yg dipelihara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yg berkompetensi dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	Dinas Kopusmik
				Program Pengembangan UMKUM	Persentase Usaha Mikor yang meningkat omsetnya	Dinas Kopusmik
				Program Pengelolaan Sumber Daya	Prosentase ketersediaan pangan utama (beras) per	DKPP

No.	Prioritas			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Nasional	Provinsi	Kabupaten			
				Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	penduduk (kg/kapita/tahun)	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	Dinas Perikanan
					Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan budidaya yang dilakukan	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel 4.4 berikut :

TABEL 4.4 STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN KEDIRI

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
25	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
26	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
27	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
28	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
29	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
30	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
31	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
32	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS SEMEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
33	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS MOJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
34	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS NGADI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
35	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS KRAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
36	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PELAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
37	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
38	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
39	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS BLABAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
40	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS WATES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
41	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS SILIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
42	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
43	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PUNCU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
44	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
45	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
46	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS GURAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
47	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
48	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PAGU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
49	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS GROGOL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS TANON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
54	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
55	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS PARE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
56	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS BENDO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
57	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
58	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS KELING	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
60	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
61	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
62	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
63	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS TIRON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
64	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS SAMBI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
65	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
66	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS NGASEM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
67	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	UPTD PUSKESMAS BADAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
69	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
70	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
71	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
72	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
73	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
74	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
75	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS SEMEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
76	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS MOJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
77	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS NGADI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
78	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KRAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
79	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PELAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
80	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
81	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
82	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS BLABAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
83	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS WATES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
84	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS SILIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
85	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
86	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PUNCU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
87	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
88	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
89	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS GURAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
90	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
91	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PAGU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
92	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
93	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS GROGOL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
94	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS TANON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
95	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
96	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
97	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
98	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS BENDO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
99	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
101	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KELING	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
102	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
103	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
104	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
105	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS TIRON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
106	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS SAMBI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
107	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
108	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
109	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS NGASEM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
110	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	UPTD PUSKESMAS BADAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
111	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
112	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS SEMEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
113	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	UPTD PUSKESMAS MOJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Immunodeficiency Virus)			
114	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS KRAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
115	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS PELAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
116	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
117	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
118	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS WATES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
119	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS SILIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
120	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
121	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS GURAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
122	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS PAGU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
123	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
124	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS GROGOL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
125	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS TANON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
126	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
127	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
128	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
129	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS PARE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
130	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS BENDO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
131	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
132	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
133	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS KELING	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
134	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
135	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
136	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
137	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS TIRON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
138	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS SAMBI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
139	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
140	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS NGASEM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
141	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	UPTD PUSKESMAS BADAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
142	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
143	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS SEMEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
144	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS MOJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
145	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS NGADI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
146	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KRAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
147	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PELAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
148	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
149	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
150	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS BLABAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
151	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS WATES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
152	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS SILIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
153	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
154	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PUNCU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
155	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
156	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
157	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS GURAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
158	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
159	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PAGU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
160	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
161	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS GROGOL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
162	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS TANON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
163	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
164	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
165	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
166	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS PARE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
167	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS BENDO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
168	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
169	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
170	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KELING	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
171	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
172	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
173	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
174	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS TIRON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
175	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS SAMBI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
176	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
177	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
178	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS NGASEM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
179	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	UPTD PUSKESMAS BADAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
180	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
181	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS SEMEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
182	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS MOJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
183	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS NGADI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
184	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KRAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
185	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PELAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
186	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
187	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
188	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS BLABAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
189	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS WATES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
190	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS SILIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
191	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
192	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
193	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
194	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS GURAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
195	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
196	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PAGU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
197	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
198	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS GROGOL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
199	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS TANON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
200	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
201	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
202	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
203	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS PARE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
204	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS BENDO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
205	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
206	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
207	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KELING	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
208	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
209	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
210	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
211	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS TIRON	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
212	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS SAMBI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
213	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
214	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
215	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS NGASEM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
216	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	UPTD PUSKESMAS BADAS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
217	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
218	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
219	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
220	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
221	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
222	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
223	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
224	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
225	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
226	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
227	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
228	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
229	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
230	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
231	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
232	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
233	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
234	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
235	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
236	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
237	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
238	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
239	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
240	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
241	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penyediaan Alat Bantu

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
242	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
243	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
244	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
245	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
246	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
247	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
248	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
249	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
250	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
251	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
252	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
253	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
254	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
255	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
256	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
257	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
258	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
259	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
260	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
261	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
262	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
263	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
264	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
265	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
266	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
267	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		pengemis terlantar di luar panti			
268	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
269	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana anggaran yang dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Rencana program dan kegiatan yang disusun melalui serangkaian proses perencanaan mulai forum lintas Perangkat daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik, Musrenbang, serta dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029.

Pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana sesuai kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah, masyarakat maupun stakeholder pembangunan. Rencana penganggaran tahun 2026 merupakan total kebutuhan dana dari masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran dokumen RKPD ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh oleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Untuk dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah maka ditetapkan indikator kinerja daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari salah satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya indikator kinerja dapat dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dengan capaian tahun 2024 dan target capaian tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Target Kinerja Utama Kabupaten Kediri Tahun 2026

No.	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75,18	76,00 - 76,35
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,05 - 5,00
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,99	85,86 - 86,19
4.	Indeks Daya Saing Daerah	3,81	3,98 - 4,00

No.	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
5.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum (%)	1,77	1,71 - 1,91
6.	Indeks Risiko Bencana	97,89	110,99
7.	Indeks Desa Membangun	0,78	0,783 - 0,791
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,95	8,29 - 9,74

Sumber : Bappeda Kab. Kediri

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
A.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,35
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1432
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	94.32
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,8
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	12,4
7.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	22,9
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,86
10.	Rasio Penduduk	Persen	101,7
11.	Kepadatan Penduduk	ribu jiwa/km2	1086
12.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,44
13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,74
14.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Eq	428.815,62

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,45-4,50
2.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,32
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83,5
4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	33,31
5.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	74,32
6.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,42
7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,76
8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68
9.	Prevalensi Stunting	Persen	15,65
10.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	40,98 - 52,38
11.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,85
12.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,345
13.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,13
14.	Rasio Gini (nilai)	Indeks	0,272 -0,306
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1.	Angka Ketergantungan	Nilai	46,43
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	23,09
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,92
4.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47,00
5.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,32
6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	31,95 - 32,71
7.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	89,2
8.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,67
9.	Tingkat Inflasi	Persen	2.5±1
10.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,97 – 35,14
11.	Tingkat pertumbuhan wisatawan	Persen	8%
12.	Persentase Desa Mandiri	Persen	38,78
13.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3.91

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,03 - 2,4
2.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	77.23
3.	Persentase Penegakan Perda	Persen	100
4.	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	100
5.	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	82
6.	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2,1
7.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,38
8.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	72
	KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
A	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar**		
1	Pendidikan		
	Indeks SPM Bidang Pendidikan	indeks	83,48
2	Kesehatan		
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Persen	88,87
	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Persen	15,47
	Persentase capaian penyelenggaraan penataan ruang	Persen	84,57
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Cakupan rumah tangga dengan Layanan Utilitas Hunian	Persen	87.92
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	97,76
	Cakupan layanan penanganan kasus kebakaran dan non kebakaran	Persen	100
6	Sosial		
	Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	57,53

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
B	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar**		
1	Ketenagakerjaan		
	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	14
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	indeks	0,0060
3	Pangan		
	Ketersediaan energi per kapita	Nilai	3.362 kkal/kapita/hari
	Ketersediaan protein per kapita	Nilai	18,04 gram/kapita/hari
4	Lingkungan Hidup		
	Indeks Kualitas Air	Indeks	72,47
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,75
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	55,67
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	40
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	35
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	93,75
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	90,50
8	Perhubungan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	Indeks	80,40
9	Komunikasi dan Informatika		
	Indeks PPID	Indeks	96,32

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Rasio Kewirausahaan	Persen	58,20%
11	Penanaman Modal		
	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	1,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan	Indeks	88,16
12	Kepemudaan dan Olahraga		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	8,8
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	21,79
	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	40
13	Statistik		
	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,70
14	Persandian		
	Indeks KAMI	Indeks	450
15	Kebudayaan		
	Persentase cakupan event pariwisata dan budaya yang diikuti	Persen	40
16	Perpusatakaan		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	83,5
17	Kearsipan		
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	81
C	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**		
1	Pariwisata		
	pertumbuhan pendapatan sektor kepariwisataan	Persen	16%
2	Kelautan dan Perikanan		
	PDRB sub sektor perikanan	Nilai	859,57
3	Pertanian		
	Nilai Tukar Petani	Nilai	106

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
4	Perdagangan		
	Persentase PDRB Sektor perdagangan	Persen	4,96
5	Perindustrian		
	Persentase PDRB Sektor Industri	Persen	3,88
D	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan**		
1	Perencanaan Pembangunan		
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	78
2	Keuangan		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	66,45
3	Kepegawaian		
	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81,94
4	Penelitian dan Pengembangan		
	Presentase implementasi hasil penelitian dan Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,80
5	Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Persentase Pengendalian Kejadian Konflik	Persen	85
	Persentase sasaran masyarakat yang terbina terkait Nasionalisme	Persen	85
	Persentase partisipasi aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama	Persen	85
	Persentase Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	Persen	65
	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar	Persen	85
6	Pengawasan		
	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai	Level 3 (3,207)
	Indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD)	Indeks	89
7	Sekretariat Dewan		
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD	persen	93,25 (Puas)
8	Kesekretariatan Daerah		
	Presesntase kegiatan kesejahteraan rakyat yang direalisasikan	Persen	100%
	Nilai LPPD	Nilai	3

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
	Persentase Produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum	Persen	100%
	Persentase kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang direalisasikan	Persen	100%
	Indeks Matriks UKPBJ	Indeks	8/9
	Nilai SAKIP	Nilai	76.12
	Nilai IKM	Nilai	88.81
9	Kecamatan		
	Nilai IKM	Indeks	87,00
	Persentase dokumen administrasi Kecamatan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100

Sumber : Bappeda Kab. Kediri (data diolah)

Tabel berikut menyajikan Standar Pelayanan Minimal dalam kegiatan dan subkegiatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2026 untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal pada tabel 6.3 sebagaimana berikut :

TABEL 6.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN KEDIRI

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	SPM Bidang Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
4	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
6	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
7	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru
8	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
9	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
10	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
11	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
12	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
13	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
14	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
16	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
17	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru
18	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
19	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
20	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
21	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
22	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
23	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
25	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
26	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
27	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
28	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
29	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
30	SPM Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
31	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
32	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
33	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
34	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
35	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
36	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
37	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
38	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
39	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
40	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
41	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
42	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
43	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
44	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
45	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
46	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
47	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
48	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
49	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
50	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
51	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
52	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
53	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
54	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
55	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
56	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
57	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
58	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
60	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
61	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
62	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
63	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
64	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
65	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
66	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
67	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
68	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
69	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
70	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
71	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
72	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
73	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
74	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
75	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
76	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
77	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
78	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
79	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
80	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
81	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
82	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
83	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
84	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
85	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
86	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
87	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
88	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
89	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
90	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
91	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
92	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
93	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
94	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
95	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
96	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
97	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
98	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
99	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
101	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
102	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
103	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
104	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
105	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
106	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
107	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
108	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
109	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
110	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
111	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
112	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
113	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
114	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
115	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
116	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
117	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
118	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
119	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
120	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
121	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
122	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
123	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
124	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
125	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
126	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
127	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
128	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
129	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
130	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
131	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
132	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
133	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
134	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
135	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
136	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
137	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
138	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
139	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
140	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
141	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
142	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
143	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
144	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
145	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
146	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
147	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
148	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
149	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
150	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
151	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
152	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
153	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
154	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
155	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
156	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
157	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
158	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
159	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
160	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
161	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
162	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
163	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
164	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
165	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
166	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
167	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
168	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
169	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
170	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
171	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
172	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
173	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
174	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
175	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
176	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
177	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
178	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
179	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
180	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
181	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
182	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
183	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
184	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
185	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
186	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
187	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
188	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
189	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
190	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
191	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
192	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
193	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
194	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
195	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
196	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
197	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
198	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
199	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
200	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
201	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
202	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
203	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
204	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
205	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
206	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
207	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
208	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
209	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
210	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
211	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
212	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
213	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
214	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
215	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
216	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
217	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
218	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
219	SPM Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
220	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
221	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
222	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
223	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
224	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
225	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
226	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
227	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
228	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
229	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
230	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
231	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
232	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
233	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
234	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
235	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
236	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
237	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Layanan Kedaruratan

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
238	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
239	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
240	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
241	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
242	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
243	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
244	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
245	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
246	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
247	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
248	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
249	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
250	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
251	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
252	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
253	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
254	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
255	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
256	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
257	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
258	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
259	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
260	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
261	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
262	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
263	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
264	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
265	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
266	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
267	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang
268	SPM Bidang Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
269	SPM Bidang Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dan kerangka pendanaan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah.

Tema dan Sasaran RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2024 sehingga tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 yaitu ***"Kediri Berbudaya: Perwujudan Masyarakat Unggul, Tangguh dan Berdaya Saing Yang Didukung Transformasi Ekonomi Serta Kelestarian Budaya dan Ekologi".***

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri pada tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan mengimplementasikan : 1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029; 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; 3) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2026;
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri;

3. Penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini akan dapat terlaksana lebih efektif sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan dengan dukungan serta keterlibatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun dunia usaha. Untuk itu, peran nyata segenap elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Kediri Berbudaya menuju masyarakat Kabupaten Kediri unggul dan berkualitas.